

LAKIP 2022



DINAS PERINDUSTRIAN PROV. SULAWESI SELATAN

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil'alamin, kami panjatkan segala puji syukur kehadiran Allah Subhanahuwata'ala yang telah melimpahkan berkat dan rahmat-Nya sehingga Laporan Kinerja Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 dapat tersusun. Laporan Kinerja Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP).

Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan juga merupakan alat kendali dan alat pemacu kinerja setiap unit bidang dan UPTD di lingkungan Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan.

Secara garis besar Laporan Kinerja Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 ini berisi informasi tentang perencanaan dan capaian kinerja tahun ketiga periode Renstra 2018-2023 Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan, baik keberhasilan maupun kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang tercermin dalam setiap indikator kerjanya serta memuat aspek keuangan yang digunakan dalam melaksanakan program dan kegiatan terhadap pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Besar harapan kami semoga Laporan Kinerja Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan ini, dapat menjadi sarana evaluasi atas pencapaian kinerja yang nantinya akan diperoleh manfaat umpan balik bagi perbaikan dan peningkatan kinerja pada masa yang akan datang. Terima kasih.

Makassar, 31 Januari 2023

Kepala Dinas Perindustrian
Provinsi Sulawesi Selatan



H. AHMADI AKIL, SE, MM.
Pembina Utama Madya.
NIP. 19651231 199403 1 081

DAFTAR ISI		<i>halaman</i>
Kata Pengantar.....		i
Daftar Isi.....		1
BAB I PENDAHULUAN.....		8
1.1 Latar Belakang.....		8
1.2 Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian Prov. Sulawesi Selatan.....		10
1.3 Kekuatan Sumber daya Aparatur.....		11
1.4 Isu Strategis Yang Dihadapi		13
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....		15
2.1 PERENCANAAN KINERJA DINAS PERINDUSTRIAN TAHUN 2022.....		15
1. Visi dan Misi.....		16
2. Tujuan dan Sasaran.....		17
3. Strategi Kebijakan dan Program		18
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2022		19
2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)		20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....		22
3.1 Metodologi Pengukuran Kinerja.....		22
3.2 Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2022.....		23
3.3 Analisis Capaian Kinerja Tahun 2022		24
- Sasaran Strategis 1.		
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja		27
1. Persentase Nilai SAKIP Organisasi Perangkat Daerah		27
2. Persentase Nilai SKP Kategori Baik		
3. Rata-rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Evaluasi Dokumen Perencanaan)		29
4. Persentase Temuan Material.		
a. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Solusi Yang Telah dilakukan		31
b. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber daya		31
c. Analisis Program dan Kegiatan yaang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja		32
- Sasaran Strategi. 2		

Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	38
1. Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan	
a. Perbandingan antara target Dan Realisasi	39
b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja tahun 2022 Dengan Tahun-Tahun Sebelumnya.....	39
c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis dan Standar Nasional.....	39
d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Solusi Yang Telah dilakukan	41
e. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber daya	44
f. Analisis Program dan Kegiatan yaang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja	45
- Sasaran Strategi. 3	
Meningkatnya Penerapan Standarisaassi	47
a. Perbandingan Antara Target Dan Realisasi	47
b. Perbandingan antara Realisasi dengan Tahun- Tahun Sebelumnya	48
c. Target Jangka Menengah Yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis dan Standar Nasional	48
d. Analisis Penyebab Keberhasilan /Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Serta Solusi Yang dilakukan.....	48
e. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber daya	51
f. Analisis Program dan Kegiatan yaang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja	52
- Sasaran Strategi.4	
Meningkatnya Pengelolaan, Penyediaan dan Penyebaran Informasi Industri	54
a. Perbandingan Antara Target Dan Realisasi	55
b. Perbandingan antara Realisasi dengan Tahun- Tahun Sebelumnya	55
c. Target Jangka Menengah Yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis dan Standar Nasional	56

d.	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan /Penurunan Serta Solusi Yang dilakukan	56
e.	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber daya	58
f.	Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja ...	58
3.4	Realisasi Anggaran Tahun 2022	59
3.4.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2022	59
3.4.2	Realisasi Anggaran APBD dan APBN tahun 2022	60
BAB IV	PENUTUP	62
4.1	Kesimpulan	62
4.2	Penghargaan yang Diperoleh Di Tahun 2022	64
4.3	Permasalahan dan Kendala	65

DAFTAR TABEL

1	Tabel 1.3.1	Jumlah Pegawai Dinas Perindustrian Tahun 2022 berdasarkan Uraian Jabatan	11
2	Tabel 1.3.2	Jumlah Pegawai Dinas Perindustria tahun 2022 berdasarkan Uraian Jenis Kelamin	12
3	Tabel 1.3.3	Jumlah Pegawai Dinas Perindustria tahun 2022 berdasarkan Uraian Jenis Kelamin	13
4	Tabel 1.3.4	Jumlah Pegawai Dinas Perindustria tahun 2022 berdasarkan Uraian Jenis Pendidikan	14
5	Tabel 1.3.5	Jumlah Pegawai Dinas Perindustrian Tahun 2022 Berdasarkan Usia	15
6	Tabel 2.2.1	Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2022	21
7	Tabel 2.3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Manengah(IKU).....	22
8	Tabel 3.1.1	Skala Nilai Peringkat kerja.....	24
9	Tabel 3.2.1	Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2022....	25
10	Tabel 3.3.1	Perbandingan Realisasi Tahun 2022 Dengan Target Dan Realisasi Tahun 2021, 2010, 2019.....	26
11	Tabel 3.3.2	Perolehan Nilai Sakip Tahun 2022	27
12	Tabel 3.3.3	Perkembangan Nilai Akuntabilitas tahun 2019-2022 Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan	28

13	Tabel 3.3.4	Perbandingan antara Realisasi Tahun 2022 dengan Tahun-tahun Sebelumnya	29
14	Tabel 3.3.5	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan target Jangka Menengah Yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Dan Standar Nasional	29
15	Tabel 3.3.6	Realisasi Anggaran Dinas Perindustrian Prov. Sulawesi Selatan tahun 2022	31
16	Tabel 3.3.7	Penghargaan Yang Diperoleh Di Tahun 2022	36
17	Tabel 3.3.8	Pengukuran capaian Sasaran Strategis (dalam %)	37
18	Tabel 3.3.9	Perbandingan Nilai PDRB Tahun 2019-2022	39
19	Tabel 3.3.10	Perbandingan Reaslisasi nilai PDRB Tahun 2022 , Jangka Menengah dan Nasional	39
20	Tabel 3.3.11	Pengukuran Capaian sasaran Strategis	40
21	Tabel 3.3.12	Realisasi Anggaran Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi selatan Untuk sasaran 2	45
22	Tabel 3.3.13	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Tahun 2022(Untuk Indicator Presentase Peningkatan Industri Yang telah Terstandarisasi)	47
23	Tabel 3.3.14	Perbandingan target Presentase Tahun 2019-2022 (Untuk Indicator Presentase Peningkatan Industri Yang telah Terstandarisasi)	48
24	Tabel 3.3.15	Perbandingan Traget Presentase Peningkatan Industri yang telah Terstandarisasi Tahun 2022,Jangka Menengah dan Nasional	48
25	Tabel 3.3.16	Realisasi Dinas Perindustrian tahun 2022 (Untuk Meningkatkan Pengelolaan, Penyediaan dan Penyebarluasan Informasi Industri	52
26	Tabel 3.3.17	Perbandingan antara target dan realisasi tahun 2022(Untuk Meningkatnya Pengelolaan, Penyediaan dan Penyebarluasan Informasi Industri)	52
27	Tabel 3.3.18	Perbandingan antara target dan Realisasi Tahun 2019-2022(Untuk Meningkatnya Pengelolaan, Penyediaan dan Penyebarluasan Informasi Industri)	55
29	Tabel 3.3.19	Perbandingan Target Presentase Peningkatan Akses dan Pemanfaatan Informasi Indsutri Oleh Masyarakat	56
30	Tabel 3.4.1	Penerimaan PAD Dinas Perindustrian Sulawesi Selatan Tahun 2022	60
31	Tabel 3.4.2.1	Jumlah APBD Sekror Industri Tahun 2022	60

32	Tabel 3.4.2.2	Realisasi Belanja APBD Per Program	61
33	Tabel 3.4.2.3	Program dan Kegiatan APBN Dinas Perindustrian T.A 2022	61
DAFTAR GRAFIK			
1	Grafik 1.3.1	Persentase Pegawai Dinas Perindustrian Tahun 2022 Berdasarkan Uraian Jabatan	12
2	Grafik 1.3.2	Persentase Pegawai Dinas Perindustrian Tahun 2022 Berdasarkan Uraian Jabatan	13
3	Grafik 1.3.3	Persentase Pegawai Dinas Perindustrian Tahun 2022 Berdasarkan Golongan	14
4	Grafik 1.3.4	Persentase Pegawai Dinas Perindustrian Tahun 2022 Berdasarkan Pendidikan	15
5	Grafik 1.3.5	Persentase Pegawai Dinas Perindustrian Tahun 2022 Berdasarkan Usia	16
6	Grafik 3.3.1	Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Presentase Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB Sulawesi Selatan Tahun 2018 S/d 2022	41
7	Grafik 3.4.1	Jumlah APBD Sektor Industri Tahun 2022	60

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan merupakan organisasi perangkat daerah yang ditugaskan untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Perindustrian serta tugas pembantuan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 48 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang berlaku sejak bulan Januari 2022. Dalam melaksanakan tugas tersebut Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan dituntut untuk melaksanakannya dengan transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Salah satu azas penyelenggaraan good governance yang tercantum dalam Undang-Undang nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2022 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi Dinas Perindustrian dan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi stakeholder demi perbaikan kinerja Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, penyusunan Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review Atas Laporan Kinerja.

Atas dasar tersebut, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) berdiri sebagai bagian dari desain besar Reformasi Birokrasi untuk melaksanakan seluruh proses pemerintahan dalam rangka merealisasikan keinginan bersama untuk mewujudkan Good Governance. SAKIP menuntut adanya sinergitas antara proses perencanaan-pengukuran, pelaporan sampai evaluasi dan pemanfaatan informasi

kinerja. Pada kondisi terkini, evaluasi terhadap AKIP merupakan isu paling strategis dalam SAKIP karena pada akhir prosesnya akan dapat mencerminkan optimal atau tidaknya kinerja dari tiap-tiap lembaga/instansi pemerintah. Sebab hal ini dapat memperlihatkan sejauh mana kemajuan instansi pemerintah dalam menerapkan manajemen kinerja yang berfokus padahasil.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan. Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai sarana dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan kepada Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan. Selain sebagai bahan evaluasi, laporan akuntabilitas kinerja ini diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka :

1. Mendorong Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsi pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepadamasyarakat;
2. Menjadikan Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan yang akuntabel, sehingga dapat berperan secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan yang tentram, tertib dankondusif;
3. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan guna membantu pelayanan kepada masyarakat yang lebihbaik;
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pembangunan pada Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan.

Analisis capaian kinerja / permasalahan dan strategi pemecahan masalah dalam rangka peningkatan kinerja Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan dilakukan dengan cara membandingkan antara rencana dengan realisasi secara bertingkat melalui pengukuran indikator kegiatan sampai kepada sasaran. Penentuan bobot antar indikator kegiatan, program dan kebijakan dilakukan dengan mempertimbangkan masing-masing peranannya dalam mencapai sasaran sebagaimana tercantum dalam Rencana StrategisDinas Perindustrian Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018 - 2023.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2022 dibuat sebagai pertanggung jawaban kepada Gubernur Sulawesi Selatan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja dalam lingkup Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan.

1.2 KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PERINDUSTRIAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 48 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Dinas Perindustrian merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Perindustrian yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Adapun tugas pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan sesuai Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No. 48 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut : Dinas Perindustrian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang perindustrian berdasarkan asas Desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan .Selanjutnya untuk menyelenggarakan tugas pokok mempunyai fungsi:

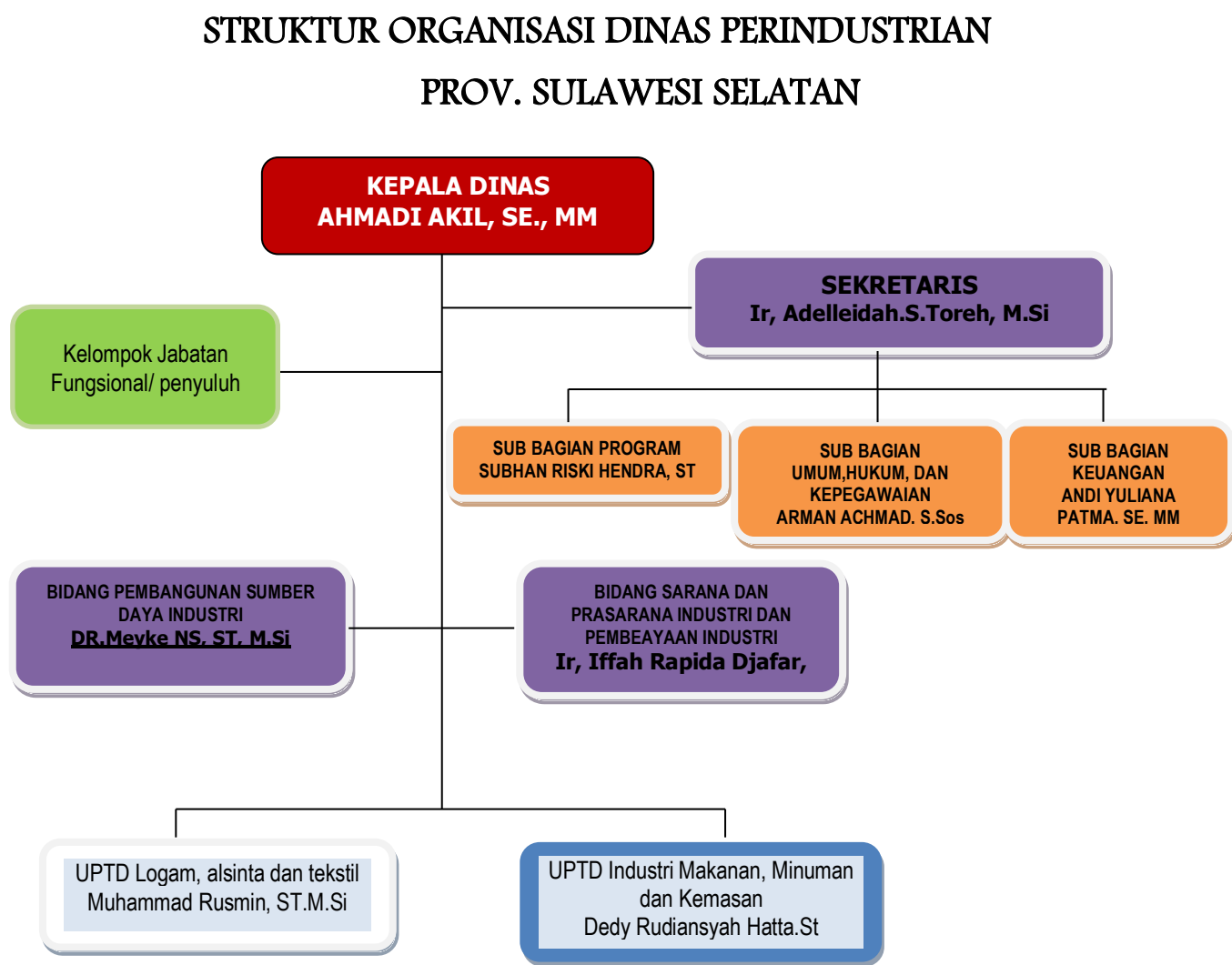
1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perindustrian meliputi bidang Pembangunan Sumber Daya Industri, Bidang Sarana & Prasarana dan Pemberdayaan Industri, Bidang Industri makanan , minuman dan kemasan serta Bidang Industri Logam, Alsinta dan tekstil.
2. Penyelenggaraan urusan pelayanan umum di bidang Perindustrian meliputi bidang Pembangunan Sumber Daya Industri, Bidang Sarana & Prasarana dan Pemberdayaan Industri, Bidang industri Industri makanan , minuman dan kemasan serta Bidang Industri Logam, Alsinta dan tekstil.
3. Pembinaan dan penyelenggaraan tugas di bidang Perindustrian meliputi bidang Pembangunan Sumber Daya Industri, Bidang Sarana & Prasarana dan Pemberdayaan Industri, Bidang industri Industri makanan , minuman dan kemasan serta Bidang Industri Logam, Alsinta dan tekstil.
4. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi, Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2022 telah melaksanakan berbagai kegiatan yang ditunjang dengan dukungan dana, personil serta sarana yang tersedia agar tercapainya sasaran pembangunan ekonomi khususnya industri di Sulawesi Selatan. Adapun program dan kegiatan-kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi selatan (RPJMD) Tahun 2018-2023 dan Renstra Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023.

Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan dipimpin oleh 1 (satu) orang Kepala Dinas (eselon II A), dengan membawahi 4 (empat) eselon III yakni 1 (satu) orang

Sekretaris Dinas, 2 (dua) orang Kepala Bidang dan 1 (satu) orang kepala UPTD Logam dan 4 (empat) orang eselon 4 yakni 1 (satu) Kepala UPTD. Masing-masing dan 3 orang kasubag

Adapun struktur organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut :



Tugas pokok masing-masing unit kerja sesuai Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 48 Tahun 2019, adalah sebagai berikut :

1. Bidang Sekretariat : mengoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, hukum, dan keuangan dalam lingkungan Dinas
2. Bidang Pembangunan Sumberdaya Industri : melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pembangunan sumber daya industri.
3. Bidang Sarana dan Prasarana Industri dan Pemberdayaan Industri : melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang sarana dan prasarana industri, dan pemberdayaan industri.
4. UPTD Logam, Tekstil dan Alat Mesin Pertanian : melaksanakan pelayanan, penyiapan perumusan, peningkatan dan pengembangan serta evaluasi dan pelaporan di bidang Teknologi Industri

5. UPTD Makanan, Minuman dan Kemasan : Melaksanakan pelayanan, peningkatan dan pengembangan serta evaluasi dan pelatihan di bidang Industri makanan, minuman dan kemasan bermitra dengan pelaku usaha.

1.3 KEKUATAN SUMBER DAYA YANG ADA

Sumber Daya Aparatur

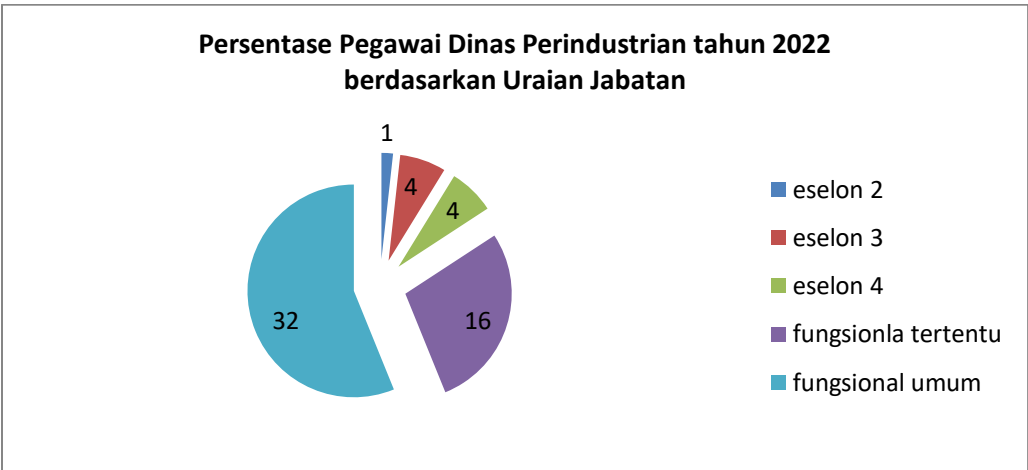
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya guna menghasilkan rencana pembangunan di Sektor Perindustrian yang berkualitas, sinergis dan kredibel perlu didukung oleh sumber daya manusia yang handal. Pada tahun 2022, Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan memiliki pegawai sebanyak 57 orang yang terdiri atas 9 orang struktural, 32 orang fungsional umum dan 16 orang fungsional tertentu. Pada grafik berikut dapat dilihat kekuatan pegawai di Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022.

Kekuatan kepegawaian berdasarkan uraian jabatan yang terdiri dari jabatan Struktural, Fungsional Umum dan Fungsional Tertentu dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut:

Tabel 1.3.1
Jumlah Pegawai Dinas Perindustrian Tahun 2022
Berdasarkan Uraian Jabatan

NO	PETA JABATAN	JUMLAH
1	Eselon II	1
2	Eselon III	4
3	Eselon IV	4
4	Fungsional Tertentu (Ahli Terampil)	16
5	Fungsional Umum (staf)	28
Jumlah		57

Grafik 1.3.1
Persentase Pegawai Dinas Perindustrian Tahun 2022
Berdasarkan Uraian Jabatan



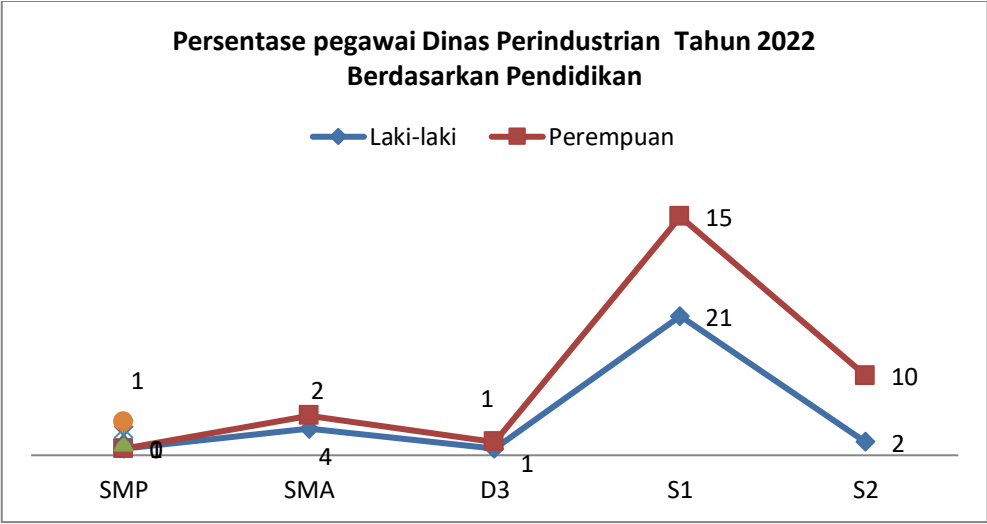
Ditinjau dari jumlah PNS yang ada pada Dinas Perindustrian Provinsi

Sulawesi Selatan belum memadai dan perlu ada penambahan pegawai. Hal ini disebabkan oleh banyaknya pegawai yang memasuki masa purna bakti dan pensiun, begitupula bila dilihat dari tingkat kompetensinya perlu adanya peningkatan SDM yang berkaitan dengan kemampuan yang dimiliki seorang pegawai negeri sipil di dalam menjabat suatu jabatan struktural maupun jabatan fungsional sesuai tugas pokok dan fungsinya serta khususnya dalam menunjang visi dan misi organisasi. Mengenai pegawai negeri sipil yang mengisi jabatan fungsional tertentu sebanyak 16 orang perlu mendapat perhatian khusus untuk ditingkatkan kompetensinya dan perlu dipertegas implementasi penugasannya agar lebih optimal dan tidak tumpang tindih. Selain faktor jumlah dan kualifikasi pendidikan, faktor lain yang sangat perlu mendapat perhatian adalah motivasi dan kedisiplinan.

Tabel. 1.3.4
Jumlah Pegawai Dinas Perindustrian Tahun 2022
Berdasarkan Pendidikan

No	Jenis Kelamin	Tingkat Pendidikan				
		SMP	SMA	D3	S1	S2
1	Laki-laki	1	4	1	21	2
2	Perempuan		2	1	15	10
Jumlah		1	6	2	36	12
persentase		1.75	10.53	3.51	63.1	22.80

Grafik 1.3.4
Persentase Pegawai Dinas Perindustrian Tahun 2022
Berdasarkan Pendidikan



Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat, pada tahun 2022 kekuatan pegawai di Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi selatan berdasarkan tingkat pendidikan

sebesar 63,1% berpendidikan S1 atau sebanyak 36 orang, 22.80 % berpendidikan S2 atau sebanyak 12 orang, 3.51 % berpendidikan D3 atau sebanyak 2 orang dan berpendidikan SMU sebesar 10.53 % atau sebanyak 6 orang dan yang berpendidikan SMP sebanyak 1.75 % atau sebanyak 1 orang

1.4 ISU STRATEGIS YANG DIHADAPI

Penentuan Isu-Isu Strategis

Setelah melakukan analisis terhadap (1) permasalahan atau kendala yang dihadapi Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, (2) peranannya dalam pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan yang dijabarkan dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, (3) Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, (4) potensi dan kondisi serta rencana pembangunan beberapa kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, dan (5) Rencana Tata Ruang dan Wilayah Sulawesi Selatan Tahun 2009 – 2029 dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), serta memperhatikan lingkungan strategis yang berpengaruh, maka ditetapkan isu-isu strategis yang akan dijadikan sebagai acuan dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2023, sebagai berikut :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah.
2. Peningkatan Jumlah Industri Besar, Kecil dan Menengah di Kabupaten/Kota.
3. Peningkatan jumlah Sentra Industri dan Kawasan Industri.
4. Peningkatkan keterampilan dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) sektor Industri
5. Peningkatan Kemampuan Teknologi dan proses Inovasi pada Industri (Inovation Core)

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN KINERJA DINAS PERINDUSTRIAN TAHUN 2022

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Dalam rencana strategis disusun tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan. Visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi tersebut disusun dalam dokumen Renstra Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan 2018 – 2023 sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018 - 2023 di mana setiap tahunnya dijabarkan kembali dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan kemampuan unit pelaksana.

Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan mencapai tujuan dan sasaran dalam Renstra dengan efektif dan efisien.

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai. Ia merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi tersebut selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Penetapan strategi dilakukan untuk menjawab cara pencapaian sasaran-sasaran pembangunan dan jangka waktu pencapaian sasaran-sasaran tersebut. Sebuah strategi dapat dilakukan untuk menjawab

Rumusan kebijakan umum bertujuan menjelaskan cara yang ditempuh untuk menterjemahkan strategi ke dalam rencana program-program prioritas pembangunan. Kebijakan umum pembangunan memberikan arah perumusan rencana program prioritas pembangunan yang disertai kerangka pengeluaran jangka menengah daerah dan menjadi pedoman dalam menyusun program dan kegiatan pada Rencana Strategis (Renstra) bagi Dinas Perindustrian

VISI : Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter			
MISI : (1) Pemerintahan yang Berorientasi, Melayani dan Inovatif			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
(1) Meningkatkan akuntabilitas perangkat daerah	(1) Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah	(1) Peningkatan akuntabilitas perangkat daerah	(4) peningkatan akuntabilitas dan kinerja perangkat daerah
MISI : (5) Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Produk Sumberdaya Alam yang Berkelanjutan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
(2) Meningkatkan laju pertumbuhan dan kontribusi sektor industri daerah dalam mendorong perekonomian daerah	(2) Meningkatnya kontribusi sektor industri terhadap nilai PDRB	(2) Peningkatan nilai PDRB sektor industri	(3) peningkatan kontribusi sektor industri terhadap nilai PDRB
(3) Mewujudkan iklim industri daerah yang kondusif dan mampu menjamin keberlangsungan eksistensi industri daerah dan menarik tumbuh berkembangnya industri baru	(3) Meningkatnya penerapan standarisasi industri (4) Meningkatnya pengelolaan, penyediaan dan penyebarluasan informasi industri	(3) Peningkatan standarisasi industri (4) Peningkatan informasi industri	(1) Peningkatan daya saing industri melalui penerapan standarisasi industri (2) peningkatan publikasi informasi industri dan akses informasi industri ke masyarakat

1. Visi Dan Misi

Visi Misi 2018 – 2023

1.1 VISI

Pembangunan Sulawesi Selatan merupakan gambaran kesuksesan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun kedepan yang disusun dengan memperhatikan RPJPD 2008-2028 Sulawesi Selatan, substansi RPJM Nasional, dinamika lingkungan strategis, aspirasi masyarakat dan pemerintah Sulawesi Selatan, serta visi misi Gubernur/Wakil Gubernur. Untuk itu Visi Pembangunan Sulawesi Selatan untuk 5 tahun pertama RPJMD 2018-2023 adalah:

“ Sulawesi selatan yang inovatif, produktif, kompetitif, inkulsif dan berkarakter”.

Rumusan visi ini mengandung lima pokok visi didalamnya yakni inovatif, produktif, kompetitif, inklusif dan berkarakter. Kelima pokok visi ini merupakan rangkaian yang terkait satu sama lain dalam mewujudkan kondisi pada tahun 2023 dimana terjelmakan provinsi sulawesi selatan yang “bersih dan melayani” terkoneksi”, mandiri dan sejahtera”, sehat dan cerdas serta berkarakter”. Berdasarkan pemahaman itu maka penjelasan visi RPJMD Sulawesi selatan 2018-2023 adalah sebagai berikut :

1. **INOVATIF** adalah kondisi pemerintahan yang memiliki kemampuan menciptakan gagasan baru, produk Baru dan layanan baru dalam kerangka pemerintahan yang baik sehingga terwujud sulawesi selatan yang bersih melayani.
2. **KOMPETITIF** adalah kondisi masyarakat yang memiliki sumberdaya manusia (SDM) dengan kualitas tinggi sehingga terwujud sulawesi selatan yang sehat dan cerdas.

3. **PRODUKTIF** adalah kondisi perekonomian yang berkemampuan menghasilkan produk barang dan jasa yang berdaya saing sehingga terwujudnya Sulawesi Selatan yang mandiri dan sejahtera.
4. **INKLUSIF** Adalah kondisi penyelenggaraan pembangunan yang melibatkan partisipasi seluruh unsur masyarakat dan seluruh bagian wilayah serta ramah terhadap lingkungan hidup sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang inklusif dan terkoneksi .
5. **BERKARAKTER** Adalah kondisi penyelenggaraan pembangunan Sulawesi Selatan yang dilandasi oleh spirit dan nilai-nilai luhur kebudayaan masyarakat sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang berkarakter.

1.2 Misi

Adapun penjabaran dari visi kepala daerah yang baru dituangkan dalam misi Daerah ada 5 (lima), yaitu:

1. **Mewujudkan pemerintahan yang berorientasi melayani dan inovatif**, menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik, pelayanan yang responsif dan inklusif dengan berbasis pada inovasi
2. **Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan aksesibel**, membangun infrastruktur dalam menguatkan interkoneksi antar wilayah pertumbuhan ekonomi dan menjangkau lokasi pelosok dan terisolir.
3. **Mewujudkan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang produktif**. Mengembangkan pusat pertumbuhan ekonomi baru sesuai keunggulan komparatif wilayah.
4. **Mewujudkan kualitas manusia yang kompetitif, inklusif dan berkarakter**. memenuhi akses pendidikan yang berkualitas dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa hambatan bagi seluruh warga serta mendorong pelestarian dan kemajuan kebudayaan daerah.
5. **Meningkatkan produktivitas dan daya saing produk sumberdaya alam yang berkelanjutan**, meningkatkan produktivitas dan daya saing produk perekonomian rakyat serta melestarikan lingkungan hidup dan sumber daya alam .

Untuk mewujudkan tersebut maka arah dan pokok-pokok kebijakan yang akan ditempuh adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kapasitas kelembagaan Dinas Perindustrian Sulawesi Selatan
2. Pengembangan Teknologi Industri berbasis kompetensi daerah dalam meningkatkan daya saing

2. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan akuntabilitas perangkat daerah
- b. Meningkatkan laju pertumbuhan dan kontribusi sector industri daerah dalam mendorong perekonomian
- c. Mewujudkan iklim industri daerah yang kondusif dan mampu menjamin keberlangsungan eksistensi industri daerah dan menarik tumbuh berkembangnya industri-industri.

b. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah
- b. Meningkatkan laju pertumbuhan dan kontribusi sector industri daerah dalam mendorong perekonomian daerah .
- c. Mewujudkan iklim industri daerah yang kondusif dan mampu menjamin keberlangsungan eksistensi industri daerah dan menarik tumbuh berkembangnya industri - industri baru.

3. Strategi, Kebijakan Dan Program

a. Strategi dan Arah Kebijakan

Dalam upaya mencapai visi dan misi organisasi diperlukan perumusan cara mencapai tujuan dan sasaran (strategi) yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi organisasi. Adapun strategi dasar yang ditempuh adalah :

”Meningkatkan fasilitasi dan pelayanan yang efisien, efektif dan akuntabel di sektor industri guna mewujudkan sektor industri sebagai penggerak utama pembangunan ekonomi daerah melalui pengembangan kompetensi inti daerah”.

Untuk mewujudkan tersebut maka pokok-pokok kebijakan yang akan ditempuh adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan akuntabilitas perangkat daerah dan sumber daya manusia aparatur
- Meningkatkan pertumbuhan industri kecil dan menengah
- Membina dan mengembangkan sentra industri dan kawasan industri
- Meningkatkan kapasitas teknologi, sumber daya manusia dan sistem produksi industri
- Meningkatkan inovasi dan teknologi industri untuk hilirisasi

b. Program

Untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan untuk Tahun Anggaran 2022 telah merumuskan 4 (empat) program

yang merupakan penjabaran dari strategi dasar dan 5 (lima) kebijakan publik. Ke-4 (empat) program tersebut adalah:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
2. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
3. Program Pengendalian Izin Usaha Industri
4. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

2. 2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja tahun 2022 disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 telah ditetapkan pada tanggal 3 Januari 2022 sebagaimana lampiran I dan telah dilakukan sehubungan adanya perubahan indikator kinerja.

Perencanaan kinerja Dinas Perindustrian tahun 2022 disusun melalui 2 (dua) tahapan perencanaan, yaitu tahapan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022 dan tahapan penyusunan Perjanjian Kinerja (Perkin) Tahun 2022. Sesuai dengan pedoman penyusunan dokumen akuntabilitas kinerja dinas Perindustrian, dokumen RKT Dinas Perindustrian Tahun 2022 disusun pada tahun 2021 dan dokumen Perjanjian Kinerja (Perkin) Tahun 2022 ditetapkan pada awal tahun anggaran 2022. Berdasarkan dokumen RKT yang telah disusun dan dengan mempertimbangkan dinamika kebijakan, perencanaan, dan penganggaran, diantaranya penyesuaian target kinerja Renstra

Dinas Perindustrian Tahun 2018-2023, serta hasil evaluasi Laporan Kinerja Dinas Perindustrian tahun 2021 maka disusun target kinerja yang akan dicapai Dinas Perindustrian pada tahun 2022

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan dokumen pernyataan /kesepakatan /perjanjian kinerja untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan. Adapun Perubahan Perjanjian Kinerja dimaksud sebagai berikut:

Tabel 2.2.1
Perjanjian Kinerja Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.1	Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat daerah		
1.1.1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja , Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat daerah	Persentase Nilai SAKIP Organisasi Perangkat daerah	100%
		% Nilai Nilai SKP Kategori Baik	
		Rata-rata Capaian Kinerja Perangkat daerah (Evaluasi DokumenPerencanaan	
		% Temuan Material	0,05%
2.2	Meningkatnya laju pertumbuhan dan Kontribusi sector Industri daerah dalam mendorong perekonomian daerah		
2.1.1	Meningkatnya kontribusi sektor Industri terhadap nilai PDRB	% Pertumbuhan sektor industry pengolahan	5 %
		% Kontribusi sektor industry terhadap PDRB	13 %
3.3	Mewujudkan Iklim Industri Daerah yang kondusif dan mampu menjamin keberlangsungan asistensi Daerah dan menarik Tumbuh berkembangnya Industri- Industri Baru		
3.1.1	Meningkatnya penerapan standarisasi industri	% Industri yang telah terstandarisasi	2 %
3.1.2	Meningkatnya pengelolaan, penyediaan dan penyebarluasan info Industri	% Akses dari pemanfaatan Informasi Industri oleh Masyarakat	2,5 %

2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi Pemerintah yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.Dinas Perindustrian Provinsi Sulsel telah melakukan revisi terhadap IKU sesuai revisi RPJMD yang telah dilakukan sebagai bentuk perbaikan yang berkelanjutan terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja.Masih terdapat indikator yang berupa output tetapi dinilai merupakan output penting sehingga tetap dimasukkan sebagai IKU.

Adapun IKU Dinas PerindustrianProvinsi Sulawesi Selatan yang telah ditetapkan dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel. 2.2.2
Indikator Kinerja Utama (IKU)

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah	Persentase Nilai SAKIP Organisasi Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%
			% ASN Nilai SKP kategori baik	100%	100%	100%	100%	100%
			Rata-rata capaian kinerja perangkat daerah (evaluasi dokumen perencanaan)	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase temuan material	0,07%	0,06%	0,04%	0,02%	0,01%
2	Mewujudkan iklim industri daerah yang kondusif dan mampu menjamin keberlangsungan eksistensi industri daerah	meningkatnya kontribusi sektor industri terhadap nilai pdrb	Persentase pertumbuhan sektor industri pengolahan	5%	3%	5%	10%	12%
			Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	13,5%	10%	11%	12%	13%
3	Meningkatkan nilai tambah komoditas/ produk melalui standarisasi dan hilirisasi industri	meningkatnya penerapan standarisasi industri	Persentase Industri yang telah menerapkan standarisasi	8%	10%	11%	12%	13%

BAB III.
AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam bab ini dilaporkan akuntabilitas kinerja meliputi hasil pengukuran capaian indikator kinerja Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan, hasil analisis pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan, serta akuntabilitas keuangan Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2022.

3.1 METODOLOGI PENGUKURAN KINERJA

Metode pengukuran capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, dengan kriteria sebagai berikut:

- 1. Jika realisasi tinggi menunjukkan kinerja yang baik, % capaian
- 2. dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\frac{Realisasi}{Target} \times 100$$

- 3. Jika realisasi tinggi menunjukkan kinerja yang tidak baik, % capaian kinerja dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\frac{(2 \times Target) - Realisasi}{Target} \times 100$$

Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap indikator dan sasaran, mengacu pada Formulir Tabel T-E.1 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indoensia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai berikut:

Tabel 3.1.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91 % ≤ 100 %	Sangat Tinggi
2	76 % ≤ 90 %	Tinggi
3	66 % ≤ 75 %	Sedang
4	4,51 % ≤ 65 %	Rendah
5	≤ 55 %	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri RI No. 86 Tahun 2017

3.2 HASIL PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2022

Hasil pengukuran tingkat capaian kinerja 3 (tiga) sasaran strategis dengan 8 (delapan) indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 pada Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi dapat diilustrasikan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 3.2.1
Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2022			
				Target	Realisasi	Capaian	Predikat
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah	- Persentase nilai SAKIP organisasi daerah	%	BB	BB	BB	Sangat Tinggi
		- % ASN Nilai SKP kategori baik	%	100 %	100%	100%	Sangat Tinggi
		- Rata-rata capaian kinerja perangkat daerah (Evaluasi dokumen perencanaan).	%	100 %	100%	100%	Sangat Tinggi
		- Temuan material	%	0.02 %	0.05 %	250 %	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya kontribusi sektor industry terhadap nilai PDRB	% pertumbuhan sektor industry pengolahan	%	10%	12,31 %	123,1%	Sangat Tinggi
		% kontribusi sektor industry terhadap PDRB	%	13,00	12.68	97,55%	Sangat Tinggi
3	Meningkatnya penerapan standarisasi industry	% industry yang telah terstandarisasi	%	2 %	2%	100%	Sangat Tinggi
	Meningkatnya pengelolaan, penyediaan dan penyebarluasn informasi industry	% akses dan pemanfaatan informasi industry oleh masyarakat	%	2,5 %	3%	120 %	Sangat Tinggi

Sumber : Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian Prov. Sulawesi SelatanTahun 2022

Dari hasil analisis terhadap 4 sasaran yang mencakup 8 indikator kinerja sasaran, dapat diketahui bahwa kedelapan (8) indicator kinerja berpredikat sangat tinggi dan 3 indikator diantaranya yang melampaui target kinerja yaitu

- ***Indikator persentase temuan material*** dengan target 0,02 % dengan realisasi 0,05% dan capaian kinerja sebesar 250% hal ini dikarenakan Indikator kinerja ini indicator ini telah mencapai target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian tahun 2022 yaitu di bawah target maksimal 0.02%.
- ***indikator kinerja Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan*** dengan capaian kinerja sebesar 123,1 % . ini dikarenakan tingginya minat masyarakat di bidang industry utamanya industry pengolahan
- ***Persentase Akses dan Pemanfaatan informasi industry oleh masyarakat*** mencapai target realisasi kategori sangat baik dengan capaian kinerja sebesar 120% hal ini dikarenakan tingginya minat Industry atau para Pelaku Usaha untuk menstandarisasikan produk usaha mereka dan memanfaatkan informasi industry untuk mendaftarkan usahanya pada SIINAS (Sisten Informasi Industri Nasional) guna mendapatkan berbagai fasilitas dan kemudahan yang bisa didapatkan oleh para pelaku industry yang sebagai salah satu syaratnya adalah terdaftar atau menjadi anggota di SIINAS
- ***Persentase Temuan Material*** dengan target 0.02% dan capaian kinerja sebesar 250 % .Indikator kinerja ini dapat mencapai target melalui kegiatan Audit Program Prioritas danProgram, Consulting Kegiatan Berisiko Tinggi, dan Reviu Laporan Keuangan . Selain itu juga dilakukan koordinasi dan pemutakhiran data secara rutin.

Sedangkan untuk Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dengan Indikator persentase nilai SKP kategori baik, Indikator Persentase SAKIP Organisasi Daerah dan Evaluasi dokumen Perencanaan terealisasi dengan baik itu mencapai target yang diinginkan yakni B.B , untuk indikator Persentase SAKIP Organisasi Daerah hasil evaluasi atas system Akuntabilitas Kinerja Dinas Peindustrian Prov. Sulawesi Selatan mengalami penurunan dari 76,58 % menjadi 70,20% dengan predikat B.B (sangat baik).

3.3 ANALISIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022

Tahun 2022 merupakan tahun ke Lima dari pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan 2018 – 2023. Untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan yang telah dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, perlu dibuat analisis capaian kinerja sebagai tolok ukur kinerja organisasi agar semakin baik dari tahun ke tahun.

Dimana dalam hal ini, tingkat capaian kinerja diukur dengan cara membandingkan antara kinerja yang dihasilkan dengan kinerja yang diharapkan. Berikut

akan disajikan capaian kinerja Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 disandingkan dengan capaian kinerja tahun 2021, 2020 dan 2019.

Tabel 3.3.1
Pengukuran Sasaran Strategis
Dinas Perindustrian Tahun 2022

Sasaran Strategis 1 : Meningkatkan akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangann perangkat daerah											
Indikator Sasaran : - % Nilai SAKIP organisasi Perangkat Daerah - % Nilai SKP kategori baik - Rata-rata capaian kinerja perangkat daerah (evaluasi dokumen perencanaan)											
Target dan Realisasi dari Tahun 2019-2022											
2019			2020			2021			2022		
Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
100	69,60	69,60	100	72,21,	72,21	100	76,58	76,58	100	70,20	70,20
Indikator Sasaran : % ASN Nilai SKP kategori baik											
2019			2020			2021			2022		
Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Indikator Sasaran : Rata-rata capaian kinerja perangkat daerah (evaluasi dokumen perencanaan)											
2019			2020			2021			2022		
Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Indikator Sasaran : Peresentase Temuan material											
2019			2020			2021			2022		
Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
0.07	0.07	100	0.06	0.06	100	0.04	0.07	175	0.02	0.05	250
Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan kontribusi sektor industry terhadap nilai PDRB											
Indikator Sasaran : % Kontribusi sektor terhadap PDRB											
Target dan Realisasi dari Tahun 2019-2022											
2019			2020			2021			2022		
Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
12	13,64	113,67	11	12,74	115,82	11	12,47	113,36	13	12,68	97,55
Sasaran Strategis 3 : - Meningkatkan Penerapan standarisasi industry											
Indikator Sasaran : - % Peningkatan industry yang telah terstandarisasi											
Target dan Realisasi dari Tahun 2019-2022											
2019			2020			2021			2022		
Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
24	54	225	20	60,73	303,65	2	1,67	83,5	2	2	100
Sasaran Strategis 4 : - Meningkatkan pengelolaan, penyediaan dan penyebarluasan informasi industry											
Indikator Sasaran : % Peningkatan akses dan pemanfaatan informasi industry oleh masyarakat											
Target dan Realisasi dari Tahun 2019-2022											
2019			2020			2021			2022		
Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	1	100	1	1,74	1,74	2	1,97	98.5	2,5	3	120

Guna melihat realisasi dan capaian kinerja terkait dengan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi pelaksanaan Renstra tahun kedua Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan Periode Renstra 2018-2023, dapat dilihat pada uraian berikut: Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangann perangkat daerah

Sasaran Strategis 1

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan pengelolaan Keuangan Perangkat daerah

Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya mencapai misi ke-1 sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2018-2023 yaitu **"Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif"**, dengan tujuan **"Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan"**.

Sasaran ini didukung oleh Biro Organisasi dan Tata Laksana, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Kepegawaian Daerah, Inspektorat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian, serta Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah. Untuk mengukur sasaran tersebut terdapat 4(empat) indikator kinerja dengan analisis pencapaian kinerja sebagai berikut:

1. PERSENTASE NILAI SAKIP ORGANISASI PERANKAT DAERAH

Dalam rangka peningkatan capaian indikator ini, telah dilaksanakan kegiatan penilaian kinerja pada unit kerja di lingkungan Dinas Perindustrian, dimana salah satu komponen penilaiannya adalah implementasi SAKIP.

Implementasi SAKIP merupakan indikator penilaian komponen hasil evaluasi akuntabilitas kinerja (SAKIP). Kegiatan ini dilaksanakan sebagai sarana untuk memberikan apresiasi terhadap unit kerja yang telah menerapkan implementasi SAKIP di unit kerja masing-masing. Predikat ini diperoleh dari hasil evaluasi akuntabilitas kinerja atas implementasi SAKIP Tahun 2021-2022 .

Nilai SAKIP dilaksanakan oleh tim evaluator dari Inspektorat. Evaluasi dilakukan untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government). Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Dinas Perindustrian memperoleh nilai 70,20% atau predikat BB.

Hasil penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerja, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi, dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil pada Dinas Perindustrian menunjukkan hasil yang sangat baik.

Perbandingan antara target dan realisasi untuk indikator kinerja "Nilai SAKIP" diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 3.3.2
Perolehan Nilai SAKIP tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian
1	Nilai SAKIP	BB	BB	BB

Berdasarkan pengukuran pencapaian Sasaran Strategis 1 yaitu “**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah**“, dengan realisasi capaian kinerja yaitu 70,20 %, dengan predikat **B.B** sehingga capaian kinerja Sasaran Strategis 1 ini tercapai dengan kualifikasi ***Sangat Baik***.

Untuk memperoleh nilai SAKIP, yaitu melalui laporan penilaian hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, dengan formulasi Perhitungan sebagai berikut:

$$(Ax0,35)+(Bx0,20)+(Cx0,15)+(Dx0,10)+(Ex0,20)$$

Keterangan:
A : Perencanaan Kinerja
B : Pengukuran Kinerja
C : Pelaporan Kinerja
D : Evaluasi Kinerja
E : Capaian Kinerja

Penilaian implementasi SAKIP menunjukkan tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan capaian kinerja, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan berorientasi hasil pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sudah baik.

Berdasarkan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Tahun 2021 terhadap Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan sesuai Surat Nomor: 700.04/3202/A.1/ltprov tanggal 26 Juli 2022, diperoleh hasil evaluasi dengan nilai 70,20 dengan kategori “**B.B**”, yang diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.3.3
Perkembangan Nilai Akuntabilitas Tahun 2018-2022 Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan

No.	Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai			
			2019	2020	2021	2022
1	Perencanaan Kinerja	30	24,36	24,48	25,49	20,10
2	Pengukuran Kinerja	25	14,38	16,88	19,06	20,10
3	Pelaporan Kinerja	15	10,34	10,78	10,78	11,25

4	Evaluasi Internal	10	6,72	6,72	6,95	18,75
	Nilai Hasil Evaluasi	100	69,60	72,21	76,58	70,20
	Kategori		B	B.B	B.B	B.B

Sumber : Dinas Perindustrian Prov. Sulawesi Selatan

Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2022 dengan tahun-tahun sebelumnya
Tabel 3.3.4

No	Indikator Kinerja	2019	2020	2021	2022
1	Nilai SAKIP	B	B.B	B.B	B.B

Sumber:: Dinas Perindustrian Prov Sulsel

Nilai SAKIP Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Nilai sakip selama 2 (dua) tahun terakhir yakni tahun 2020 dan 2021 mengalami peningkatan yaitu kategori **B.B**, dengan nilai 72,21% di tahun 2020 meningkat menjadi 76,58 % dan di tahun 2021 dengan kategoari B.B (sangat baik). Namun di tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 70,20 tapi masih dalam kategori B.B (sangat baik).

1. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis dan standar nasional.
Tabel 3.3.5

No	Indikator Kinerja	Realisasi Target		
		2022	Target Jangka Menengah	Target Nasional
1	Nilai SAKIP	B.B	AA	~

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2022 untuk penilaian kinerja tahun 2022 dinyatakan bahwa penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan mendapat nilai **70,20** dengan kategori BB.

Hal ini menunjukkan bahwa tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban penggunaan anggaran pada Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan telah berorientasi hasil, akuntabilitas kinerja sudah baik, akuntabel dan memiliki sistem manajemen kinerja yang handal walaupun belum begitu optimal.

Dibandingkan tahun sebelumnya ada perbaikan skor dalam perencanaan kinerja, pengukurun kinerja , capaian kinerja, kualitas pelaporan kinerja dan evaluasi internal. Laporan Kinerja Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022.

2. PERSENTASE NILAI SKP KATEGORI BAIK

SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) sebagaimana dimaksud memuat kinerja utama yang harus dicapai seorang PNS setiap tahun. Selain kinerja utama sebagaimana dimaksud, SKP dapat memuat kinerja tambahan,” demikian bunyi Pasal 9 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Penilaian *SKP* dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kerja dengan target dari aspek kuantitas, kualitas, waktu dan/atau biaya.*SKP* adalah Sasaran Kerja Pegawai yang ada dalam salah satu unsur di dalam Penilaian Prestasi Kerja PNS yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011.

SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) adalah rencana dan target kinerja yang dibuat oleh pegawai kemudian harus dicapai dalam kurun waktu tertentu. Target tersebut telah ditentukan, diketahui, serta disetujui oleh pimpinan pegawai yang bersangkutan berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing.Adapun Unsur-unsur SKP

- 1. Tugas Jabatan. Setiap kegiatan tugas jabatan harus mengacu pada kegiatan tugas jabatan yang akan dilakukan sesuai dengan fungsi, wewenang, dan tanggung jawab guru, kepala sekolah, dan guru yang diberi tugas tambahan
- 2. Angka Kredit.
- 3. Target.

Perbandingan antara target dan realisasi untuk indikator kinerja “*Nilai SKP*” Dinas Perindustrian diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 3.3.6
Perolehan Nilai SKP tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Nilai SKP	100	100	100

Sumber:: Dinas Perindustrian Prov Sulsel 2022

Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2022 dengan tahun-tahun sebelumnya
Tabel 3.3.7

No	Indikator Kinerja	2019	2020	2021	2022
1	Nilai SKP	100 %	100%	100%	100%

Sumber:: Dinas Perindustrian Prov Sulsel 2022

3. RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH (EVALUASI DOKUMEN PERENCANAAN)

Capaian Kinerja seringkali diasosiasikan dengan tolak ukur keberhasilan suatu

Organisasi Perangkat daerah. Maka dari itu, pencapaian kinerja dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang dilakukan untuk dapat menghasilkan kinerja yang baik sesuai tujuan yang sudah ditetapkan. Untuk mengetahui dan dapat menilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis ditetapkan target sasaran strategis sebagai kondisi nyata pada tahun 2022 untuk tiga sasaran strategis Dinas Perindustrian.

Beberapa ukuran kinerja yang meliputi; kuantitas kerja, kualitas kerja, pengetahuan tentang pekerjaan, kemampuan mengemukakan pendapat, pengambilan keputusan, perencanaan kerja dan daerah organisasi kerja.

Penilaian kinerja dilakukan antara atasan dengan bawahan dan melihat hasil kerja ASN dalam setahun terakhir. Namun, yang paling penting, penilaian kinerja ASN yang bagus adalah dapat berpikir secara rasional, bukan dengan perasaan. Jika menggunakan perasaan, maka penilaian menjadi tidak efektif.

Berikut beberapa indikator untuk mengukur kinerja ASN adalah: (1) Kualitas Kerja; (2) Kuantitas; (3) Ketepatan Waktu; (4) Efektifitas; (5) Kemandirian.

Tabel 3.3.8
 Rata rata capaian Kinerja Perangkat Daerah
 (Evaluasi Dokumen Perencanaan)
 tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian
1	Rata-rata capaian Kinerja Perankat Daerah (Evaluasi Dokumen Perencanaan)	100	100	100

Pengukuran pencapaian Sasaran Strategis 1 yaitu “**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah**“, dengan target 100% dan terealisasi 100% dengan capaian kinerja yaitu 100%, sehingga capaian kinerja Sasaran Strategis 1 ini tercapai dengan kualifikasi *Sangat tinggi*

Berdasarkan hasil realisasi ini menunjukkan bahwa indikator ini dapat mencapai target yang ditetapkan pada dokumen perjanjian kinerja tahun 2022 Dengan demikian persentase Rata-rata capaian Kinerja Perankat Daerah (Evaluasi Dokumen Perencanaan) tercapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja tahun 2022 .

4. PERSENTASE TEMUAN MATERIAL.

Indikator persentase temuan material dengan target 0,02 % dengan realisasi 0,05% dan capaian kinerja sebesar 250% hal ini dikarenakan Indikator kinerja ini bertujuan untuk memperoleh keyakinan atas keandalan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku

Perbandingan antara target dan realisasi untuk indikator kinerja “Nilai SAKIP” diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 3.3.9

Persentase temuan Material tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Persentase temuan Material	0,02	0,05	250

Jumlah temuan yang dihitung merupakan capaian tahun berjalan, bukan akumulasi dari tahun sebelumnya(non-kumulatif). Perhitungan indikator kinerja ini dipolarisasisecara minimasi yang artinyasemakin rendah realisasi maka semakin baik.

Maka, realisasi batas toleransi temuan adalah 0,05 % dan dengan demikian indicator ini telah mencapai target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian tahun 2022 yaitu di bawah target maksimal 0.02%. Sehingga berdasarkan perhitungan rumusminimasi capaian pada indikator kinerja ini sebesar 250%.

Target jangka menengah indicatorini adalah pada akhir tahun 2023 tercapai batas toleransi temuan material pengawasan eksternalmaksimal 0.01%. secara minimasi yang artinyasemakin rendah realisasi maka semakin baik.

Laporan Kinerja Dinas Perindustrian Tahun 2022, 8 Indikator kinerja ini dapat mencapai target melalui kegiatan Audit Program Prioritas danProgram, Consulting Kegiatan Berisiko Tinggi, dan Reviu Laporan Keuangan . Selain itu juga dilakukan koordinasi dan pemutakhiran data secara rutin dengan satuan kerja.

Melalui kegiatan-kegiatan tersebut, capaian dari target yang ditetapkan secara umummenghasilkan outcome (penerapan output) yang baik. Ini berarti, kualitas Laporan KeuanganDinas Perindustrian tergolong baik dan akuntabel.

B. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian PANRB, realisasi telah mencapai target yang ditetapkan, namun masih terdapat kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki.

Dalam upaya pencapaian sasaran Meningkatnya tata kelola oragnisasi terdapat beberapa faktor yang mendorong terealisasinya target yang ditetapkan. Akan tetapi, pada sisi lain juga terdapat beberapa faktor yang menghambat tercapainya sasaran ini. Adapun faktor pendorong, faktor penghambat dan strategi atau upaya pemecahan masalah dapat dilihat sebagai berikut;



Faktor Pendorong

Adapun kegiatan dan langkah-langkah yang telah dilakukan dalam menunjang percepatan Pencapaian Target Akuntabilitas Kinerja Yakni :

1. Komitmen Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan dalam menindaklanjuti beberapa rekomendasi atas hasil evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
2. Adanya pembinaan dan arahan dari tim terkait Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yaitu Biro Organisasi dan Inspektorat.
3. Ketersediaan dokumen perencanaan dengan tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang terukur
4. Mengikuti Pelatihan diantaranya
 - a. In House training Implementasi SAKIP
 - b. Workshop kualitas Implementasi SAKIP
 - c. Asistensi Perjanjian Kinerja (PK) Eselon III dan IV Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan oleh TIM Asistensi Provinsi Sulawesi Selatan
 - d. Tindak Lanjut Hasil Workshop Implementasi SAKIP
 - e. Pendampingan Implementasi SAKIP
 - f. Pemaparan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP dan RB di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi



Faktor Penghambat

1. Rekomendasi perbaikan yang telah disampaikan tahun sebelumnya, sudah ditindaklanjuti secara menyeluruh namun masih memerlukan perbaikan manajemen kinerja.
2. Kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah dijabarkan (cascading) ke dalam kinerja setiap Perangkat Daerah, namun belum semua Perangkat Daerah menjabarkan kinerja sampai pada kinerja level eselon IV dan kualitas penjabaran kinerja tersebut masih perlu disempurnakan.
3. Sebagian besar Perangkat Daerah belum menyajikan Laporan Kinerja dengan baik sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014.
4. Telah dilakukan evaluasi atas implementasi SAKIP Perangkat Daerah, namun simpulan hasil evaluasi belum menggambarkan kondisi penerapan SAKIP dan belum memberikan umpan balik kepada Perangkat Daerah.

5. Evaluasi program dan kegiatan yang dilakukan Perangkat Daerah masih sebatas pada capaian fisik (output) dan penyerapan anggaran, belum pada capaian hasil (outcome) program dan keselarasan program dan kegiatan dalam mendukung capaian organisasi.



Saran dan upaya yang telah dilakukan pada tahun 2022

Dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan manajemen kinerja dan mewujudkan budaya kinerja, disarankan untuk menindaklanjuti hal-hal sebagai berikut:

1. Diharapkan seluruh Perangkat Daerah segera menindaklanjuti saran perbaikan berdasarkan hasil evaluasi yang telah disampaikan.
2. Meningkatkan kualitas *Cascading* kinerja terhadap seluruh Perangkat Daerah dengan menjabarkan kinerja sampai dengan kinerja level eselon IV.
3. Menyusun Perjanjian Kinerja mulai dari Esselon II, Esselon III, Esselon IV, Fungsional tertentu dan Staf termasuk distribusi target kinerja secara proporsional melalui proses cascading
4. Menyusun indikator kinerja individu dari Esselon II, Esselon III, Esselon IV, Fungsional tertentu dan Staf
5. Meningkatkan kualitas Laporan Kinerja di tingkat Provinsi maupun Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014.
6. Memanfaatkan Informasi Kinerja dalam Laporan Kinerja oleh Pimpinan secara berjenjang sehingga dapat digunakan sebagai umpan balik perbaikan perencanaan, pelaksanaan program/kegiatan dan peningkatan kinerja.
7. Meningkatkan kualitas evaluasi SAKIP Perangkat Daerah sehingga dapat mendorong perbaikan dalam implementasi SAKIP oleh Perangkat Daerah secara signifikan.
8. Melakukan perbaikan pada langkah-langkah kerja yang akan ditempuh untuk mencapai sasaran kinerja dinas pada Rencana Aksi agar lebih spesifik

c. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran yang ditetapkan pada APBD TA 2022 untuk mendukung pencapaian sasaran ini terdiri dari 4 Program sebesar Rp **25.138.094.738,-** dengan realisasi sebesar Rp **24.013.715.855,-** atau **88.19%**. Dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 100%, berarti tingkat efisiensi yang mendukung sasaran ini adalah sebesar 9,32%.

Tabel 3.3.10

Realisasi Anggaran Dinas Perindustrian Prov. Sulawesi Selatan Tahun 2022

NO	URAIAN	ANGGARAN TA 2021	REALISASI	%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	13.231.786.101.	12.509.908.436	96.24

Sumber: Laporan Keuangan TA 2022 unaudited

d. Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran diatas adalah:

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi** dengan indicator capaian program : Realisasi kegiatan perangkat daerah, dengan target 100% dan realisasi sebesar 100 %; Persentase ASN Perangkat daerah berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik, target 100 % terealisasi 100 %, Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah, target 100% terealisasi 100%; Persentase Penurunan Temuan berdasarkan LHP dengan target 0,05% dan realisasi 0,05%

Dialokasikan anggaran sebesar Rp.13.231.786.101,- terealisasi sebesar Rp.12.509.908.436,- atau 94,54%

- a. **Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** dialokasikan anggaran sebesar Rp.178.777.600,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 148.376.113,- atau sebesar 82.99%. Target dan realisasi kinerja kegiatan ini adalah % Penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu sebesar 100 %. Beberapa sub kegiatan yakni:

- a. **Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah** dengan indicator capaian sub kegiatan adalah Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun dengan realisasi sebanyak 7 dokumen ,Alokasi anggaran sebesar Rp. 42.660.000,- dan dapat terealisasi sebesar Rp. 38.678.000,- atau sebesar 90,66%.
- b. **Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD** dengan indicator capaian sub kegiatan adalah Persentase penyusunan dokumen rka skpd tepat waktu dengan target 100 % dan realisasi 100% dialokasikan anggaran sebesar Rp. 10.000.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 10.000.000,- atau sebesar 100 %.
- c. **Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen RKA SKPD** dengan indicator capaian sub kegiatan adalah persentase penyusunan dokumen Perubahan RKA skpd tepat waktu dengan target 100% dan terealisasi 100%,dialokasikan anggaran sebesar Rp. 12.000.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 12.000.000,- atau sebesar 100 %.

- d. **Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD** dengan indicator capaian sub kegiatan adalah persentase penyusunan dokumen DPA skpd tepat waktu dengan target 100% dan teralisasi 100%, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 9.957.500,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 9.957.500,- atau sebesar 100 %.
 - e. **Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD** dengan indicator capaian sub kegiatan adalah persentase penyusunan dokumen Perubahan DPA SKPD tepat waktu dengan target 100% dan teralisasi 100%, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 7.558.500,- dan dapat terealisasi sebesar Rp7.558.500,- atau sebesar 100 %.
 - f. **Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD** dengan indicator capaian sub kegiatan adalah jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi skpd, terealisasi sebanyak 12 laporan dengan target 100% dan teralisasi 100%, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 9.960.000,- dan terealisasi sebesar Rp 9.930.000,- atau sebesar 99.69 %
 - g. **Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** dengan indicator capaian sub kegiatan adalah jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah dengan target 4 dokumen dan terealisasi sebanyak 12 laporan dengan target 100% dan teralisasi 100% dialokasikan anggaran sebesar Rp. 86.611.600,- dan dapat terealisasi sebesar Rp 60.224.113,- atau sebesar 69,53 %.
-
- b. **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** dengan indicator capaian kegiatan adalah Persentase Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu dengan target 100 % dan terealisasi 100% dialokasikan anggaran sebesar Rp. 8.099.382.278,- dan dapat terealisasi sebesar Rp. 7.933.057.727,- atau sebesar 97,94 %. Yang terdiri dari beberapa sub kegiatan yakni:
 - a. **Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN** dengan indicator capaian sub kegiatan adalah Jumlah Pegawai yang dibayarkan gaji dan tunjangan dengan target 77 orang dan realisasi 77 oran, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 7.868.687.478,- dan dapat terealisasi sebesar Rp 7.735.256.217,- atau sebesar 98.33 %.
 - b. **Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD** dengan indicator capaian sub kegiatan adalah jumlah sub kegiatan pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan skpd dengan target 31 sub kegiatan dan realisasi 31 sub kegiatan,

- dialokasikan anggaran sebesar Rp. 131.946.800,- dan dapat terealisasi sebesar Rp 116.998.470,- atau sebesar 88,67 %.
- c. **Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD** dengan indicator capaian sub kegiatan adalah kegiatan ini adalah Jumlah laporan keuangan skpd dengan target 19 laporan dan terealisasi 19 laporan, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 79.498.000,- dan dapat terealisasi sebesar Rp 65.328.040,- atau sebesar 82,18 %.
 - d. **Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan** dengan indicator capaian sub kegiatan adalah kinerja sub kegiatan ini adalah jumlah laporan hasil pemeriksaan dengan target 2 laporan dan realisasi 2 laporan dialokasikan anggaran sebesar Rp. 21.330.000,- dan dapat terealisasi sebesar Rp 15.475.000,- atau sebesar 72,55 %.
- c. **Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** dialokasikan anggaran sebesar Rp. 0,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 0,- atau sebesar 0 % . Target kinerja kegiatan ini adalah Rata-rata nilai perilaku pegawai Perangkat daerah berdasarkan penilaian Kinerja ASN , Kegiatan ini tidak terealisasi karena anggarannya di recovusing .
- 1 Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang—Undangan Industri ditiadakan karena alokasi anggaran dialihkan ke penanganan covid 19.
- d. **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah** dengan indicator capaian kegiatan adalah Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Kantor dengan target 100% dan realisasi 100 % dialokasikan anggaran sebesar Rp. 507.925.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 340.320.000,- atau sebesar 67,00%. Yang terdiri dari beberapa sub kegiatan yakni:
- a. **Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor** dengan indicator capaian Sub kegiatan adalah jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan dengan target 520 unit dan realisasi 520 unit dialokasikan anggaran sebesar Rp. 18.320.000 dan dapat direalisasi sebesar Rp. 18.320.000,- atau sebesar 100 %.
 - b. **Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD** dengan indicator capaian Sub kegiatan adalah Jumlah perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan konsultasi skpd dengan target 165 kali dan terealisasi 165 kali dialokasikan anggaran sebesar Rp. 489.605.000 dan dapat direalisasi sebesar Rp. 321.966.651,- atau sebesar 65,76 %.
- e. **Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** dengan indicator capaian Sub kegiatan adalah persentase Pemenuhan

Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan target 100% dan realisasi 100 %, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.733.316.250,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 1.732.816.250,- atau sebesar 99,97 %. Yang terdiri dari beberapa sub kegiatan yakni:

- **Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya** .Kegiatan ini ditiadakan dan tidak dianggarkan baik pada DPA pokok maupun DPA Perubahan.
 - **Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya** dengan indicator capaian Sub kegiatan : jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor/ bangunan lainnya dengan target 2 item dan realisasi 2 item dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.733.316.250 dan dapat direalisasi sebesar Rp. 1.732.816.250,- atau sebesar 99,97%.
- f. **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** dengan indicator capaian kegiatan: persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan target 100% dan realisasi 100%, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 2.186.474.973,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 1.922.416.120,- atau sebesar 87,92%. Yang terdiri dari beberapa sub kegiatan yakni:
- **Penyediaan Jasa Surat Menyurat dialokasikan anggaran** dengan indicator capaian sub kegiatan :adalah jumlah surat yang keluar dan masuk, dengan target 700 surat dan terealisasi 700 surat, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 120.047.300 dan dapat terealisasi sebesar Rp. 119.835.800,- atau sebesar 99,82%.
 - **Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik** dengan indicator capaian sub kegiatan adalah jumlah dokumen pemenuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, dengan target 24 dokumen dan terealisasi 24 dokumen, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 417.192.692 dan dapat terealisasi sebesar Rp. 344.551.698,- atau sebesar 82,58%.
 - **Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor** dengan indicator capaian sub kegiatan adalah jumlah orang jasa pelayanan umum kantor yang dibayarkan gajinya, dengan target 49 orang dan terealisasi 49 orang, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.649.235.044 dan dapat direalisasi sebesar Rp. 1.458.028.622,- atau sebesar 88,40%.
- g. **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** dengan indicator capaian kegiatan adalah Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik dengan target 100% dan terealisasi 100%, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 525.910.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp.

432.955.575,- atau sebesar 82,32%.Yang terdiri dari beberapa sub kegiatan yakni:

- a. **Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan** dengan indicator capaian sub kegiatan adalah jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara, dengan target 4 unit dan terealisasi 4 unit, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 335.770.000 dan dapat direalisasi sebesar Rp. 269.583.250,- atau sebesar 80,28%.
- b. **Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan** dengan indicator capaian sub kegiatan adalah Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya, dengan target 14 unit dan terealisasi 14 unit, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 35.000.000 dan dapat direalisasi sebesar Rp. 10.437.725,- atau sebesar 29,82%.
- c. **Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya** dengan indicator capaian sub kegiatan adalah Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara dengan target 6 item dan terealisasi 6 item, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 155.140.000 dan dapat direalisasi sebesar Rp. 152.934.000,- atau sebesar 98,57%.



3.5. Meningkatnya kontribusi sektor industri terhadap nilai PDRB

Guna mewujudkan misi 3 RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan yaitu **Mewujudkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang produktif** Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam membina dan mengembangkan sektor perindustrian di provinsi Sulawesi Selatan menetapkan sasaran RPJMD yaitu **Meningkatnya Hilirisasi ekonomi sector unggulan daerah** dengan tujuan **Meningkatkan laju pertumbuhan dan kontribusi sektor industri daerah**. Dalam mendorong perekonomian daerah tersebut diharapkan pertumbuhan ekonomi masyarakat khususnya yang bergerak di sektor industri dapat meningkat, sehingga memicu pertumbuhan ekonomi daerah. Pada sasaran ini terdapat dua indicator kinerja

yakni

1. Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan

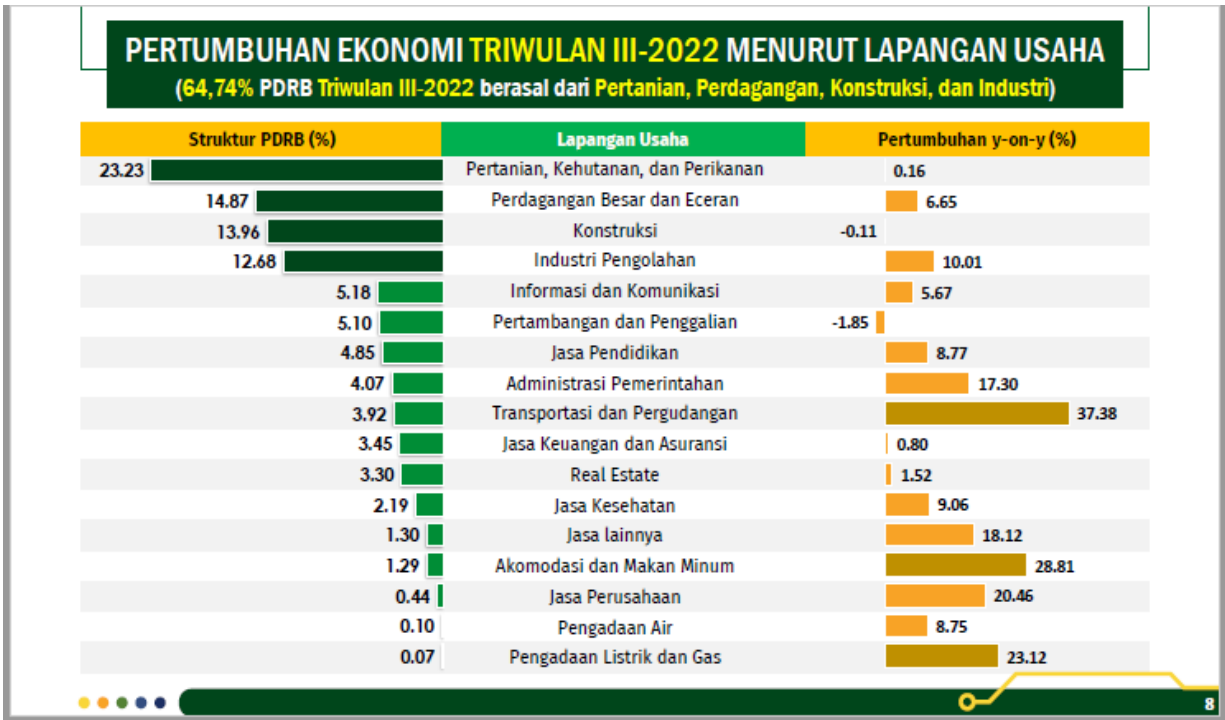
Pembangunan industri pengolahan merupakan unsur penting untuk mempercepat tercapainya sasaran pembangunan dan juga dalam rangka menciptakan struktur ekonomi yang seimbang. Dalam pembangunan bidang industri pengolahan juga diarahkan agar dalam sektor industri pengolahan itu sendiri dapat memberikan dampak positif terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Pembangunan industri ini sangat penting dalam menopang peningkatan pertumbuhan ekonomi, memperbaiki susunan perekonomian kearah yang mejadi lebih baik lagi, dan juga merupakan upaya dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata dengan memanfaatkan dana, sumber daya alam, atau hasil budidaya

Perkembangan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang dimiliki oleh Provinsi Sulawesi Selatan salah satunya yang berperan dalam pertumbuhan ekonomitersebut yaitu sektor industri pengolahan. Dimana sektor tersebut adalah sektorunggul, dan perkembangannya dari tahun ke tahun selalumengalami peningkatan dapat dilihat dari data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB

Grafik 3.5.1

Pertumbuhan Ekonomi Triwulan Ke III tahun 2022



Dapat dijelaskan dari grafik diatas bahwa sektor industri pengolahan berada pada posisi ke empat (4) setelah konstruksi dan perdagangan besar dan eceran dengan persentase 12, 68 % sedangkan pertanian , kehutanan dan perikanan menempati urutan pertama dengan presentase 23,23 %.

sebagai penunjang terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini dapat dilihat dari Produk Domestik RegionalBruto (PDRB) berperan besar terhadap kenaikan PDRB. Dengandemikian dapat dilihat bahwa sektor industri pengolahan merupakan salah satu sektorunggulan atau prima, dikatakan demikian karena sektor prima adalah sektor yangpaling dominan kontribusinya terhadap perekonomian daerah.

Tabel 3.5.1
Persentase Realisasi Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan
tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian
1	Persentase Realisasi Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan	10 %	12,31 %	246 %

1. Persentase Sektor Industri Terhadap PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan.

Pertumbuhan ekonomi dapat dijadikan sebagai patokan yang melihat kemajuan suatu daerah dan bagaimana hasil dari pembangunan yang dilakukan selama periode tersebut.

Produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita merupakan perbandingan antara jumlah PDRB dengan jumlah penduduk di suatu daerah. ketika laju pertumbuhan ekonomi pesat di suatu daerah tetapi tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan maka akan berdampak pada pengangguran. Sehingga bertambahnya penduduk mempersulit kinerja perencanaan pembangunan ekonomi.

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi

Pencapaian tujuan pertama ini dapat dilihat dari realisasi indikatornya sebagaimana tergambar pada table perbandingan antara target dan realisasi berikut ini:

Tabel 3.5.2
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis Satu (dalam %)

No.	Indikator Kinerja	Cara Penghitungan	2022			
			Target	Realisasi	Capaian	Predikat
1	Persentase kontribusi sektor industri terhadap PDRB Sulawesi Selatan	Nilai PDRB Sub Sektor industri tahun n Total Nilai PDRB tahun n x 100	13,00%	12,68%	97,55 %	Sangat Baik

Pengukuran pencapaian sasaran ini menggunakan data BPS. Untuk mengukur sasaran tersebut digunakan 1 (satu) indikator sasaran dengan angka capaian kinerja pada tahun 2022 sebesar 97.55 % dengan kategori predikat sangat baik (B.B). Secara lengkap gambaran pengukuran capaian kinerja sasaran Berdasarkan pengukuran pencapaian Sasaran Strategis 2 yaitu “**Meningkatnya Kontribusi sector Industri terhadap nilai PDRB** “, dengan realisasi capaian kinerja yaitu **97,55 %**, sehingga capaian kinerja Sasaran Strategis 2 ini tercapai dengan kualifikasi *Sangat Baik*.

b. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2021 dengan tahun-tahun sebelumnya

Tabel 3.5.3

Perbandingan Nilai PDRB Tahun 2019 – 2021

NO	URAIAN	Kontribusi PDRB			
		2019	2020	2021	2022
1	% Kontribusi sector Industri terhadap PDRB	13,64 %	12,74%	12,47%	12,68%

Sumber:: Dinas Perindustrian Prov Sulsel

Target Nilai PDRB pada tahun 2019 yakni 12 % dengan realisasi 13,64% atau 113,67% (capaian) Dan ditahun 2020target Nilai PDRB yakni 11% dengan realisasi12,74% capaiannya meningkat menjadi 115,82 % dan di tahun 2021 target menurun menjadi 11,00% namun realisasinya tetap melebihi target yakni 12,47 % atau 113,36% dan di tahun target di tahun 2022 yaitu 13 dengan realisasi 12,68 dan capaian 97,55 dengan predikat (sangat Baik)

- c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis dan standar nasional.

Tabel 3.5.4
Perbandingan Realisasi Nilai PDRB tahun 2022,
Jangka Menengah dan Nasional

No	Indikator Kinerja	Realisasi Target		
		202	Target Jangka Menengah	Target Nasional
1	Nilai PDRB	13,00%	13,75%	~

Pengukuran pencapaian sasaran ini menggunakan data BPS. Untuk mengukur sasaran tersebut digunakan 1 (satu) indikator sasaran dengan angka capaian kinerja pada tahun 2022 sebesar 97,55 % dengan kategori predikat sangat baik. Secara lengkap gambaran pengukuran capaian kinerja sasaran *Meningkatnya kontribusi sektor industri dalam perekonomian daerah* dilihat berdasarkan realisasi dan capaian indikator kinerja berikutini:

Tabel 3.5.4
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis Satu (dalam %)

No.	Indikator Kinerja	Cara Penghitungan	2021			
			Target	Realisasi	Capaian	Predikat
1	Persentase kontribusi sektor industri terhadap PDRB Sulawesi Selatan	Nilai PDRB Sub Sektor industri tahun n Total Nilai PDRB tahun n x 100	13,00%	12,68%	97,55%	Sangat Baik

Kontribusi sektor industri terhadap PDRB tahun 2022 berdasarkan data BPS Provinsi Sulawesi Selatan hingga dengan triwulan ke III tahun 2022 adalah sebesar 12,68% atau sebesar Rp. 20,18 triliun dari total PDRB Sulawesi Selatan Atas Dasar Harga Berlaku hingga triwulan ketiga yang tercatat sebesar Rp. 159,1 triliun sehingga hamper mencapai target yang ditetapkan sebesar 13,00%, sehingga persentase capaiannya sebesar 97,55%. Hasil indikator kinerja persentase kontribusi sektor industri terhadap PDRB Sulawesi Selatan diukur melalui penghitungan besaran kontribusi sektor industri terhadap PDRB Sulawesi Selatan dengan rumus penghitungan sebagai berikut

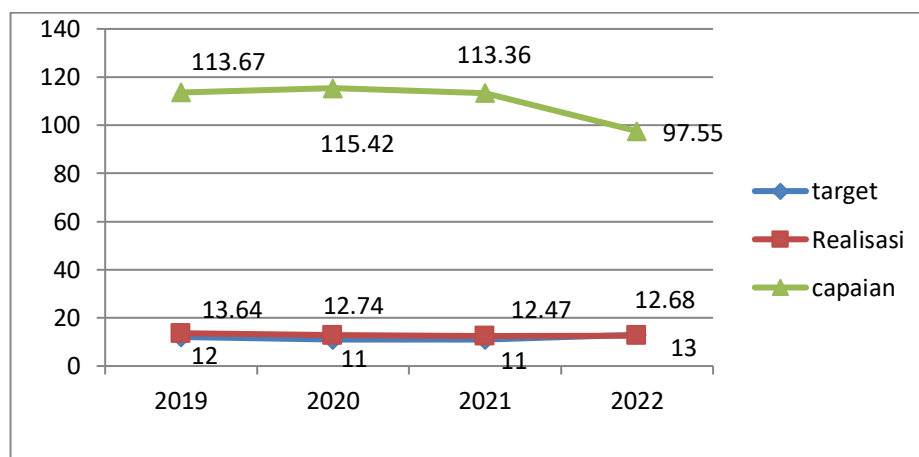
Kontribusi sub sector industri terhadap PDRB(%) = $\frac{\text{Rp 20,18triliun}}{\text{Rp.159,11triliun}}$ X 100 =12,68 %

Catatan :

1. Nilai PDRB Sub Sektor Industri Pengolahan Tahun 2022 sebesar Rp 20,18 triliun
2. Nilai PDRB Sulawesi Selatan tahun 2022 sebesar 159,11 triliun

Dilihat dari sisi kontribusi terhadap pembentukan PDRB Sulawesi Selatan kinerja ini jika dibandingkan dengan kinerja 3 tahun terakhir, mengalami peningkatan sehingga kinerja saat ini diharapkan mampu untuk mencapai target jangka menengah Renstra (pada tahun 2023 dengan target sebesar 13,75% .namun realisasi di tahun 2020, 2021 dan 2022 sangat bagus karena dapat melebihi dari target yang telah di tentukan begitupun capaiannya , untuk tahun 2020 mengalami peningkatan dimana PDRB di targetkan 11 % dapat terealisasi sebesar 12,74 % dengan capaian 115, 42% dan di tahun 2021 ditargetkan 11% dapat teralisasi sebesar 12.47% dengan capaian sebesar 113.36% .dan untuk tahun 2022 PDRB yang kita dapat hampir mencapai target ini dimana target yang diharapkan adalah 13,00 % dengan realisasi sebesar 12,68 dan capaian sebesar 97,55 % Dilihat dari sisi nilai produksi mendapat predikat sangat baik untuk sektor industri. Perbandingan target kinerja tersebut sebagaimana terlihat pada grafikberikut:

Grafik 3.5.2
Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB Sulawesi selatan Tahun 2019 s.d 2022



Jika dibandingkan dengan sektor lain dalam struktur perekonomian Sulawesi Selatan ,sektor industri pengolahan (12,68 %) berada dalam urutan ke-4 setelah sektor konstruksi (13,96%),sektor perdagangan besar dan eceran, Reparasi mobil dan sepeda motor (14,87%) dan tertinggisektor pertanian, kehutanan dan perikanan (23,23%). Sektor Industri Pengolahan berada dalam urutan ke-4 yang memberikan kontribusi terhadap struktur PDRB Sulawesi Selatan

Sementara itu dilihat dari sisi laju pertumbuhan, sektor industri pengolahan mengalami pertumbuhan yang sangat baik yaitu 10,01 % jika dibandingkan tahun 2022 terhadap total pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan . .

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan.

Untuk meningkatkan kontribusi sektor industri terhadap PDRB di Sulawesi Selatan perlu diketahui permasalahan yang melatarbelakangi penyebab terus menurunnya kontribusi sektor industri terhadap PDRB, sehingga bisa disusun program dan kegiatan yang dapat mengatasinya. Beberapa hal yang membuat realisasi sedikit lebih rendah dari persentase yang telah di targetkan **disebabkan beberapa hal,yaitu:**

1. Rendahnya Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).
2. Masih kurangnya hilirisasi dan diversifikasi produk industri yang mengakibatkan lambatnya pertumbuhan produksi sektor industri dibandingkan sektor usahalainnya.
3. Sebagian besar skala usaha industri di Sulawesi Selatan adalah skala industri kecil, sebagian besar hasil usaha masih digunakan untuk membiayai kebutuhan sehari-hari dan relatif kecil digunakan untuk pemupukan modalusaha

Dalam upaya pencapaian sasaran ***Meningkatnya target kontribusi sektor industri dalam perekonomian daerah***, terdapat beberapa faktor yang mendorong terealisasinya target yang ditetapkan. Akan tetapi, pada sisi lain juga terdapat beberapa faktor yang menghambat tercapainya sasaran ini. Adapun faktor pendorong, faktor penghambat dan strategi atau upaya pemecahan masalah dapat dilihat sebagai



Faktor Pendorong

1. Tersedianya 12.808 unit usaha Industri Kecil Menengah dengan 49.046 orang tenaga kerja yang merupakan ujung tombak perekonomian di Sulawesi selatan.;
2. Tersedianya 16 orang Fungsional/Penyuluh Perindustrian yang siap untuk membantu meningkatkan kompetensi pelaku usaha industri dalam mengembangkan usahanya;
3. Adanya komitmen yang tinggi dari pemerintah untuk menciptakan iklim investasi, iklim usaha dan kemudahan bagi investor di Sulawesi Selatan;
4. Dicanangkannya Sulawesi selatan sebagai destinasi wisata memberi peluang kepada pelaku usaha industri untuk meningkatkankinerjanya.



Faktor Penghambat

1. Masih kurangnya hilirisasi dan diversifikasi produk industri yang mengakibatkan lambatnya pertumbuhan produksi sektor industri dibandingkan sektor usaha lainnya
2. Masih kurangnya kesadaran pelaku usaha industri dalam meningkatkan kualitas produk serta penggunaan teknologi tepat guna.
3. Belum adanya inovasi terhadap pemberian layanan kepada IKM
4. Kurangnya kawasan dan sentra industri di Sulawesi Selatan yang mempengaruhi perkembangan industry
5. Jaringan kemitraan usaha antara IKM dengan industri besar belum optimal



Strategi Pemecahan masalah

1. Menetapkan program dan kegiatan yang mendukung dilakukannya hilirisasi dan diversifikasi terhadap komoditas potensial Sulawesi Selatan sehingga memberikan nilai tambah terhadap produk industri yang dihasilkan.
2. Pengembangan pola pikir pelaku usaha industri dengan implementasi manajemen usaha modern melalui bimbingan teknis dan sosialisasi.
3. Perlu dibuat inovasi terhadap layanan IKM sehingga memudahkan IKM dan aparaturnya dalam melakukan perbaikan terutama dalam menyikapi era industri 4.0.
4. Meningkatkan sinergitas program antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kab/Kota dalam mengembangkan kawasan dan sentra industri di Sulawesi Selatan.
5. Mengaktifkan kembali pola kerja cluster industry



Upaya-Upaya yang telah dilakukan selama masa tahun 2022

Meningkatkan penguatan terhadap kawasan dan sentra industri dalam rangka pemerataan pengembangan industri di kab/kota serta meningkatkan produktivitas usaha industri melalui hilirisasi produk industri dan bantuan bahan baku (pemulihan ekonomi sektor industri), peningkatan promosi dan perluasan pasar produk industri serta meningkatkan kemampuan sentra industri. Dengan kegiatan utama membina dan mengembangkan cabang industri dalam bentuk

sentra yang memberikan sumbangan yang cukup besar dalam PDRB Sulawesi Selatan.

Hal ini dilakukan melalui kegiatan-kegiatan antara lain:

1. Pendampingan Sentra Industri Kerajinan Kulit di Kota Makassar
2. Pendampingan Sentra industri Kerajinan Bambu di Kab.Barru
3. Pendampingan Sentra industri Kreatif Fashion Bara Batu diKab .Pangkep dan Bantuan Peralatan
4. Pendampingan Sentra Industri Kreatif Fashion Pao Pao di Kab. Barru dan Bantuan Peralatan
5. Bantuan Peralatan untuk Catering PKK diKota Makassar

Sedangkan untuk realisasi fisik yang dapat dicapai dalam program Pengendalian Izin Usaha Industri dengan jumlah target di tahun 2022 sebanyak 200 Sertifikat dengan realisasi sebanyak 585 sertifikat Halal yang mendapatkan fasilitasi sertifikat Halal yang terdiri dari 529 ikm kategori Self Declare, 36 ikm Reguler dari Tenant Lego- Lego dan 20 IKM reguler binaan dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan jadi total keseluruhan ada 635 ikm yang terstandarisasi ini melebihi dari target kinerja di tahun 2022. dan 50 IKM Pengajuan pendaftaran merk yang didaftarkan di kementerian Hukum dan Ham Propinsi Sulawesi Selatan Hal ini berarti Indikator pada Sasaran di seksi fasilitasi industri, industri hijau dan standarisasi industri sudah memenuhi target pencapaian

Dinas Perindustrian pada tahun 2022 juga telah merevitalisasi kembali 2 UPTD yang ada di daerah yakni Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Wajo.

- Pada bulan Maret 2022 Bapak Gubernur Sulawesi Selatan telah meresmikan UPT Unit Pengelolaan Sutera yang ada di Kecamatan Dinridonri Kabupaten Soppeng sebagai salah satu program prioritas Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam mengembalikan kejayaan sutera di Sulawesi Selatan. UPT Unit Pengelolaan Sutera yang ada di Kecamatan Dinridonri Kabupaten Soppeng ini dilengkapi dengan peralatan Mesin Pemintal Sutera semi otomatis dengan 250 mata pintal dan dengan kapasitas 6.582,86 kg pertahun



- Pada tanggal 12 November 2022 Bapak Gubernur Sulawesi Selatan kembali meresmikan UPT Unit Pengelolaan Sutera yang ada di Sempange Kabupaten Wajoyang juga menjadi salah satu program prioritas Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam mengembalikan kejayaan sutera di Sulawesi Selatan. UPT Unit Pengelolaan Sutera yang ada di Sempange Kabupaten Wajo dilengkapi dengan peralatan Mesin Pemintal suteraotomatis dengan 500 mata pintal dengan kapasitas 32,914,29 kg pertahun.



e. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran yang ditetapkan pada APBD TA 2022 untuk mendukung pencapaian sasaran ini terdiri dari 1 (satu) Program sebesar Rp 11.006.412.637.- dengan realisasi sebesar Rp10.711.860.757.- atau 96,18 %.Dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 100%, berarti tingkat efisiensi yang mendukung sasaran ini adalah sebesar 3,82%.

Tabel 3.3.12

Realisasi Anggaran Dinas Perindustrian Prov. Sulawesi SelatanTahun 2022

NO	URAIAN	ANGGARAN TA 2021	REALISASI	%
1	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	11.006.412.637	10.711.860.757	96,18 %.
	Jumlah	11.006.412.637	10.711.860.757	97,32%.

Sumber: Laporan Keuangan TA 2022 unaudited

- e. Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja.
 - Program Perencanaan dan Pembangunan Industri dengan indicator capaian program adalah Persentase pertambahan jumlah industri dengan target 6 %

dan realisasi 6,0 % dengan anggaran sebesar 11.006.412.637,0.- terealisasi sebesar 10.711.660.757.- dengan capaian sebesar 97,32 %.yang terdiri dari :

a. **Kegiatan Penyusunan Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi Kegiatan Penyusunan Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi** dengan indicator capaian kegiatan adalah Persentase peningkatan industri yang dibina dan dikembangkan dengan target 4 % dan realisasi 4 % dengan anggaran sebesar 11.006.412.637.- terealisasi sebesar 10.711.660.757.- dengan capaian sebesar 97,32 %. Yang terdiri dari :

1. **Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan Penyebaran dan Perwilayahan Industri** dengan indikator capaian kegiatan adalah:

- Jumlah dokumen pengembangan kawasan industri yang dilaksanakan dengan target 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen ,
- Jumlah dokumen kebijakan industri hijau dan SNI industri yang dilaksanakan dengan target 2 dokumen dan terealisasi sebanyak 3 dokumen

dialokasikan anggaran sebesar Rp. 5.150.000.000- dan dapat terealisasi sebesar Rp. 5.120.000.000- atau sebesar 99,06 %.

2. **Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri** dengan indikator capaian sub kegiatan adalah:

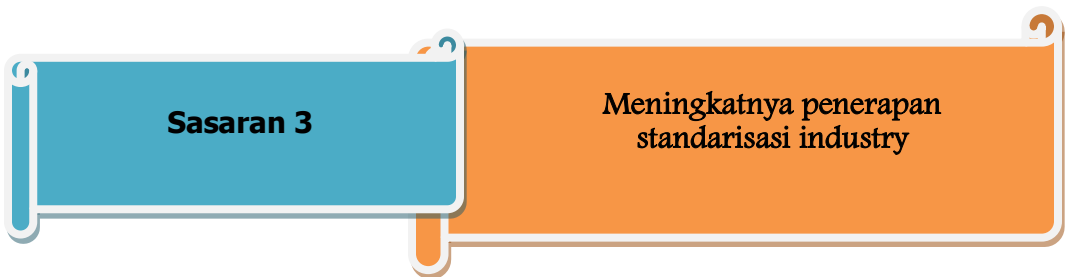
- jumlah sumber daya manusia industri yang dibina dengan target 350 orang dan terealisasi sebesar 350 Orang.
- Jumlah potensi sumber daya unggulan daerah yang dikembangkan menjadi potensi sumber daya industri dengan target 1 Potensi dan terealisasi sebesar 1 potensi,
- Jumlah inovasi teknologi dan peralatan industri yang dikembangkan dengan target 12 Unit terealisasi sebesar 12 unit.

dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.739.376.288,- dan dapat terealisasi sebesar Rp. 1.654.534.438,- atau sebesar 95,12%.

3. **Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri** dengan indikator capaian sub kegiatan adalah Persentase Jumlah fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan standarisasi industri dengan target 10 Sentra dan terealisasi sebesar 10 sentra dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.601.307.300,- dan dapat terealisasi sebesar Rp. 1.505.727.552,- atau sebesar 94,03 %.

4. Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat dengan indikator capaian sub kegiatan adalah:

- Jumlah pelayanan dan pendampingan masyarakat industri terkait makanan, minuman dan kemasan dengan target 30 Pelayanan dan terealisasi sebesar 72 pelayanan.
- Jumlah pelayanan administrasi UPT Logam, tekstil dan alat mesin pertanian dengan target 100 Pelayanan dan terealisasi sebanyak 100 pelayanan.
- Jumlah pelayanan dan pendampingan masyarakat industri terkait tekstil dengan target 20 Pelayanan dan terealisasi sebanyak 20 pelayanan.
- Jumlah pelayanan dan pendampingan masyarakat industri terkait logam dengan target 50 Pelayanan dan terealisasi sebanyak 50 pelayanan.



Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam membina dan mengembangkan sektor perindustrian di provinsi Sulawesi Selatan menetapkan sasaran RPJMD yaitu **Meningkatkan produktivitas dan daya saing produk sumberdaya alam yang berkelanjutan**” dengan tujuan meningkatkan produktivitas dan daya saing produk perekonomian rakyat serta melestarikan lingkungan hidup dan sumber daya alam khususnya yang bergerak di sektor industri dapat meningkat, sehingga memicu pertumbuhan ekonomi daerah.

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi

Perbandingan antara target dan realisasi untuk indikator Persentase Peningkatan Industri yang Telah terstandarisasi diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 3.5.5
Perbandingan Antara Target dan Realisasi tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian
1	% Peningkatan Industri yang telah terstandarisasi	2,0%	2,0%	100 %

Berdasarkan pengukuran pencapaian Sasaran Strategis 3 yaitu “**Meningkatnya penerapan standarisasi Industri** “, dengan target 2,0% dapat terealisasi 2,0% capaian kinerja yaitu **100 %**, sehingga capaian kinerja Sasaran Strategis 3 ini tercapai dengan kualifikasi *Sangat tinggi*.

b. Perbandingan antara realisasi tahun 2022 dengan tahun-tahun sebelumnya

Adapun perbandingan realisasi tahun 2022 dengan tahun-tahun sebelumnya untuk indikator kinerja ini, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5.6
Perbandingan antara realisasi tahun 2021 ~ 2022

No	Indikator Kinerja	2020	2021	2022
1	% Peningkatan Industri yang telah terstandarisasi	1,47%	1.67%	2,0%

Sumber: Dinas Perindustrian Prov Sulsel

Persentase peningkatan Industri yang telah terstandarisasi pada tahun 2020 yaitu 1,47% Dan di tahun 2021 target 2,0 % dengan realisasi 1.67 % dan capaiannya menjadi 83,5% dan 2022 dengan target 2,0 % dengan realisasi 2.0.% dan capaiannya menjadi100

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan serta Solusi yang Telah Dilakukan.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, pada tahun 2022 realisasi mencapai target yang ditetapkan, yakni dengan target 2,0 % dapat terealisasi 2,0 % dengan capaian kinerja yaitu **100 %**, sehingga capaian kinerja Sasaran Strategis 3 ini tercapai dengan kualifikasi *Baik*. Keberhasilan ini ditunjukkan dengan tercapainya target-target indicator yang telah ditetapkan.

Pada sasaran strategis ini meningkatnya jumlah produk IKM yang telah terstandarisasi, dan meningkatnya akses IKM terhadap perizinan industry serta tingkat kesesuaian prioritas pembangunan menjadi sasaran utama. Dimana target awal Pada tahun 2022 target fasilitasi sertifikasi dan standarisasi produk industri bagi IKM adalah 200 sertifikat dan yang terealisasi adalah 529 IKM yang mendapatkan sertifikat halal dengan kategori 529 IKM katwegori self Declare, 36 IKM regular dari Tenant Lego-lego dan 20 IKM regular binaan Dinas Perindustrian Prov. Sulawesi Selatan . Dan 50 IKM Pengajuan pendaftaran Fasilitasi HAKI (Merk) yang di daftarkan di kemetrian Hukum dan Ham Prov. Sulawesi Selatan jadi total keseluruhan 635 IKM yang terstandarisasi dan ini melebihi target kinerja tahun 2022



Faktor Pendorong

1. Tersedianya peluang pasar bagi produk industri Sulawesi Selatan serta peluang kerjasama dengan negara lain dengan diberlakukannya MEA.
2. Potensi produk pangan dan produk kerajinan Sulawesi selatan yang merupakan sumber utamapendorong.



Faktor Penghambat

1. Mayoritas produk industri masih bertumpu pada primary product dan teknologi yang digunakan belum terlalu canggih sehingga memiliki nilai tambah yang rendah.
2. Masih kurangnya kesadaran pelaku usaha industri dalam meningkatkan kualitas produk serta penggunaan teknologi tepat guna.
3. Daya saing produk yang dihasilkan masih relatif rendah baik dari kemasan, sertifikasi mutu produk (GMP, halal, SNI) dan sertifikasi komoditi ekspor potensial (sertifikat kesesuaian mutu).
4. Jaringan kemitraan usaha antara IKM dengan industri besar belum optimal



Strategi Pemecahan masalah

1. Menerapkan hilirisasi industri Sulawesi Selatan serta diversifikasi terhadap produk yang berorientasi ekspor sehingga nantinya produk yang dihasilkan dapat bersaing di pasar dunia.
2. Meningkatkan standar mutu produk melalui fasilitasi sertifikasi SNI, GMP,halal, pemberian bimtek kemasan dan melakukan peningkatan pengawasan terhadap komoditi ekspor, reakreditasi laboratorium pengujian serta peningkatan kompetensi SDM Labor penguji.
3. Pengembangan pola pikir pelaku usaha industri dengan implementasi manajemen usaha modern melalui bimbingan teknis dan sosialisasi.



Upaya-Upaya yang telah dilakukan selama masa tahun 2022

1. Meningkatkan penguatan produktivitasusaha industri melalui hilirisasi produk industri dan pemulihanekonomi sektor industri, peningkatan promosi

dan perluasan pasar produk industri serta meningkatkan kemampuan sentra industri.

Hal ini dilakukan melalui kegiatan-kegiatan antara lain:

- a. Pendampingan Desain dan Teknik Sablon
 - b. Diversifikasi Produk Olahan Kopi untuk Kelompok IKM Pengolahan Kopi Abe Setia Perkasa pada Sentra IKM Barimbing di Kab. Luwu untuk Kelompok IKM Pengolahan Kopi Abe Setia Perkasa pada Sentra IKM Barimbing di Kab. Luwu
 1. Mesin Roasting kopi kapasitas 5kg
 2. Mesin Sortasi Kopi 100Kg/Jam
 3. Mesin Huller Kapasitas 100kg/jam
 4. Mesin Kemasan Sachet 250gr kapasitas produksi 50 bungkus/menit
 - c. Pengadaan dan bantuan mesin/peralatan kepada 2 (dua) IKM dalam rangka peningkatan kualitas, kuantitas dan diversifikasi produk industri pengolahan kue, dengan rincian kelompok IKM sebagai berikut:
 1. Kelompok IKM Pengolahan Kue Kering Nurul Snack di Desa Mallekana, Kec. Marioriwawo, Kab. Soppeng dengan rincian sebagai berikut:
 - Mesin Oven Kue,
 - Mesin Pencampur (Planetary Mixer)
 - Mesin Press Kemasan
 2. Kelompok IKM Pengolahan Krupuk Padaidi di Kel, Jampu, Kec. Liliiraja, Kab. Soppeng dengan rincian sebagai berikut:
 - Mesin Mesin Cetak Mie Getra DSHH 180C.
 - Mesin Pencampur (Planetary Mixer) B15/5Kg
 - Mesin press kemasan pedal Foot Sealer,
 - Kompogas Turbo 2 Tungku,
 - Cup Sealer manual,
 - Kompor Pemanggang 4 Tungku,
 - Timbangan Elektrik Kapasitas 3000g power 3*AAA
 - d. Pendampingan Kriya bamboo
 - e. Pendampingan sentra industri hasil tembakau
2. Meningkatkan kualitas produk industri melalui peningkatan kompetensi SDM IKM dan aparatur industri, penggunaan teknologi tepat guna, peningkatan penerapan standarisasi produk industri oleh IKM serta peningkatan fasilitasi standarisasi dan legalitas produk IKM. Pada tahun 2022 target fasilitasi sertifikasi dan standarisasi produk industri bagi IKM adalah 200 sertifikat dan yang terealisasi adalah 529 IKM yang mendapatkan sertifikat halal

dengan kategori 529 IKM kategori self Declare, 36 IKM regular dari Tenant Lego-lego dan 20 IKM regular binaan Dinas Perindustrian Prov. Sulawesi Selatan . Dan 50 IKM Pengajuan pendaftaran Fasilitas HAKI (Merk) yang di daftarkan di kementerian Hukum dan HAM Prov. Sulawesi Selatan jadi total keseluruhan 635 IKM yang terstandarisasi dan ini melebihi target kinerja tahun 2022. Hal ini berarti indikator dan sasaran telah memenuhi target pencapaian. yang terdiri atas :

- Fasilitas Merk bagi 50 IKM.
 - Fasilitas Halal bagi 585 IKM
3. Pencapaian ini diperoleh melalui kegiatan-kegiatan antara lain:
1. Standarisasi dan Sertifikasi Produk Industri Kecil Menengah.
 2. Bimbingan Teknis HAKI dan SNI bagi Industri Kecil Menengah Makanan.
 3. Pelatihan Rancang Bangun dan Perekrasan Alat Teknologi Tepat Guna

e. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran yang ditetapkan pada APBD TA 2022 untuk mendukung pencapaian sasaran ini terdiri dari 2 Program yakni Program Perencanaan dan Pembangunan Industri sebesar Rp11.006412.637,- dengan realisasi sebesar Rp. 10.711860.757,- atau 97.32%. Dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 100%, berarti tingkat efisiensi yang mendukung sasaran ini adalah sebesar 0,82%. Dan Program Pengendalian Izin Usaha Industri sebesar Rp. 799.983.200.- dengan realisasi sebesar Rp 721.289.862.- atau 90,16% Dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 100%, berarti tingkat efisiensi yang mendukung sasaran ini adalah sebesar 0.99%.

Tabel 3.3.16
Realisasi Anggaran Dinas Perindustrian Prov. Sulawesi Selatan Tahun 2022

NO	URAIAN	ANGGARAN TA 2020	REALISASI	%
1	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	11.006412.637	. 10.711860.757	97.32
2	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	799.983.200.-	721.289.862.-	90,16
	Jumlah	11.806.395.837.-	11433150619	93.00

Sumber: Laporan Keuangan TA 2022 unaudited

f. Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja.

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran diatas adalah

Program Perencanaan dan Pembangunan Industri dimana capaian programnya adalah Persentase pertambahan jumlah industri dengan target 6 % dan realisasi 4 %. Dengan anggaran sebesar 11.006412.637 terealisasi sebesar 10.711860.757 dengan capaian sebesar 96,18%.yang terdiri dari :

- **Kegiatan Penyusunan Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi** dialokasikan anggaran sebesar Rp. 11.006412.637 - dan dapat terealisasi sebesar Rp. 10.711860.757 atau sebesar 96,18%. Capaian kegiatan ini adalah Persentase peningkatan industri yang dibina dan dikembangkan (3 %).
 - a. Sub Kegiatan Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan Penyebaran dan Perwilayahan Industri dialokasikan anggaran sebesar Rp. 5.150.000.000- dan dapat terealisasi sebesar Rp. 1.654.534.438- atau sebesar 99.07%. Capaian kegiatan ini adalah:
 - Jumlah dokumen pengembangan kawasan industri yang dilaksanakan dengan target 0 dokumen dan terealisasi 0 dokumen ,
 - Jumlah dokumen kebijakan industri hijau dan SNI industri yang dilaksanakan dengan target 1 dokumen dan terealisasi sebanyak 1 dokumen
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.739.376.288- dan dapat terealisasi sebesar Rp. 1.505.727.552- atau sebesar 97,02%. Capaian kegiatan ini adalah :
 - jumlah sumber daya manusia industri yang dibina dengan target terealisasi sebesar 350 orang dan terealisasi sebesar 260 Orang.
 - Jumlah potensi sumberdaya unggulan daerah yang dikembangkan menjadi potensi sumberdaya industri dengan target 1 Potensi dan terealisasi sebesar 1 potensi,
 - Jumlah inovasi teknologi dan peralatan industri yang dikembangkan dengan target 15 Unit terealisasi sebesar 12 unit.
 - c. Sub Kegiatan Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.601.307.300,- dan dapat terealisasi sebesar Rp. 1.505.727.552,- atau sebesar 94.03 %. Capaian kegiatan ini adalah persentase Jumlah fasilitas pemenuhan komitmen perolehan standarisasi industri dengan target 10 Sentra dan terealisasi sebesar 16 sentra
 - d. Sub Kegiatan Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat anggaran sebesar Rp.

2.515.729.049,-dan dapat terealisasi sebesar Rp. 2.449.598.767,- atau sebesar 97.37 %. Capaian kegiatan ini adalah:

- Jumlah pelayanan dan pendampingan masyarakat industri terkait makanan, minuman dan kemasan dengan target 30 Pelayanan dan terealisasi sebesar 30 pelayanan.
- Jumlah pelayanan administrasi UPT Logam, tekstil dan alat mesin pertanian dengan target 100 Pelayanan dan terealisasi sebanyak 100 pelayanan.
- Jumlah pelayanan dan pendampingan masyarakat industri terkait tekstil dengan target 10 Pelayanan dan terealisasi sebanyak 8 pelayanan.
- Jumlah pelayanan dan pendampingan masyarakat industri terkait logam dengan target 50 Pelayanan dan terealisasi sebanyak 50 pelayanan.

2. Program Pengendalian Izin Usaha Industri dengan indikator capaian program adalah Persentase Peningkatan pengendalian izin usaha industri dengan target 2 % dan realisasi 2 % dengan anggaran sebesar 799.989.200.- terealisasi sebesar 721.298.862,0.- dengan capaian sebesar 90,16 %.

a. **Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri IUI Izin Perluasan Usaha Industri IPUI Izin Usaha Kawasan Industri IUKI dan Izin Perluasan Kawasan Industri IPKI Kewenangan Provinsi.** dengan indikator capaian kegiatan adalah persentase industri yang bersertifikat/ terstandarisasi dengan target 11% dan terealisasi 11 % dialokasikan anggaran sebesar Rp. 799.989.200,- dan dapat terealisasi sebesar Rp. 721.298.862,- atau sebesar 90.16%. yang terdiri dari :

- 1. Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik** dengan indikator capaian sub kegiatan adalah Persentase jumlah fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan standarisasi industri dengan target 200 Sertifikat dan terealisasi sebesar 635 sertifikat. dialokasikan anggaran sebesar Rp. 699.996.200,- dan dapat terealisasi sebesar Rp. 638.207.752- atau sebesar 91,17 %.
- 2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI IPUI IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi** dengan indikator capaian sub kegiatan adalah Persentase jumlah fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan standarisasi industri dengan target 2 Dokumen dan terealisasi sebesar 2 Dokumen dialokasikan anggaran sebesar Rp. 99.993.000,- dan dapat terealisasi sebesar Rp. 83.082.110,- atau sebesar 83.08%.

3.

Sasaran 4

Meningkatnya Pengelolaan ,
Penyediaan dan Penyebarluasan
Informasi Industri

Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam membina dan mengembangkan sektor perindustrian di provinsi Sulawesi Selatan menetapkan sasaran RPJMD yaitu **Meningkatkan produktivitas dan daya saing produk sumberdaya alam yang berkelanjutan**.dengan tujuan meningkatkan produktivitas dan daya saing produk perekonomian rakyat serta melestarikan lingkungan hidup dan sumber daya alam khususnya yang bergerak di sektor industri dapat meningkat, sehingga memicu pertumbuhanekonomi daerah. Melalui Program Pengelolaan Sistem Informasi nasional (SIINas) diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan, penyediaan dan penyebarluasan Informasi Industri Nasional sehingga produktivitas dan daya saing produk perekonomian rakyat semakin meningkat.

Beberapa dasar hukum yang dijadikan pelaporan SIINAS adalah Undang-undang nomor 3 tahun 2014, Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2017 dan peraturan menteri perindustrian RI nomor 2 tahun 2019. Sebagaimana tertulis di dalam Pasal 64 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian yang berbunyi "*Setiap Perusahaan Industri wajib menyampaikan Data Industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala kepada Menteri, Gubernur, dan bupati/walikota*"

a. Perbandingan antara target dan realisasi

Untuk indikator Persentase Peningkatan akses dan pemanfaatan informasi industry oleh masyarakat diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 3.3.16
Perbandingan Antara Target dan Realisasi tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian
1	Persentase Peningkatan akses dan pemanfaatan informasi industry oleh masyarakat	2,5 %	3 %	120%

Berdasarkan pengukuran pencapaian Sasaran Strategis 4 yaitu **“Meningkatnya pengelolaan, penyediaan dan penyebarluasan Informasi Industri “**, dengan target 2,5% dapat terealisasi 3,0 % capaian kinerja yaitu 120 %, sehingga capaian kinerja Sasaran Strategis 4 ini tercapai dengan kualifikasi *Sangat Tinggi*.

b. Perbandingan antara realisasi tahun 2022 dengan tahun-tahun sebelumnya

Adapun perbandingan realisasi tahun 2022 dengan tahun-tahun sebelumnya untuk indikator kinerja ini, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3.17
Perbandingan antara realisasi tahun 2019 - 2022

No	Indikator Kinerja	2019	2020	2021	2022
1	Persentase Peningkatan akses dan pemanfaatan informasi industry oleh masyarakat	1%	1,74%	1.97%	3 %

Persentase Peningkatan akses dan pemanfaatan informasi industry oleh masyarakat pada tahun 2019 realisasi sebesar 1% , pada tahun 2020 mengalami peningkatan yaitu 1,74% dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan yaitu 1,97 % dengan capaian 98,5 % dengan predikat sangat baik dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 3 %

c. Target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis dan standar nasional.

Perbandingan realisasi Persentase Peningkatan akses dan pemanfaatan informasi industry oleh masyarakat tahun 2022 dengan target jangka menengah, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3.18
Perbandingan Target Persentase Peningkatan akses dan pemanfaatan informasi industry oleh masyarakat

No	Indikator Kinerja	Realisasi Target		
		2022	Target Jangka Menengah	Target Nasional
1	Persentase Peningkatan akses dan pemanfaatan informasi industry oleh masyarakat	3,00 %	1.97%	-

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan serta Solusi yang Telah Dilakukan.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, realisasi melebihi target yang ditetapkan, dengan target 2,50% dapat terealisasi 3.0% dengan capaian kinerja yaitu 120 %,sehingga capaian kinerja Sasaran Strategis 4 ini tercapai dengan kualifikasi *Sangat Tinggi*. Keberhasilan ini ditunjukkan dengan tercapainya target-target yang telah ditetapkan.



Faktor Pendorong

1. SIINas adalah sistem yang dirancang Kementerian Perindustrian RI untuk mendapatkan data primer setiap pelaku usaha industri
2. Dimasa Pandemi Covid 19, Siinas dapat membantu dalam menghadapi masalah dari pandemi covid-19 ini karena bisa mengetahui hal, seperti bahan baku, kondisi bahan, dan pengaruh IOMKI (Izin operasional dan mobilitas industri) karena dengan izin ini bisa beroperasi baik dikantor, perusahaan, sampai distribusi pemasaran, pengiriman bahan baku. Pengoperasian dari SIINas ini juga mudah hanya dengan internet, laporan tidak perlu menyampaikan ke dinas.



Faktor Penghambat

1. Jaringan kemitraan usaha antara IKM dengan industri besar belum optimal.
2. Masih belum optimalnya akses informasi industry ke masyarakat luas.
3. Keakuratan data industri dari kabupaten/kota masih lemah.



Strategi Pemecahan masalah

1. Kementrian Perindustrian telah mengembangkan 2 sistem informasi yakni sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) dan Sistem Informasi Ketahanan Industri (SIKI)
2. SIINas diharapkan dapat lebih memudahkan dan cepat dalam memberikan pelayanan publik
3. Setiap Perusahaan Industri wajib menyampaikan Data Industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala kepada Menteri, Gubernur, dan bupati/walikota



Upaya-upaya yang telah dilakukan selama Tahun 2022

Dalam upaya mendorong pengembangan industri kecil menengah, SIINas memiliki peran dan fungsi yang cukup penting bagi pelaku industri itu sendiri. Industri yang telah terintegrasi dalam database SIINas dapat dengan mudah mengakses segala informasi terkait upaya pengembangan usahanya,

bahkan hingga level ekspor. Olehnya itu Dinas Perindustrian Provinsi .Sulawesi Selatan senantiasa mengadakan sosialisasi terhadap penggunaan sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) agar masyarakat lebih memahami SIINas sehingga muncul kesadaran untuk mengisi data yang lebih akurat, lengkap dan tepat waktu secara berkala. SIINas juga diharapkan dapat lebih memudahkan dan cepat dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.

e. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran yang ditetapkan pada APBD TA 2022 untuk mendukung pencapaian sasaran ini terdiri dari 1 Program sebesar Rp 99.906.800 - dengan realisasi sebesar Rp.70.656.800.- atau sebesar 70.72 %. Dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 100%, berarti tingkat efisiensi yang mendukung sasaran ini adalah sebesar 29.28 %

Tabel 3.3.20
Realisasi Anggaran Dinas Perindustrian Prov. Sulawesi SelatanTahun 2022

NO	URAIAN	ANGGARAN TA 2021	REALISASI	%
1	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	99.906.800.-	70.656.800	70.72
	Jumlah	99.906.800.-	70.656.800	70.72

Sumber: Laporan Keuangan TA 2022 unaudited

f. Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja.

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran diatas adalah :

1. **Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional**dimana capaian programnya adalah Persentase Peningkatan pengelolaan SIINAS yang capaiannya adalah Persentase Peningkatan pengelolaan SIINAS dengan target 3 % dan terealisasi sebesar 2 %terdiri dari :

- a. **Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk IUI IPUI IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional SIINas**dimana capaiannya adalah Persentase peningkatan penyediaan informasi industri berbasis sistem informasi industri nasional (SIINAS) dengan target sebesar 3 %, dan terealisasi sebesar 2 % dialokasikan anggaran sebesar Rp. 99.906.800,- dan terealisasi sebesar Rp. 70.656.800,- atau sebesar 70.72% yang terdiri atas sub kegiatan yakni :

- 1 **Sub Kegiatan Fasilitasi Pengumpulan Pengolahan dan Analisis Data Industri Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional SIINas.**dialokasikan anggaran sebesar Rp.57.943.000,- dengan target 2 dokumen , dengan realisasi sebesar

Rp.43.843.000,- atau sebesar 75.67 %.Target kinerja kegiatan ini adalah Jumlah dokumen/ informasi industri hasil pengolahan dan analisis melalui SIINAS dengan realisasi sesuai taret yakni 2 dokumen

- 2 Sub Kegiatan Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINasdimana capaiannya adalah jumlah diseminasi dan publikasi data informasi dan analisis industri provinsi melalui siinas, dialokasikan anggaran sebesar Rp.41.963.800,- dengan target Publikasi data/informasi , dengan realisasi 3 Publikasi data/informasi dengan anggaran sebesar Rp.26.813.800,- atau sebesar 63.90%.
- 3 Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas, dialokasikan anggaran sebesar Rp0 ,- dengan target 12 dokumen, terealisasi sebesar Rp.0,- , dengan persentase 0 %. Target kinerja kegiatan ini adalah 4 Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi terhadap kepatuhan industri dan kawasan industri dalam penyampaian data ke SIINAS dengan realisasi sesuai target yakni 0 dokumen

3.4 REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022

Analisa akuntabilitas keuangan pada laporan kinerja Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi selatan diuraikan atas beberapa bagian yang memuat tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2022 dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan pencapaian kinerja Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan.

3.4.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2022

Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2022 ditargetkan mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari unit-unit penghasil yang ada dilingkungan Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan dengan target sebesar Rp 103.203.000 dan telah terealisasi sebesar Rp. 103.203.500 -(100.08 %).. Adapun sumber atau unit penghasil dapat dilihat pada tabel dibawahini.

Tabel 3.4.1
Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022

TAHUN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	REALISASI (%)
2022	103.203.000	103.203.500	100.08 %

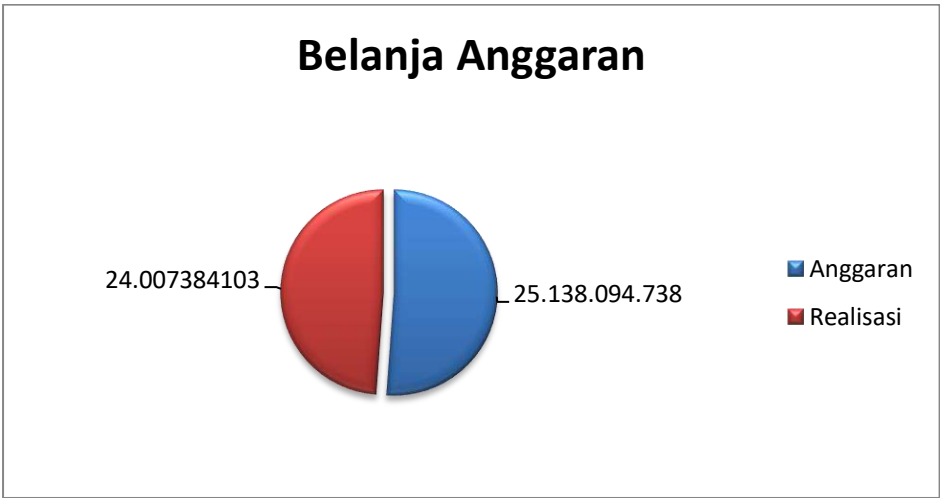
3.4.2 Realisasi Anggaran APBD dan APBN Tahun 2022

Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan sebagai perangkat otonomi daerah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya menggunakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Selatan dan APBN (dekonsentrasi).

Tabel 3.4.2.1
Jumlah APBD Sektor INDUSTRI Tahun 2022
(per Desember 2021)

TAHUN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	REALISASI (%)
2022	25.138.094.738,-	24.007.384.103,-	95.50 %

Jumlah dana APBD yang dialokasikan pada Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan untuk APBD Dinas perindustrian Prov. Sul-Sel Tahun 2022 sebesar Rp 25.138.094.738,-dengan realisasi Rp. 24.007.384.103,- (95.50 %). Dengan rincian Belanja Operasi sebesar Rp. . 21.973.123.039,-Sedangkan belanja Modal sebesar Rp. 3.164.971.699,- dengan realisasi Rp. 3.150.938.699,- (99,24%)



Jumlah APBD Sektor Industri Tahun 2022

Selain penyelenggaraan kegiatan yang dibiayai oleh dana APBD, dalam Tahun Anggaran 2022 Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan juga melaksanakan tugas dekonsentrasi (APBN) di Sektor Industri, dengan jumlah dana **Rp 933.000.000,-** dengan realisasi anggaran sebesar **909.825.141,- (97,52%)**.

Rincian anggaran per program selama tahun 2022 yang bersumber dari APBD Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4.2.2
Realisasi Belanja APBD Per Program

NO	NAMA PROGRAM	ANGGARAN (RP.)
1	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp 11.006.412.637
2	Program Pengendalian Usaha Industri	Rp. 799.989.200
3	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Rp. 99.906.800
4	Program Penuinjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 13.231.786.101
Total		Rp. 25.138.094.738
(Dua puluh Lima Milyar Seratus Tiga Puluh Delapan Juta Sembilan Puluh empat Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah)		

Sumber : Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian Prov. Sulawesi Selatan Tahun 2022

Sedangkan dana yang bersumber dari **APBN** Kementerian Perindustrian dialokasikan pada 1 (satu) Program, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.4.2.3
Program dan Kegiatan APBN Disperindustrian TA. 2022

NO	FUNGSI/SUB FUNGSI/PRGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
A	Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah dan Aneka	933.000.000
1	Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah dan aneka	
2	Dekonsentrasi PIKM Provinsi Sulawesi Selatan	
Total		933.000.000

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 ini merupakan laporan capaian kinerja selama tahun 2022. Dengan kata lain Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini bermaksud untuk menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya pelaksanaan pembangunan di sektor perindustrian yang telah dilakukan dilihat dari tingkat capaian dan target sasaran strategis, selain itu juga mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan serta upaya pemecahan masalah untuk pelaksanaan program dan kegiatan di masa mendatang agar sasaran strategis yang ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan. Sebagai Instansi yang bertugas membina dan mengembangkan sektor industri di Sulawesi Selatan, Dinas Perindustrian berusaha menjalankan tugas pokok, fungsi dan misi yang diembannya dengan baik. Hal ini tampak pada pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 yang secara umum sudah dapat memenuhi target yang ditetapkan. Dari Laporan Kinerja pada tahun 2022 ini dapat disimpulkan beberapa hal yaitu:

1. Beberapa catatan rekomendasi dari Hasil evaluasi Laporan Kinerja Tahun 2022 oleh Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan sudah ditindaklanjuti pada tahun anggaran 2022, terutama dalam point Rencana Aksi. Pada tahun 2021, telah dilakukan perbaikan terhadap Langkah-langkah yang akan ditempuh untuk mencapai sasaran kinerja dinas pada Rencana Aksi agar lebih spesifik serta melakukan monitoring dan evaluasi atas pencapaian rencana aksi secara periodik.
2. Sasaran strategis yang ditetapkan sebanyak 3 sasaran yang diturunkan kedalam 7 indikator kinerja telah berhasil dicapai dengan kategori sangat baik capaian indikator kinerja dengan kategori sangat baik yaitu:
 - Indikator Kinerja Persentase nilai SAKIP organisasi Perangkat daerah dengan target 100% terealisasi sebesar 70,20% dengan capaian kinerja dengan predikat Sangat baik (**BB**). Persentase ASN Nilai SKP kategori baik dengan target 100% terealisasi sebesar 100% (capaian 100%),

Rata-rata Capaian kinerja perangkat daerah (evaluasi Dokumen) terealisasi 100% (capaian 100%).

- Indikator kinerja Persentase Peningkatan Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB Sulawesi Selatan dengan capaian 97,55 % dengan target 13,00% dan terealisasi sebesar 12,68%. Sehingga capaian kinerja sasaran strategis 2 ini tercapai dengan kualifikasi *sangat baik*
- Indikator peningkatan akses dan pemanfaatan informasi industri oleh masyarakat juga dapat terealisasi dengan baik sebesar 3% dari target 2,5 % dengan capaian 120,0 %,
- Indikator kinerja Persentase Peningkatan Industri yang telah terstandarisasi dengan target 2 % terealisasi 2 % meningkat cukup pesat dengan capaian 100%.
- Indikator Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan dengan target 10 % terealisasi 12.31 % meningkat cukup pesat dengan capaian 123.1%.

2.2 PENGHARGAAN YANG DIPEROLEH DI TAHUN 2022

Pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022 di Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan ikut menunjang keberhasilan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam memperoleh penghargaan. Penghargaan yang diperoleh pada tahun 2022 adalah

No	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Penerima Penghargaan	Tempat dan Tanggal Penerimaan Penghargaan
1	Tudung Saji Bosara To Bone mendapatkan penghargaan Merit Prize In Natural Fibers Category dalam acara “ Inacraft Award 2022 ”	Association Exporters And Producer Of Indonesian Handicrafts (ASEPHI)	Ibu gubernur Sulawesi Selatan	25 Maret 2022 di Jakarta Convention Centre (JCC)
2	“ Dekranas Award 2022 ” Se-Indonesia, dengan menampilkan produk Anyaman Lontar . Penghargaan ini didapatkan melalui Kegiatan Pameran Kriya Nusa	Dekranas Pusat	Ibu gubernur Sulawesi Selatan	25 Sept 2022 Jakarta Convention Centre (JCC)
3	“ Songko To Bone ” dengan kategori Award Of Excellence for Handicraft 2021-2022 dalam Event Pameran Kriya Nusa yaitu “ World Crafts Council Award ”	World Crafts Council Award	Ibu gubernur Sulawesi Selatan	20 Sept 2022 Jakarta Convention Centre (JCC)

4.	Penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022. Dinas Perindustrian berhasil mendapatkan penghargaan sebagai juara ke IV dalam ajang kompetisi Pelayanan Publik se provinsi Sulawesi Selatan	Komisi Informasi Publik Pusat	Bapak Kadis Perindustrian Prov. Sulsel	2 Des 2022 Hotel Claro Makassar.
5	TOP 3 Best Halal Program Support. Pada Indonesia Halal Industry Awards 2022	Kementrian Perindustrian	Bapak Kadis Perindustrian Prov. Sulsel	9 Des 2022 Hotel Claro Makassar

Sumber :Dinas Perrindustrian Provinsi Sulawesi Selatan, 2022

4.3 PERMASALAHAN DAN KENDALA

Pencapaian kinerja sektor industri menunjukkan trend perkembangan yang baik, namun masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi sektor perindustrian sebagaimana tercermin pada beberapa indikator kinerja utama yang belum tercapai sesuai target, antara lain :

1. Masih belum optimalnya akses informasi industry ke masyarakat luas.
2. Masih banyak potensi hulu , SDM Industri dan teknologi produksi industry yang belum digarap untuk dikembangkan menjadi potensi industry daerah.
3. Mayoritas produk industri masih bertumpu pada primary product dan teknologi yang digunakan belum terlalu canggih sehingga memiliki nilai tambah yang rendah.
4. Masih kurangnya kesadaran pelaku usaha industri dalam meningkatkan kualitas produk serta penggunaan teknologi tepat guna.
5. Daya saing produk yang dihasilkan masih relatif rendah baik dari kemasan, sertifikasi mutu produk (GMP, halal, SNI) dan sertifikasi komoditi ekspor potensial (sertifikat kesesuaian mutu).
6. Jaringan kemitraan usaha antara IKM dengan industri besar belum optimal

Disamping permasalahan tersebut, sektor industri pengolahan Provinsi Sulawesi Selatan masih menghadapi masalah klasik, seperti :

1. Daya saing produk IKM yang masih rendah (kualitas, desain, harga, kemasan, dan kontinuitas produksi).

2. Masih terbatasnya kemampuan pemasaran sebagian besar industri Sulawesi Selatan dan permodalan juga masih lemah.
3. Kurang optimalnya promosi dan informasi potensi produk IKM.
4. Keakuratan data industri dari kabupaten/kota masih lemah.

4.4 REKOMENDASI

Secara umum, pencapaian sasaran strategis telah sesuai dengan target yang ditetapkan, walaupun masih ada hal-hal lainnya yang harus diperhatikan agar kinerja Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan lebih baik lagi. Hal-hal yang perlu diperbaiki adalah :

1. Mendorong kabupaten/kota dalam mempercepat pertumbuhan sektor industri melalui pengembangan sentra industri unggulan
2. Menyelesaikan segala permasalahan-permasalahan yang menghambat daya saing produk IKM, melalui pelatihan dan pendampingan untuk mendapatkan sertifikasi produk.
3. Pembangunan industri-industri pendukung yang mengolah bahan baku dalam kuantitas, kualitas dan harga bersaing, yang nantinya dapat meningkatkan nilai tambah produk industri untuk dijadikan produk ekspor.
4. Meningkatkan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja yang telah disepakati.
5. Meningkatkan penerapan pengukuran kinerja secara berjenjang dari eselon III, IV dan staf secara berkala.

Makassar, 25 Januari 2023

Kepala Dinas Perindustrian
Provinsi Sulawesi Selatan,



H. AHMADI AKIL, SE, MM
Pangkat: Pembina Utama Madya
Nip. 19651231 199403 1 081

LAMPIRAN







BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sudah lama ditetapkan sebagai salah satu kewajiban instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah, termasuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan penganggaran berbasis kinerja.

Dalam rangka terselenggaranya good governance diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan selaku unsur penyelenggara pemerintahan daerah mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya didasarkan pada perencanaan strategis yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) sesuai dengan Inpres no.7 tahun 1999.

Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dikeluarkan sebagai wujud pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang logis, jelas dan akurat. Isi dari LKjIP pada intinya merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi serta penjabarannya yang menjadi perhatian utama masyarakat, penjelasan tentang kinerja dan capaian kinerja, analisis capaian kinerja analisis permasalahan dan strategi pemecahan masalah dalam rangka peningkatan kinerja Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan dimasa mendatang. Sistem pengukuran kinerja yang disajikan dalam LKjIP dilakukan dengan cara membandingkan antara rencana

dengan realisasi secara bertingkat melalui pengukuran indikator kegiatan sampai kepada sasaran. Penentuan bobot antar indikator kegiatan, program dan kebijakan dilakukan dengan mempertimbangkan masing-masing peranannya dalam mencapai sasaran sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Perdagangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018 - 2023.

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara baik, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari KKN.

Mengingat tantangan yang dihadapi kedepan akan semakin berat dan kompleks, diperlukan interkoneksi peran dan fungsi ketiga unsur/domain tersebut dalam konsepsi manajemen strategik dan implementasinya berdasarkan prinsip-prinsip; akuntabilitas (accountability), transparansi (transparency), keterbukaan (openness), aturan hukum (rule of law), keadilan (fairness) dan partisipasi (participation). Tuntutan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) harus segera direspon secara proaktif melalui penerapan manajemen perubahan yang visioner dan pembelajaran kolektif terhadap lembaga pemerintah dan masyarakat, untuk itu diperlukan suatu sistem akuntabilitas kinerja yang tepat, jelas dan legitimate agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara efektif, efisien, bersih, bertanggung jawab serta bebas KKN.

Semangat untuk menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik tersebut, dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN. Di dalam Undang- Undang tersebut terikat pada 7 (tujuh) asas yang menjadi landasan serta orientasi bagi para penyelenggara pemerintahan, yakni **asas**

kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, orientasi pada kepentingan umum, keterbukaan, proposionalitas, profesionalitas serta akuntabilitas Analisis capaian kinerja / permasalahan dan strategi pemecahan masalah dalam rangka peningkatan kinerja Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan dilakukan dengan cara membandingkan antara rencana dengan realisasi secara bertingkat melalui pengukuran indikator kegiatan sampai kepada sasaran. Penentuan bobot antar indikator kegiatan, program dan kebijakan dilakukan dengan mempertimbangkan masing-masing peranannya dalam mencapai sasaran sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Perdagangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018 - 2023.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2022 dibuat sebagai pertanggung jawaban kepada Gubernur Sulawesi Selatan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja dalam lingkup Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan.

B. KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan sesuai Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 65 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana di mana di sebutkan dalam pasal 115 adalah sebagai berikut : “Dinas Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang Perdagangan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas Pembantuan”.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 115, Dinas Perdagangan mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perdagangan meliputi bidang

perdagangan dalam negeri, bidang perdagangan luar negeri, serta bidang bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga,

2. Penyelenggaraan urusan pelayanan umum di bidang perdagangan meliputi bidang perdagangan dalam negeri, bidang perdagangan luar negeri, serta bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga
3. Pembinaan dan penyelenggaraan tugas di bidang perdagangan meliputi bidang perdagangan dalam negeri, bidang perdagangan luar negeri, serta bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga
4. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. LINGKUNGAN STRATEGIS YANG BERPENGARUH

Dinamika lingkungan strategis Lingkungan dipengaruhi oleh lingkungan eksternal dan lingkungan internal hal tersebut berlangsung sangat cepat dan merupakan faktor penentu keberhasilan suatu organisasi pemerintah dalam menjalankan peran dan fungsinya. Faktor perubahan lingkungan strategis tersebut akan mempengaruhi dinamika pembangunan, sehingga diperlukan respon proaktif dan antisipatif untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian di berbagai sektor pembangunan terutama dengan telah diberlakukannya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan pelaksanaannya.

1. Lingkungan Internal

Lingkungan strategis internal yang berpengaruh terhadap pencapaian misi Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan mencakup empat unsur utama, yaitu: (a) sumberdaya aparatur, (b) prasarana dan sarana, (c) keuangan, dan (d) kelembagaan.

a. Sumber Daya Aparatur

Sumber daya Aparatur yang dimiliki Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan secara kuantitatif sesungguhnya sudah cukup memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi. Jumlah Aparatur

Sipil Negara (ASN) pada Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan pada akhir Desember 2022 sebanyak 69 orang pegawai. Bila dilihat dari segi kualitas khususnya tingkat pendidikan yang dimiliki, dapat dirinci sebagai berikut : yang berkualifikasi Pasca Sarjana (S2) 18 orang, berkualifikasi Sarjana (S1) 41 orang, berkualifikasi Diploma sebanyak 2 orang, dan berkualifikasi SLTA 8 orang.

KOMPOSISI PEGAWAI MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN

NO.	UNIT KERJA	TINGKAT PENDIDIKAN						JUMLAH
		SMP	SMA	DIPLOMA	S1	S2	S3	
1	SEKRETARIAT		1	1	13	2		17
2	BIDANG PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI		1		6	2		9
3	BIDANG PENGEMBANGAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI				5	4		9
4	BIDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA		1		7	4		12
5	UPT BALAI PENGUJIAN DAN SERIFIKASI MUTU BARANG		2	1	8	4		15
6	UPT BALAI PELAYANAN DISTRIBUSI PERDAGANGAN		1		2	2		5
7	FUNGSIONAL		2					2
TOTAL			8	2	41	18		69

Kondisi komposisi kepegawaian sesuai dengan Jenis Kelamin dan Jabatan di lingkungan Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan sampai dengan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

JUMLAH PEGAWAI DINAS PERDAGANGAN MENURUT JENIS KELAMIN DAN JABATAN

NO.	UNIT WILAYAH	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		P	L	
1	Eselon II		1	1
2	Eselon III	3	3	6
3	Eselon IV	3	6	9
4	Sub Koordinator	5	4	9
4	Fungsional Tertentu	1	1	2
5	Pelaksana	9	32	41
6	CPNS Penguji Mutu Barang		1	1
TOTAL		21	48	69

Kondisi komposisi kepegawaian sesuai dengan Jabatan dan golongan di lingkungan Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan sampai dengan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

KOMPOSISI APARAT DINAS PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI SELATAN BERDASARKAN GOLONGAN TAHUN 2022

NO.	UNIT KERJA	GOLONGAN				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1	SEKRETARIAT		1	13	3	17
2	BIDANG PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI		1	6	2	9
3	BIDANG PENGEMBANGAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI			6	3	9
4	BIDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA		1	7	3	11
5	UPT BALAI PENGUJIAN DAN SERIFIKASI MUTU BARANG		1	12	3	16
6	UPT BALAI PELAYANAN DISTRIBUSI PERDAGANGAN			5		5
7	FUNGSIONAL			2		2
TOTAL			4	51	14	69

Kondisi komposisi kepegawaian sesuai dengan latar belakang Usia di lingkungan Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan sampai dengan bulan Desember Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

NO.	UNIT KERJA	USIA (tahun)							JUMLAH
		20-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	>50	
1	SEKRETARIAT			1	8	4	1	3	17
2	BIDANG PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI			1	3	2	2	1	9
3	BIDANG PENGEMBANGAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI				3		3	3	9
4	BIDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA			1	1	1	1	7	11
5	UPT BALAI PENGUJIAN DAN SERIFIKASI MUTU BARANG				1	4	5	6	16
6	UPT BALAI PELAYANAN DISTRIBUSI PERDAGANGAN				3		1	1	5
7	FUNGSIONAL							2	2
TOTAL				3	19	11	13	23	69

Ditinjau dari jumlah ASN yang ada pada Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan sudah memadai, namun bila dilihat dari tingkat kompetensinya perlu peningkatan SDM yang berkaitan dengan kemampuan yang dimiliki seorang Aparatur Sipil Negara di dalam menjabat suatu jabatan struktural maupun jabatan fungsional sesuai tugas pokok dan fungsinya serta khususnya dalam menunjang visi dan misi organisasi. Mengenai pegawai negeri sipil yang mengisi jabatan fungsional sebanyak 2 orang perlu mendapat perhatian khusus untuk ditingkatkan kompetensinya dan perlu dipertegas implementasi penugasannya agar lebih optimal dan tidak tumpang tindih. Selain faktor jumlah dan kualifikasi pendidikan, faktor lain yang sangat perlu mendapat perhatian adalah motivasi dan kedisiplinan.

b. Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan masih perlu ditingkatkan. Demikian juga Sarana laboratorium pengujian mutu barang, serta sarana mobilitas juga masih memerlukan peningkatan baik dari segi jumlah maupun kualifikasinya.

Demikian juga pada Gedung Ballroom CCC. Ada beberapa kekurangan pada sarana dan prasarana gedung tersebut, antara lain beberapa bagian plafond yang rubuh, mengalami rembesan air sehingga diadakan pemeliharaan dengan melakukan perbaikan fisik gedung seperti penggantian plafond, perbaikan atap gedung yang mengalami kebocoran dan lain-lain. Sedangkan prasarana untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pekerjaan dianggap baik dan memadai.

Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan sampai akhir Desember 2022 dapat dilihat pada lampiran, sedangkan aset berupa barang tidak bergerak berupa tanah dan bangunan sebagai berikut:

NO	JENIS/NAMA GEDUNG	LUAS, M2		KETERANGAN
		Tanah	Bangunan	
1	Kantor Dinas Perindag	1,916	1,510	Bangunan telah di hapuskan Okt 2010 dan Tanah dialih fungsikan menjadi Taman
2	Kantor Dinas Perindag	2,987	1,726	Bangunan telah di hapuskan Okt 2010 dan Tanah dialih fungsikan menjadi Taman
3	Kantor UPTD Metrologi	1,764	560	Dialihkan Ke Kota Makassar
4	Kantor UPTD BPSMB	4,000	1,000	
5	Instalasi Pengujian Meter Arus BBM UPTD Metrologi	514	60	Dialihkan Ke Kota Makassar
6	Rumah Dinas Pegawai	210	70	
7	Rumah Dinas Pegawai	477	70	
8	Rumah Dinas Pegawai	477	70	
9	Rumah Dinas Pegawai	900	265	

10	Kantor UPTD P3ED	920	819	Dialihkan Ke Kota Makassar
11	Kantor UPTD CCC	60.000	2.500	

c. Sumber Daya Keuangan

Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai perangkat otonomi daerah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya menggunakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Selatan dan APBN (dekonsentrasi).

Jumlah dana APBD yang dialokasikan pada Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan untuk Tahun Anggaran 2022 Rp. 16.366.857.597,- dengan rincian :

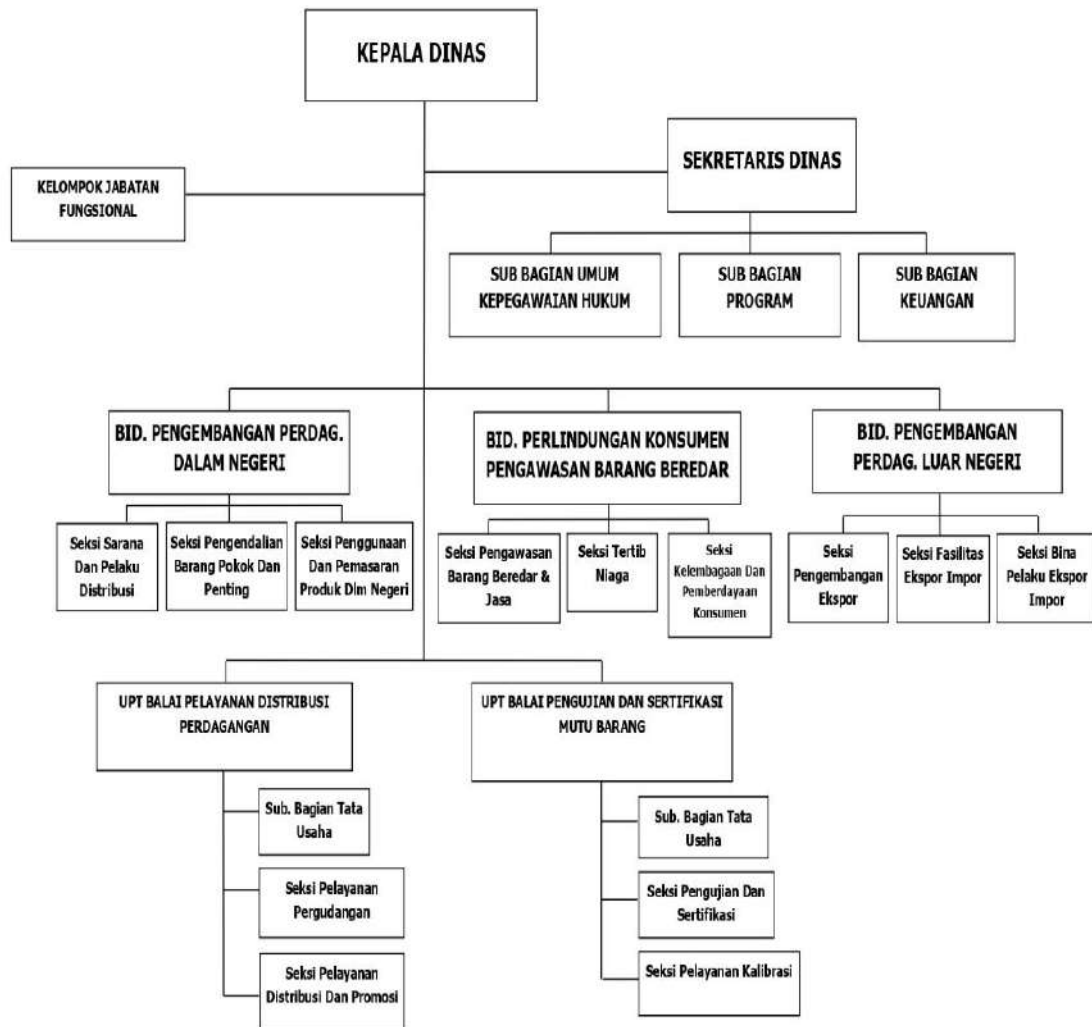
- **Belanja Operasi** sebesar Rp. 15.257.972.097,- dan
- **Belanja Modal** sebesar Rp.1.108.885.500 yang terdiri dari **6 Program, 13 Kegiatan dan 30 Sub Kegiatan**

Selain penyelenggaraan kegiatan yang dibiayai oleh dana APBD, dalam Tahun Anggaran 2022 Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan juga melaksanakan tugas dekonsentrasi (APBN) di Sektor Perdagangan, dengan jumlah dana Rp **911.783.000,-**

d. Kelembagaan

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta dipertegas dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 49 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022, Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan dengan jumlah pegawai sebanyak 69 Orang yang dipimpin oleh 1 (satu) orang Kepala Dinas (eselon II A), dengan membawahi 6 eselon III yakni 1 (Satu) orang Sekretaris Dinas, 3 (Tiga) orang Kepala Bidang dan 2 (Dua) orang Kepala UPTD, 9 (Sembilan) Orang Eselon IV, 9 (Sembilan) Orang Sub Koordinator, 2 (Dua) Orang Fungsional Tertentu, 41 (Empat Puluh Satu) Orang Pelaksana dan 1 (Satu) Orang CPNS Adapun struktur organisasi sebagai sesuai Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan **Nomor 49 Tahun 2019** sebagai berikut :

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI SELATAN



Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan fungsi tersebut, struktur organisasi Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Sekretariat ;
 1. Subbagian Program;
 2. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum;
 3. Subbagian Keuangan;
- c. Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri;

1. Pengawas Perdagangan Ahli Muda Selaku Sub Koordinator Pengendalian Barang Pokok Dan Penting
 2. Analis Perdagangan Ahli Muda Selaku Sub Koordinator Sarana Dan Pelaku Distribusi
 3. Analis perdagangan ahli muda selaku sub koordinator penggunaan dan pemasaran produk dlm negeri
- a. Bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri ;
1. Analis Perdagangan Ahli Muda Selaku Sub Koordinator fasilitas Ekspor Impor;
 2. Analis Perdagangan Ahli Muda Selaku Sub Koordinator Pengembangan Ekspor; dan
 3. Analis Perdagangan Ahli Muda Selaku Sub Koordinator Bina Pelaku Ekspor Impor.
- b. Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga ;
1. Pengawas Perdagangan Ahli Muda Selaku Sub Koordinator Pengawasan Barang Beredar Dan Jasa;
 2. Analis Perdagangan Ahli Muda Selaku Sub Koordinator Kelembagaan Dan Pemberdayaan Konsumen;
 3. Pengawas Perdagangan Ahli Muda Selaku Sub Koordinator Tertib Niaga.
- c. UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
1. Sub Bagian Tata Usaha
 2. Seksi Pelayanan Pengujian dan Sertifikasi
 3. Seksi Pelayanan Kalibrasi
- g. UPTD Balai Pelayanan Distribusi Perdagangan
1. Subbagian Tata Usaha
 2. Seksi Pelayanan Pergudangan
 3. Seksi Pelayanan Distribusi dan Promosi

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Dalam rencana strategik disusun visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan. Visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi tersebut disusun dalam dokumen Renstra Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan 2018 - 2023 sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 - 2023 di mana setiap tahunnya dijabarkan kembali dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan kemampuan unit pelaksana.

A. RENCANA STRATEGIS DINAS PERDAGANGAN

Rencana strategis sektor Perdagangan mengacu pada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengatur bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) disusun dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan tetap mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), sebagaimana tertuang pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. RPJMD tersebut menjadi dokumen induk yang memuat arah kebijakan pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun 2018-2023.

A.1 VISI

Visi pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan untuk periode RPJMD 2018-2023 adalah sebagai berikut :

**"Sulawesi Selatan Yang
Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan
Berkarakter"**

Rumusan visi ini mengandung lima pokok visi di dalamnya yakni inovatif, produktif, kompetitif, inklusif dan berkarakter. Keempat pokok visi ini merupakan rangkaian yang terkait satu sama lain dalam mewujudkan kondisi pada tahun 2023 dimana terjelmakan Provinsi Sulawesi Selatan yang "Bersih dan Melayani", "Terkoneksi", "Mandiri dan Sejahtera", "Sehat dan Cerdas" serta "Berkarakter". Berdasarkan pemahaman itu maka penjelasan visi RPJMD Sulawesi Selatan 2018-2023 dapat dijabarkan sebagai berikut :

INOVATIF	:	Kondisi pemerintahan yang memiliki kemampuan menciptakan gagasan baru, produk baru, dan layanan baru dalam kerangka pemerintahan yang baik sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang "bersih dan melayani".
PRODUKTIF	:	Kondisi perekonomian yang berkemampuan menghasilkan produk barang dan jasa yang berdaya saing sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang "mandiri dan sejahtera".
KOMPETITIF	:	Kondisi masyarakat yang memiliki sumber daya manusia (SDM) dengan kualitas tinggi sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang "sehat dan cerdas"
INKLUSIF	:	Kondisi penyelenggaraan pembangunan yang melibatkan partisipasi seluruh unsur masyarakat dan seluruh bagian wilayah serta ramah terhadap lingkungan hidup sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang "inklusif dan terkoneksi".
BERKARAKTER	:	Kondisi penyelenggaraan pembangunan Sulawesi Selatan

yang dilandasi oleh spirit dan nilai-nilai luhur kebudayaan masyarakat sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang “berkarakter”.

- **Misi**

Berdasarkan Visi Utama Tersebut, Maka dijabarkan 5 Misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2023, Yaitu :

1. Pemerintahan Yang Berorientasi Melayani, Inovatif, dan Berkarakter.
2. Peningkatan Infrastruktur Yang Berkualitas dan Aksesibel.
3. Pembangunan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru Yang Produktif.
4. Pembangunan Manusia Yang Kompetitif dan Inklusif.
5. Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Produk Sumber Daya Alam Yang Berkelanjutan.

Adapun Misi yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan dalam mendukung keberhasilan visi tersebut adalah:

Misi Ke Satu : Pemerintahan Yang Berorientasi Melayani, Inovatif, dan Berkarakter.

Tujuan : Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang melayani secara Efisien dan Efektif

Sasaran : Terwujudnya Birokrasi Pemerintahan yang melayani secara Efisien dan Efektif.

Strategi : Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang melayani secara Efisien Dan Efektif melalui pelaksanaan program Baruga Pelayanan Masyarakat, Manajemen Pemerintahan Berbasis Kinerja, Penguatan Monitoring Evaluasi, dan Pemerintahan yang Transparan Berbasis Informasi Teknologi.

Arah Kebijakan : Aparatur Sipil Negara Yang Memiliki Kapasitas dan Keteladanan dalam Birokrasi Melayani Berbasis Teknologi Informasi.

Misi Ke Lima : Peningkatan Produktifitas Dan Daya Saing Produk Sumber Daya Alam Berkelanjutan.

Tujuan : Terkelolanya Sumber Daya Alam Sulawesi Selatan Secara Optimal Yang Mampu Mendukung Daya saing tanpa Mengabaikan Kelestarian Daya Dukung Lingkungan Hidup.

Sasaran : Terkelolanya Sumber Daya Alam Sulawesi Selatan Secara Optimal Yang Mampu Mendukung Daya Saing tanpa Mengabaikan Kelestarian Daya Dukung Lingkungan Hidup.

Strategi Optimal : Mengelola Sumber Daya Alam Sulawesi Selatan Secara Optimal

Yang Mampu Mendukung Daya Saing Tanpa Mengabaikan Kelestarian Dan Daya Dukung Lingkungan Hidup Melalui Pelaksanaan Program : Tata Kelola Sumber Daya Alam Dengan Memperhatikan Daya Dukung Alam; Peningkatan Pengetahuan Budidaya Masyarakat; Diversifikasi Produk; Peningkatan Kualitas Dan Daya Saing Hasil Sektor Unggulan Ekonomi; dan Perbaikan Tata Niaga Dan Perluasan Pangsa Pasar Produk Unggulan Ekonomi.

Arah Kebijakan : Revitalisasi Petik – Olah – Jual Yang Didukung teknologi

A.2 TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

1. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan mencapai tujuan dan sasaran dalam Renstra dengan efektif dan efisien Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai. Ia merupakan langkah-langkah yang berisikan program- program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi tersebut selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Penetapan strategi dilakukan untuk menjawab cara pencapaian sasaran-sasaran pembangunan dan jangka waktu pencapaian sasaran-sasaran tersebut.

Sebuah strategi dapat dilakukan untuk menjawab satu sasaran pembangunan ataupun lebih dari satu sasaran pembangunan, dengan mempertimbangkan aspek efektifitas dan efisiensi pencapaian target sasaran.

Rumusan kebijakan umum bertujuan menjelaskan cara yang ditempuh untuk menterjemahkan strategi ke dalam rencana program-program prioritas pembangunan. Kebijakan umum pembangunan memberikan arah perumusan rencana program prioritas pembangunan yang disertai kerangka pengeluaran jangka menengah daerah dan menjadi pedoman dalam menyusun program dan kegiatan pada Rencana Strategis (Renstra) bagi Dinas Perdagangan, sebagaimana dipaparkan pada tabel berikut :

VISI : Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter			
MISI : (1) Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani, Inovatif dan berkarakter			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
(1) Peningkatan akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah	(1) Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur dengan Mengarahkan Pada Pencapaian Kinerja dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	(1) Meningkatkan Akuntabilitas Perangkat Daerah & Sumber Daya Manusia Aparatur	(1) Peningkatan Kapabilitas Kelembagaan, Koordinasi, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia
MISI : (5) Peningkatan Produktifitas Dan Daya Saing Produk Sumber Daya Alam Berkelanjutan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan

(1) Peningkatan kinerja ekspor non-migas	(1) Meningkatnya kinerja ekspor non migas	(1) Peningkatan Kualitas Sarana, Prasarana, Pelaku Ekspor Impor, serta Pengawasan Ekspor dan Impor (2) Peningkatan Promosi dan Informasi Pasar Ekspor	(1) Peningkatan Kualitas melalui Pengembangan SDM Pelaku Ekspor dan Impor, serta Pengawasan Impor (2) Peningkatan Frekuensi Pameran dan Misi Dagang di Negara Tujuan
(2) Peningkatan konsumsi daerah yang mendukung pertumbuhan ekonomi	(1) Terwujudnya stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok (2) Terwujudnya konsumen berdaya dan pelaku usaha yang bertanggung jawab	(1) Memperkuat & memperluas pasar dalam negeri (1) Meningkatkan Kualitas Pengawasan Barang Beredar, Kelembagaan BPSK, serta pengujian/ sertifikasi mutu barang	(1) Peningkatan stabilisasi ketersediaan bahan pokok dan penguatan jaringan distribusi (1) Peningkatan Kualitas Pengawasan Barang Beredar, Kelembagaan BPSK, serta pengujian/

Program Kerja APBD Tahun 2022

1. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
2. Program Peningkatan Sarana Distribusi
3. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
4. Program Pengembangan Ekspor
5. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

B. RENCANA KERJA (PENETAPAN INDIKATOR KINERJA)

1. Rencana Kerja Tahun 2022

Dengan berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Perdagangan menyusun Rencana Kerja (RENJA) yang memuat kebijakan, program dan kegiatan yang meliputi kegiatan pokok dan kegiatan pendukung (sub kegiatan) untuk mencapai sasaran hasil program induknya , dan dirinci menurut sasaran output dan outcome. Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018 – 2023 disusun Rencana Kerja (performance plan) setiap tahunnya. Rencana Kerja

Tahunan (RKT) untuk tahun 2022 yang merupakan komitmen untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya dan sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi. Untuk Tahun 2022 Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan melakukan serangkaian kegiatan dengan menggunakan dana yang bersumber dari APBD Provinsi Sulawesi Selatan dan APBN (Dana Dekonsentrasi) dari Kementerian Perdagangan. Dana yang bersumber dari APBD Provinsi Sulawesi Selatan dialokasikan pada 6 (Enam) program yang terinci dalam 13 kegiatan dan 31 Sub Kegiatan, Dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terdiri dari 6 Kegiatan :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah,

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah,

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor

- Fasilitas Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Sub Kegiatan :
- Pengadaan Aset Tak Berwujud
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub Kegiatan :
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan Yang Terdiri dari 2 Kegiatan :

1. Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor

Sub Kegiatan :

1. Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)

Sub Kegiatan :

- Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA

3. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Yang Terdiri Dari 1 Kegiatan :

1. Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas

Sub Kegiatan :

Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi

4. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting, Yang Terdiri Dari 1 Kegiatan :

1. Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan.

Sub Kegiatan :

- Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

5. Program Pengembangan Ekspor, Yang Terdiri Dari 1 Kegiatan :

1. Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi

Sub Kegiatan :

- Pameran Dagang Internasional/Nasional
- Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor

6. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen

Yang Terdiri Dari 3 Kegiatan :

1. Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen,

2. Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- Pengembangan Layanan Pengujian

- Pengembangan Layanan Sertifikasi

- Pengembangan Layanan Kalibrasi

3. Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen

Keenam Program tersebut ditetapkan dalam Renstra untuk tahun anggaran 2022 yang disesuaikan dengan penetapan indikator kinerja dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2022 (terlampir).

Sedangkan dana yang bersumber dari APBN Departemen Perdagangan dialokasikan pada 2 (dua) Program 2 Kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:

- **Program Perdagangan Luar Negeri** dengan anggaran sebesar Rp. 240.699.000,-
- **Program Perdagangan Dalam Negeri** dengan anggaran sebesar Rp. 671.084.000,-

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Dokumen Perjanjian Kinerja, merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan.

Tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur dengan Mengarahkan Pada Pencapaian Kinerja dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Sakip Organisasi Perangkat Daerah	A
2	Meningkatnya kinerja ekspor non migas	Nilai Ekspor Perdagangan	1.584.085.320 \$ US
3	Terwujudnya stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok	% Stabilitas harga dan ketersediaan informasi harga barang kebutuhan pokok	100%
4	Terwujudnya konsumen berdaya dan pelaku usaha yang bertanggung jawab	1. % Keberdayaan Konsumen 2. % Produk/komoditi yang tersertifikasi	100% 100%

Untuk mewujudkan Perjanjian Kinerja yang telah diperjanjikan tersebut, Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan 6 program dengan 13 Kegiatan dan 30 Sub kegiatan dengan jumlah anggaran sebelum perubahan sebesar Rp. 20.575.233.745,-. Adapun setelah perubahan anggaran, Dinas Perdagangan mendapatkan alokasi anggaran sejumlah Rp. 16.366.857.597,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban

Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan, sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya, berkewajiban untuk menyampaikan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di bidang perdagangan secara tertulis setiap berakhirnya tahun anggaran.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tanggal 20 November 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan berkewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja ini adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai atas hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Dalam penilaian akuntabilitas tersebut diperlukan pengukuran kinerja, yaitu suatu instrumen manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Pengukuran kinerja menjadi jembatan antara perencanaan strategis dan akuntabilitas. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

Tabel Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja			Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91	≤	100	Sangat Tinggi
2	76	≤	90	Tinggi
3	66	≤	75	Sedang
4	51	≤	65	Rendah
5	0	≤	50	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

Metode yang digunakan untuk menghitung tingkat capaian kinerja kegiatan dan sasaran di atas adalah dengan menggunakan perbandingan sederhana antara target dan realisasi dalam tahun yang bersangkutan. Untuk menghitung tingkat capaian kinerja sasaran, bobot yang diberikan adalah sama besar yang berarti diasumsikannya bahwa setiap indikator sasaran dari suatu sasaran memiliki pengaruh yang sama terhadap sasaran yang bersangkutan.

Untuk lebih jelasnya dibawah ini dijelaskan realisasi pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\text{Persentase Pencapaian Target Dari Masing-masing Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja , maka digunakan rumus :

$$\text{Persentase Pencapaian Target Dari Masing-masing Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Target} - \text{Realisasi})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Olehnya itu di bab ini, akan diuraikan capaian kinerja organisasi Dinas Perdagangan Prov. SulSel untuk tahun 2022, baik capaian sasaran organisasi maupun capaian keuangan dari anggaran yang berhasil diserap di tahun 2022 ini yang dikelola oleh Dinas Perdagangan selaku Perangkat Daerah (PD) Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana yang dapat dijelaskan dibawah ini.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Kinerja instansi pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja Program Utama yang hendak dicapai dengan realisasi kinerja organisasi. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (performance gap) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang. Hal ini bermanfaat dalam memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana suatu organisasi telah mewujudkan misi yang telah ditetapkan.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Pencapaian indikator kinerja yang

telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan periode 2018-2023.

Rincian tingkat capaian yang telah ditetapkan dengan melihat tingkat capaian kinerja masing-masing sasaran strategis terhadap indikator kinerja diuraikan pada tabel berikut :

Target dan Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Dinas Perdagangan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Kinerja		
			Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur dengan Mengarahkan Pada Pencapaian Kinerja dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Sakip Organisasi Perangkat Daerah	a	bb	90,18 %
2	Meningkatnya kinerja ekspor non migas	Nilai Ekspor Perdagangan	1.584.085.320 \$ US	2.358.936.318,58 \$ US	148,91 %
3	Terwujudnya stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok	% Stabilitas harga dan ketersediaan informasi harga barang kebutuhan pokok	100 %	100 %	100 %
4	Terwujudnya konsumen berdaya dan pelaku usaha yang bertanggung jawab	% Keberdayaan konsumen	100 %	100 %	100 %
		% Produk/Komoditi yang tersertifikasi	100 %	100 %	100 %

Dari 5 indikator kinerja yang mendukung 4 sasaran strategis, 4 indikator kinerja sasaran mencapai target yang ditetapkan. Sedangkan Indikator Nilai Sakip OPD belum mencapai target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan karena ada beberapa hal yang dianggap perlu untuk mendapat penyempurnaan, yaitu : Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja.

A.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Dari gambaran diatas, dapat disimpulkan bahwa Dinas Perdagangan Prov.Sulawesi Selatan dapat mencapai sasaran yang ditargetkan pada tahun

2022. Selanjutnya di bawah ini, diuraikan lebih lanjut mengenai capaian masing-masing sasaran, serta program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan Prov. Sulsel sepanjang tahun 2022 sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1 :

Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur dengan Mengarahkan Pada Pencapaian Kinerja dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi

Perbandingan antara target dan realisasi untuk indikator kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur dengan Mengarahkan Pada Pencapaian Kinerja dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Sakip Organisasi Perangkat Daerah	A	BB	90,18 %

Formulasi Perhitungan :

- **Realisasi indikator 1.** = Nilai SAKIP Dinas Perdagangan
= BB → 72,15
- **Capaian** = $72,15 : 80 \times 100$
= 90,18 %

Sasaran strategis ke-1 yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah, dimana indikator kinerja utamanya yaitu

1. Nilai Sakip Organisasi Perangkat Daerah

- Nilai Sakip Dinas Perdagangan untuk tahun 2022 dengan target predikat "A" atau nilai 80 %. Adapun realisasi nilai Sakip Dinas Perdagangan memperoleh nilai 72,15 dengan predikat "bb" , dimana tingkat capaiannya sebesar 90,18

%. Penilaian Sakip yang diperoleh Dinas Perdagangan berdasarkan diuraikan dalam tabel berikut:

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai
A	Perencanaan Kinerja	30	21,60
B	Pengukuran Kinerja	30	21,00
C	Pelaporan Kinerja	15	11,55
D	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	18,00
Nilai Hasil Evaluasi		100	72,15
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB	

2. Perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun sebelumnya.

Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan tahun-tahun sebelumnya untuk indikator kinerja ini, dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun 2021		Tahun 2022	
			Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur dengan Mengarahkan Pada Pencapaian Kinerja dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Sakip Organisasi Perangkat Daerah	BB	80 %	BB	90,18 %

Di tahun 2022 ini menjadi tahun keempat dari pengukuran kinerja dari Renstra Periode 2018-2023, terlihat bahwa capaian yang dihasilkan telah sangat baik. Bila dibandingkan dengan realisasi yang diperoleh pada tahun 2021, terlihat realisasi mengalami kenaikan pada tahun 2022. Hal ini tentu menjadi pendorong dalam mencapai target-target kinerja di tahun-tahun mendatang.

3. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis.

Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis dan standar nasional untuk indikator sasaran ini, dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi 2022	Target Jangka Menengah	Capaian Kinerja Jangka Menengah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur dengan Mengarahkan Pada Pencapaian Kinerja dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Sakip Organisasi Perangkat Daerah	BB	A	BB

Di tahun 2022 ini, dimana menjadi tahun ketiga dari pengukuran kinerja dari Renstra Periode 2018-2023, terlihat bahwa capaian yang dihasilkan tiap tahun mengalami peningkatan, Dinas Perdagangan akan membuat solusi atau upaya dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan

Dari analisis capaian kinerja diatas, dapat dilihat bahwa Dinas Perdagangan Prov. SulSel dalam meningkatkan tingkat kedisiplinan ASN, meningkatkan capaian kinerja serta meningkatkan nilai SAKIP Perangkat Daerah telah berjalan baik dengan berbagai upaya yang dilakukan antara lain perbaikan fasilitas dan sarana kerja, peningkatan kemampuan dan wawasan ASN dengan mengikutsertakan dalam kegiatan bimtek, sosialisasi dan lainnya. Selain itu secara rutin, diadakan pertemuan internal dalam membahas hasil pelaksanaan kegiatan dari masing-masing unit kerja, sehingga dapat diketahui kendala permasalahan

yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Sejalan dengan itu, koordinasi dan konsultasi kepada pihak eksternal lainnya pun dilakukan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam rangka mewujudkan tata kelola perangkat daerah yang baik dan professional

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran yang ditetapkan pada APBD TA 2022 untuk mendukung pencapaian sasaran ini terdiri dari 1 Program, dengan pagu anggaran sebesar Rp 11.862.708.671, maka realisasi anggaran diperoleh sebesar Rp 11.455.799.107, sehingga capaian anggaran yang diperoleh sebesar **96,57%**. Dibandingkan dengan capaian kinerja yang diperoleh sebesar **100%**, Rincian program dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Uraian	Anggaran Tahun 2022	Realisasi	Persen
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	11.862.708.671	11.455.799.107	96,57%
Jumlah		11.862.708.671	11.455.799.107	96,57%

6. Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang /kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran dapat dilihat dalam bentuk matriks dibawah ini:

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2022)			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2022) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN n-1 (%)	
			K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	K	Rp.	K	Rp.
3	4	5	8			13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 * 100%	

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Penurunan Temuan berdasarkan LHP	%	100,0	16.656.720.838,0	11.862.708.671,0	100,0	11.455.799.107,0	100,0	96,57
	Persentase ASN Perangkat daerah berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik	%	100,0			100,0		100,0	
	Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	%	100,0			100,0		100,0	
Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	% Penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu	%	100,0	275.602.000,0	152.568.900,0	100,0	152.443.200,0	100,0	99,92
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja dan Perubahan Renja dan Dokumen Renstra PD yang disusun dan ditetapkan	Dokumen	2,0	19.855.000,0	14.979.800,0	2,0	14.979.800,0	100,0	100,0
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA yang tersusun	Dokumen	1,0	16.517.000,0	14.892.500,0	1,0	14.892.500,0	100,0	100,0
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA yang tersusun	Dokumen	1,0	13.652.000,0	16.335.000,0	1,0	16.335.000,0	100,0	100,0
Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD	Jumlah Dokumen DPA yang tersusun	Dokumen	1,0	20.990.000,0	9.420.000,0	1,0	9.420.000,0	100,0	100,0
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA yang tersusun	Dokumen	1,0	15.165.000,0	15.919.700,0	1,0	15.795.000,0	100,0	99,22
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja OPD (lapLakip, LPPD, LKPI, Laporan tahunan, Laporan Kegiatan, laporan evaluasi renja, laporan SIARFAK, laporan realisasi APBD dan APBN) yang tersusun	Dokumen	12,0	189.423.000,0	81.021.900,0	12,0	81.020.900,0	100,0	100,0
<i>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</i>								100,0	16,65
<i>Predikat Kinerja</i>									
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	% Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu	%	100,0	12.017.057.217,0	8.660.490.972,0	100,0	8.396.575.141,0	100,0	96,95
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah TPP ASN yang terbayar	Orang/Bulan	76,0	11.958.394.189,0	8.635.491.172,0	76,0	8.371.744.141,0	100,0	96,95
	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayar	Orang/Bulan	76,0			76,0		100,0	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran/SKPD	Jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun yang disusun	Laporan	2,0	34.625.000,0	11.774.800,0	2,0	11.627.000,0	100,0	98,74
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Keuangan	Dokumen	1,0	7.198.028,0	3.000.000,0	1,0	3.000.000,0	100,0	100,0
<i>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</i>								80,0	24,72
<i>Predikat Kinerja</i>									
Administrasi Umum Perangkat Daerah	% Pemenuhan Administrasi Umum Kantor	%	100,0	1.297.798.000,0	512.590.500,0	100,0	508.586.322,0	100,0	99,22
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	Unit	15,0	5.000.000,0	1.680.000,0	15,0	1.680.000,0	100,0	100,0
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor yang tersedia	Unit	20,0	150.000.000,0	0,0	15,0	0,0	75,0	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik yang tersedia	Jenis	70,0	300.360.000,0	97.543.500,0	70,0	97.519.705,0	100,0	99,98
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu yang difasilitasi	Orang	200,0	50.000.000,0	35.680.000,0	200,0	31.989.000,0	100,0	89,66
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang diselenggarakan dan diikuti	Kali	28,0	792.438.000,0	377.687.000,0	28,0	377.397.617,0	100,0	99,92
<i>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</i>								95,0	15,58
<i>Predikat Kinerja</i>									
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100,0	120.000.000,0	214.452.000,0	100,0	212.452.000,0	100,0	99,07
Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Pengadaan Aset Tak Berwujud	Unit	1,0	50.000.000,0	200.000.000,0	1,0	198.000.000,0	100,0	99,0
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Item	5,0	20.000.000,0	14.452.000,0	0,0	14.452.000,0	0,0	100,0
<i>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</i>								25,0	24,88
<i>Predikat Kinerja</i>									
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100,0	2.538.769.965,0	1.917.115.349,0	100,0	1.803.669.869,0	100,0	94,08
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, Biaya tagihan air dan listrik yang terbayarkan	Bulan	12,0	646.939.997,0	612.617.693,0	12,0	523.252.973,0	100,0	85,41
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang terbayar	Bulan	12,0	1.881.829.968,0	1.304.497.656,0	12,0	1.280.416.896,0	100,0	98,15
<i>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</i>								66,67	30,59
<i>Predikat Kinerja</i>									
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	% Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	%	100,0	337.493.656,0	405.490.950,0	100,0	382.072.575,0	100,0	94,22
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan jabatan/dinas yang di pelihara	Unit	2,0	30.000.000,0	199.990.950,0	2,0	186.612.975,0	100,0	93,31
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung Kantor atau bangunan lainnya yang terpelihara	sarana	10,0	107.493.656,0	205.500.000,0	10,0	195.459.600,0	100,0	95,11
<i>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</i>								40,0	18,84
<i>Predikat Kinerja</i>									

Sasaran Strategis 2 ***Meningkatnya kinerja ekspor non migas***

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi

Perbandingan antara target dan realisasi untuk indikator kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kinerja Ekspor Non Migas	Nilai Ekspor Perdagangan	1.584.085.320 \$ US	2.358.936.318,58 \$ US	148,91%

Formulasi Perhitungan :

$$\begin{aligned}
 \bullet \text{ Realisasi} &= \frac{2.358.936.318 \text{ US\$}}{1.584.085.320 \text{ US\$}} \times 100\% \\
 &= 148,91\%
 \end{aligned}$$

Sasaran strategis ke-2 yaitu Meningkatkan Kinerja Ekspor, dimana indikator kinerja utamanya yaitu **Nilai Ekspor Perdagangan**.

Dari tabel diatas dapat diketahui realisasi Nilai Ekspor Bersih Perdagangan pada tahun 2022 sebesar 2.358.936.318 US\$, sehingga capaian kinerja yang diperoleh sebesar 148,91 % atau kriteria "Tinggi " dari target kinerja yang telah ditetapkan sebesar 1.584.085.320 US\$

2. Perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun sebelumnya.

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun 2021		Tahun 2022	
			Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

1	Meningkatnya Kinerja Ekspor Non Migas	Nilai Ekspor Bersih Perdagangan	1.677.394.840,03 US\$	114,36 %	2.358.936.918,58 US\$	148,91 %
---	---------------------------------------	---------------------------------	--------------------------	----------	--------------------------	----------

Dari tabel diatas terlihat Realisasi Nilai Ekspor perdagangan pada tahun 2021 sebesar 1.677.394.840,03 US\$ mengalami peningkatan sebesar 681.542.078,55 US\$ sehingga realisasi di tahun 2022 menjadi 2.358.936.918,58 US\$, capaian kinerja meningkat sebesar 34,55 % di tahun 2022

3. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi 2022	Target Jangka Menengah	Capaian Kinerja Jangka Mengah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kinerja Ekspor	Nilai Ekspor Bersih Perdagangan	2.358.936.318,58 US\$	1.584.085.320 US\$	4.036.331.158,58

4. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan.

Dari analisis capaian kinerja diatas, dapat diketahui jikalau penyebab keberhasilan capaian kinerja indikator sasaran Nilai Ekspor Perdagangan adalah diantaranya :

- Realisasi nilai ekspor Sulawesi Selatan periode Januari-Desember 2022 mengalami peningkatan yang sangat signifikan sebesar 40,63 persen jika dibandingkan periode yg sama tahun 2021, dengan total nilai ekspor sebesar US\$ 2.358.937.318,55 Milyar atau setara dengan Rp. 34,44 Triliun, total volume ekspor sebesar 1.006.975,29 Ton.

- Sektor pertanian dan perikanan tumbuh sebesar 33,96 persen dgn nilai ekspor sebesar US\$ 432,66 juta atau setara dengan Rp. 6,31 Triliun.
- Sektor Industri tumbuh sebesar 7,53 persen dgn nilai ekspor sebesar US\$ 300,91 juta atau setara dengan Rp. 4,39 Triliun.
- Sektor Tambang tumbuh sebesar 51,26 persen dgn nilai ekspor sebesar US\$ 1,62 Milyar atau setara dengan Rp. 23,73 Triliun.
- Peningkatan Kompetensi melalui Export Coaching Program dengan Fasilitas Bimtek Prosedur ekspor dan Akses Pasar serta Diseminasi Kebijakan Ekspor dan Implementasi System e-SKA versi 2.
- Peningkatan Akses Pasar melalui Misi & Pameran Dagang serta Business matching di beberapa provinsi di Indonesia dalam rangka peningkatan dan pengembangan ekspor Sulawesi Selatan.
- Peningkatan Promosi Digital melalui Trade Expo Indonesia (TEI) dan Kolaborasi dengan market place.
- Pelepasan Ekspor Perdana CV. Surya Mandiri Sejahtera Komoditi Pala dan Cengkeh Ke Negara Rusia
- Pelepasan Ekspor Komoditas Unggulan Sulawesi Selatan ke Pasar Global Di Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar
- Pelepasan Ekspor Produk Halal Andalan Sulawesi Selatan pada hari jadi Sulawesi Selatan ke 353 di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Hasil analisis kinerja sasaran “Meningkatnya Kinerja Ekspor”, Anggaran yang ditetapkan pada APBD TA 2022 untuk mendukung pencapaian sasaran ini terdiri dari 2 Program dan 2 kegiatan, yakni :

Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan dengan pagu anggaran sebesar Rp 188.041.000. Adapun realisasi anggaran diperoleh sebesar Rp 170.600.136, capaian anggaran yang diperoleh sebesar 90,72% dan capaian fisik mencapai 100%. sehingga dapat disimpulkan pada program ini terjadi efisiensi Anggaran sebesar 9,28%.

Program Pengembangan Ekspor dengan pagu anggaran sebesar Rp 640.884.000. Adapun realisasi anggaran diperoleh sebesar Rp 537.540.988. capaian anggaran yang diperoleh sebesar 83,87%, dan capaian fisik 100%. sehingga dapat disimpulkan pada program ini terjadi efisiensi Anggaran sebesar 16,13%.

Rincian program dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Uraian	Anggaran Tahun 2022	Realisasi	Persen
1	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	188.041.000	170.600.136	90,72%
2	Program Pengembangan Ekspor	640.884.000	537.540.988	83,87 %
Jumlah		828.925.000	708.141.124	85,42 %

6. Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang /kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran dapat dilihat dalam bentuk matriks dibawah ini:

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SU BKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2022)			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2022) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN n-1 (%)	
			K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	K	Rp.	K	Rp.
3	4	5	8			13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 * 100%	
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai Ekspor Perdagangan	\$ US	1.584.085.320,0	678.875.000,0	640.884.000,0	2.358.936.318,58	537.540.988,0	148,91	83,87
Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari satu Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Jumlah Promosi dagang yang diselenggarakan	Lokasi	2,0	678.875.000,0	640.884.000,0	2,0	537.540.988,0	100,0	83,87
Pameran Dagang Internasional/Nasional	Jumlah Lokasi Pameran dagang internasional/nasional yang diikuti	Lokasi	2,0	200.000.000,0	217.918.000,0	2,0	193.136.025,0	100,0	88,63
Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku usaha ekspor yang di bina	Pelaku Usaha	130,0	223.875.000,0	422.966.000,0	96,0	344.404.963,0	73,85	81,43
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								34,77	17,01

Sasaran Strategis 3 :

Terwujudnya stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi

Perbandingan antara target dan realisasi untuk indikator kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terwujudnya stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok	% Stabilitas harga dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	100%	100%	100%

Sasaran strategis ke-3 yaitu Terwujudnya stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok, dimana indikator kinerja utamanya yaitu % Stabilitas harga dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok.

Kegiatan yang dilakukan selama kurun waktu tahun 2022 yaitu pemantauan 22 jenis Komoditi / bahan pokok dan penting guna menjaga stabilisasi harga di pasar, dan kegiatan pasar murah yang diadakan di 5 Kabupaten/Kota untuk menyambut Hari Besar Keagamaan. Capaian kinerja yang diperoleh sebesar 100% atau kriteria "Tinggi " dari target kinerja yang telah ditetapkan.

2. Perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun sebelumnya.

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun 2021		Tahun 2022	
			Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

1	Terwujudnya stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok	% Stabilitas harga dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	100%	100%	100%	100%
---	---	---	------	------	------	------

Dari tabel diatas dapat diketahui realisasi dan capaian pada tahun 2021 dan 2022 untuk indikator % stabilitas harga dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok yaitu 100 %. Kegiatan yang dilakukan sama yaitu pemantauan harga barang pokok dan penting guna menjaga stabilitas harga di pasar terhadap 22 jenis komoditi / bahan pokok dan penting, dan kegiatan pasar murah yang diadakan di 5 Kabupaten/Kota untuk menyambut Hari Besar Keagamaan, dimana realisasi dan capaian jumlah komoditi yang terpantau dengan harga yang stabil dan Jumlah Lokasi pasar murah yaitu 100% .

3. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi 2022	Target Jangka Menengah	Capaian Kinerja Jangka Menengah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terwujudnya stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok	% Stabilitas harga dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	100%	100%	100%

4. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan

Dari analisis capaian kinerja diatas, dapat diketahui jikalau penyebab keberhasilan capaian kinerja indikator sasaran % Stabilitas harga dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok adalah diantaranya :

- Terlaksananya pemantauan harga terhadap 22 komoditi/bahan pokok guna menjaga stabilitas harga di pasaran serta
- Terlaksananya Kegiatan pasar murah di 5 Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dari hasil analisis kinerja sasaran “Terwujudnya stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok”, Anggaran yang ditetapkan pada APBD TA 2022 untuk mendukung pencapaian sasaran ini terdiri dari 2 Program yaitu Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, dengan pagu anggaran sebesar Rp 208.982.500, adapun realisasinya sebesar Rp 200.232.765 dengan capaian anggaran sebesar 95,81 %, sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar 4,19 %

Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, dengan pagu anggaran sebesar Rp 1.086.441.500, adapun realisasi anggaran diperoleh sebesar Rp 1.084.168.500 dengan capaian anggaran yang diperoleh sebesar 99,79 %, dengan efisiensi anggaran sebesar 0,21 %.

Rincian program dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Uraian	Anggaran Tahun 2022	Realisasi	Persen
1	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	208.982.500	200.232.765	95,81
2	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	1.086.441.500	1.084.168.500	99,79
Jumlah		1.483.465.000	1.455.001.401	98,08

6. Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang /kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran dapat dilihat dalam bentuk matriks dibawah ini:

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SU BKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2022)			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2022) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN n-1 (%)	
			K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	K	Rp.	K	Rp.
3	4	5	8			13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 * 100%	
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN Dinas Perdagangan									
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN	Persentase Rekomendasi SIUP MB yang dikeluarkan	%	100,0	199.932.500,0	188.041.000,0	100,0	170.600.136,0	2.000,0	90,72
PERUSAHAAN	Persentase Penerbitan SKA	%	100,0			100,0		2,08	
Penerbitan Surat Keterangan Asal SKA Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir API	Jumlah Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA)	Dokumen	4.800,0	113.555.000,0	188.041.000,0	5.013,0	170.600.136,0	104,44	90,72
Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah permohonan Penerbitan SKA	Dokumen	4.800,0	113.555.000,0	188.041.000,0	5.013,0	170.600.136,0	104,44	90,72
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								104,44	90,72
<i>Predikat Kinerja</i>									
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Ketersediaan Sarana Distribusi Perdagangan	%	100,0	348.980.536,0	208.982.500,0	100,0	200.232.765,0	3.333,33	95,81
Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	Jumlah sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Sarana	3,0	348.980.536,0	208.982.500,0	3,0	200.232.765,0	100,0	95,81
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah sarana dan prasarana yang termanfaatkan/tersewakan	Sarana	3,0	338.980.536,0	208.982.500,0	3,0	200.232.765,0	100,0	95,81
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								50,0	47,91
<i>Predikat Kinerja</i>									
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase barang kebutuhan pokok dan barang penting yang dapat dikendalikan harganya	%	100,0	715.222.000,0	1.086.441.500,0	100,0	1.084.168.500,0	454,55	99,79
Pengendalian Harga Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Komoditi dengan harga yang terkendali	Komoditi	22,0	665.222.000,0	1.086.441.500,0	22,0	1.084.168.500,0	100,0	99,79
Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam satu Daerah Provinsi	Jumlah Lokasi Pelaksanaan Pasar Murah	Lokasi	5,0	575.985.000,0	1.086.441.500,0	5,0	1.084.168.500,0	100,0	99,79
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								50,0	49,90

Berdasarkan tabel diatas, ada 2 program yang mendukung sasaran "Terwujudnya stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok" pada APBD TA 2022, yaitu Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, dengan pagu anggaran sebesar Rp 208.982.500. adapun Realisasi anggaran yang diperoleh sebesar Rp 200.232.765 dengan capaian sebesar 95,81 %.

Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, dengan pagu anggaran sebesar Rp 1.086.441.500. Adapun realisasi anggaran yang diperoleh sebesar Rp 1.084.168.500 dengan capaian 99,79%.

Sasaran Strategis 4 :

Terwujudnya konsumen berdaya dan pelaku usaha yang bertanggung jawab

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi

Perbandingan antara target dan realisasi untuk indikator kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terwujudnya konsumen berdaya dan pelaku usaha yang bertanggung jawab	1. % Keberdayaan konsumen	100%	100%	100%
		2. % Produk/Komoditi yang tersertifikasi	100%	100%	100%

2. Perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun sebelumnya.

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun 2021		Tahun 2022	
			Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terwujudnya konsumen berdaya dan pelaku usaha yang bertanggung jawab	1. % Keberdayaan konsumen	100%	100 %	100%	100%
		2. % Produk/Komoditi yang tersertifikasi	100%	40,85%	100%	100%

Dari tabel diatas dapat diketahui, dari 2 indikator sasaran yang ada, realisasi dan capaian pada tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021. Untuk indikator sasaran % keberdayaan konsumen, realisasi dan capaian mencapai 100 %, sama dengan tahun sebelumnya. Untuk indikator sasaran % Produk/ komoditi yang tersertifikasi, realisasi mencapai 100%, sama dengan tahun sebelumnya. Adapun

capaian perubahan nomenklatur sasaran dan indikator sasaran di tahun 2022, mencapai 100%, melebihi capaian tahun sebelumnya yang hanya 40,85%.

3. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi 2022	Target Jangka Menengah	Capaian Kinerja Jangka Menengah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terwujudnya konsumen berdaya dan pelaku usaha yang bertanggung jawab	1. % Keberdayaan konsumen	100%	100%	116,67 %
		2. % Produk/Komoditi yang tersertifikasi	100%	100%	68,15%

4. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan

Dari hasil analisis capaian kinerja diatas, ada beberapa kendala yang bisa menjadi penyebab kegagalan/penurunan kinerja, diantaranya yaitu :

- Sumber Daya Manusia (SDM) yang minim menyebabkan Efektifitas kegiatan menjadi kurang Maksimal
- Sarana dan prasarana Kerja yang belum memadai (perlu pembaruan dan penambahan sarana dan prasarana)
- Masih banyak konsumen yang belum mengetahui tentang Undang Undang Perlindungan Konsumen, mereka belum memahami Hak dan Kewajibannya, belum mengetahui Lembaga Perlindungan Konsumen serta dimana tempat konsumen mengadu bilamana terjadi konsumen dirugikan oleh pelaku usaha
- Beberapa Eksportir melakukan pengiriman barang tanpa disertifikasi, walaupun sdh melakukan pembayaran retribusi.

Adapun beberapa solusi yang dilakukan, diantaranya :

- Edukasi / sosialisasi Perlindungan Konsumen perlu terus dilaksanakan secara masif, sehingga Undang Undang No.8 Tentang Perlindungan

Konsumen dikenal di masyarakat dan konsumen lebih memahami hak dan kewajibannya serta pelaku usaha lebih menjaga kualitas produk yang dihasilkan dan dipasarkan

- Perlu segera dibentuk Badan Penyelesaian Sengketa konsumen (BPSK) agar penanganan kasus konsumen dapat diselesaikan dengan cepat, murah dan tidak membutuhkan waktu yang lama
- Perlu dilakukan sinergitas dengan bidang terkait di Dinas Perdagangan dalam rangka pengawasan terhadap komoditi, baik yang akan diekspor maupun antar pulau agar sesuai dengan pergub yang telah ditetapkan dan masih berlaku sampai saat ini
- Mengusulkan penambahan tenaga SDM yang berkompetensi, sedangkan SDM yang telah ada ditingkatkan kapasitasnya melalui pelatihan.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Uraian	Anggaran Tahun 2022	Realisasi	Persen
1	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	2.379.799.926	2.342.776.152	98.44
Jumlah		2.379.799.926	2.342.776.152	98.44

berdasarkan tabel diatas, alokasi anggaran tahun 2022 untuk program yang mendukung sasaran Terwujudnya konsumen berdaya dan pelaku usaha yang bertanggung jawab sebesar Rp 2.379.799.926, adapun realisasi nya sebesar Rp. 2.342.776.152, atau sebesar 98,44%, dan realisasi fisik mencapai 100%. Jadi masih ada sekitar 1,56 % anggaran belanja yang dihemat.

6. Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang /kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran dapat dilihat dalam bentuk matriks dibawah ini:

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SU BKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2022)			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2022) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN n-1 (%)	
			K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	K	Rp.	K	Rp.
3	4	5	8			13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 * 100%	
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Barang Beredar yang diawasi, tertib niaga dan Pengaduan Konsumen	%	100,0	1.554.699.867,0	2.379.799.926,0	100,0	2.342.776.152,0	100,0	98,44
Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah KabupatenKota	Jumlah pengaduan konsumen yang ditangani	Aduan	30,0	340.600.100,0	19.998.000,0	41,0	19.941.616,0	136,67	99,72
Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumlah peserta Sosialisasi Pemberdayaan Konsumen	peserta	100,0	340.600.100,0	19.998.000,0	0,0	19.941.616,0	0,0	99,72
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	Jumlah BPSK yang terfasilitasi	BPSK	2,0			0,0		0,0	99,72
<i>Predikat Kinerja</i>									
Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah KabupatenKota	Rata2 Sertifikat yang diterbitkan	Sertifikat	1.843,0	1.115.009.767,0	2.249.210.926,0	2.140,0	2.212.328.912,0	116,12	98,36
Pengembangan Layanan Pengujian	Jumlah Sertifikasi hasil uji komoditi yang diterbitkan	sertifikat	2.100,0	412.511.043,0	1.249.240.150,0	1.744,0	1.221.055.122,0	83,05	97,74
Pengembangan Layanan Sertifikasi	Jumlah Sertifikasi Produk Pengguna Tanda Standar Nasional Indonesia yang diterbitkan	sertifikat	30,0	463.940.212,0	499.970.776,0	6,0	492.029.790,0	20,0	98,41
Pengembangan Layanan Kalibrasi	Jumlah Sertifikasi Kalibrasi alat yang diterbitkan	sertifikat	3.400,0	238.558.512,0	500.000.000,0	3.276,0	499.244.000,0	96,35	99,85
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								66,47	32,89
<i>Predikat Kinerja</i>									
Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah KabupatenKota	Jumlah pelaku usaha tertib niaga yang sesuai ketentuan Jumlah barang beredar yang diawasi yang sesuai ketentuan	Pelaku Usaha Unit	50,0 30.000,0	99.090.000,0	110.591.000,0	60,0 30.000,0	110.505.624,0	120,0 100,0	99,92
Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah pelaku usaha tertib niaga yang diawasi Jumlah Barang Beredar dan jasa Yang Diawasi	Pelaku Usaha Unit	50,0 30.000,0	99.090.000,0	110.591.000,0	60,0 19.500,0	110.505.624,0	120,0 65,0	99,92
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								92,50	99,92
<i>Predikat Kinerja</i>									

B. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM TAHUN 2022

Alokasi anggaran APBD Provinsi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 2200/XI/Tahun 2022 tanggal 1 November 2022, Tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-OPD) Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan memperoleh anggaran sebesar Rp. 16.366.857.597,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 15.791.117.648,- atau sebesar 96,48% dan realisasi fisik sebesar 100%, dengan rincian :

- Belanja Operasi sebesar Rp. 15.257.972.097,- dan realisasi sebesar Rp. 14.691.098.106,- atau sebesar 96,28 % dan realisasi fisik sebesar 100%
- Belanja Modal sebesar Rp. 1.108.885.500,- dan realisasi sebesar Rp. 1.100.019.542,- atau sebesar 99,20 % dan realisasi fisik sebesar 100% yang terdiri dari 6 Program dengan 13 Kegiatan dan 30 Sub Kegiatan.

Adapun target PAD tahun 2022 sebesar Rp. 4.462.500.000, dan realisasi sebesar Rp. 4.618.182.781,20 atau sebesar 103,49 %.

Pada Urusan Perdagangan terdapat 6 program, 13 Kegiatan dan 30 Sub Kegiatan yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Indikator Capaian Program % Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah dengan Target 100% dan realisasi 100 %, % ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Sangat Baik dengan target 100 % dan Realisasi 100 % dan % Penurunan Temuan berdasarkan LHP dengan target 100% dan realisasi 100% atau 0 temuan.

Alokasi anggaran pada program ini sebesar Rp. 11.862.708.671, telah terealisasi sebesar Rp. 11.455.799.107 atau 96,57%, dan Realisasi fisik mencapai 100%.

Yang Terdiri dari 6 Kegiatan :

- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan Indikator Capaian Kegiatan % Penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu dengan Target 100% Dan realisasi 100%.

Alokasi anggaran sebesar Rp. 152.568.900, telah terealisasi sebesar Rp. 152.443.200 atau 99,92 %, dan realisasi fisik 100 %

Sub Kegiatan :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan Indikator Capaian Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Renja dan Perubahan Renja dan Dokumen Renstra PD yang disusun dan ditetapkan dengan Target 2 dokumen dan realisasi 2 dokumen.
Alokasi anggaran sebesar Rp. 14.979.800, telah terealisasi Sebesar Rp. 14.979.800 atau 100%, dan realisasi fisik 100%.
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan Indikator capaian Sub Kegiatan Jumlah Dokumen Perubahan RKA yang tersusun dengan target 1 dokumen dan realisasi 1 dokumen
Alokasi anggaran sebesar Rp. 14.892.500, telah terealisasi Sebesar Rp. 14.892.500 atau 100 % dan realisasi fisik 100 %.

- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan indikator sub kegiatan : Jumlah Dokumen Perubahan RKA yang tersusun dengan target 1 dokumen, dan realisasi 1 dokumen.
Alokasi anggaran sebesar Rp. 16.335.000, telah terealisasi Sebesar Rp. 16.335.000 (100 %) dan fisik (100 %)
 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dengan indikator sub kegiatan : Jumlah Dokumen DPA yang tersusun dengan target 1 dokumen, dan realisasi 1 dokumen.
Alokasi anggaran sebesar Rp. 9.420.000, telah terealisasi Sebesar Rp. 9.420.000 (100 %) dan fisik (100 %)
 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD dengan indikator sub kegiatan : Jumlah Dokumen DPA yang tersusun dengan target 1 dokumen, dan realisasi 1 dokumen.
Alokasi anggaran sebesar Rp. 15.919.700, telah terealisasi Sebesar Rp. 15.795.000 (99,22 %) dan fisik (100 %)
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan indikator sub kegiatan : Jumlah Dokumen Laporan Kinerja OPD (lapLakip, LPPD, LKPJ, Laporan tahunan, Laporan Kegiatan, laporan evaluasi renja, laporan SIARFAK, laporan realisasi APBD dan APBN) yang tersusun, dengan target 12 dokumen, dan realisasi 12 dokumen.
Alokasi anggaran sebesar Rp. 81.021.900, telah terealisasi Sebesar Rp. 81.021.900 (100 %) dan fisik (100%)
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan Indikator Capaian Kegiatan, % Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu, target sebesar 100% dan Realisasi 100 %.
- Alokasi anggaran sebesar Rp. 8.660.490.972, telah terealisasi sebesar Rp. 8.396.575.141 (96,95%) dan fisik (100%)
- Sub Kegiatan :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan indikator sub kegiatan : Jumlah TPP ASN yang terbayar, Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayar, dengan target 76 orang /bulan dan realisasi 76 orang /bulan. Alokasi anggaran sebesar Rp. 8.635.491.172, telah terealisasi sebesar Rp. 8.371.744.141 (96,95%) dan fisik (100%)
 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan dengan indikator sub kegiatan : jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan yang tersusun, dengan target 1 dokumen, dan realisasi 1 dokumen.
Alokasi anggaran sebesar Rp. 10.225.000, telah terealisasi sebesar Rp. 10.204.000 (99,79%) dan fisik (100%).
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dengan indikator sub kegiatan : jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD yang tersusun, dengan target 2 laporan dan realisasi 2 laporan
Alokasi anggaran sebesar Rp. 11.774.800, telah terealisasi sebesar Rp. 11.627.000 (98,74%) dan fisik (100%)
 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran dengan indikator sub kegiatan : Jumlah laporan Prognosis yang tersusun, dengan target 1 dokumen, dan realisasi 1 dokumen
Alokasi anggaran sebesar Rp 3.000.000 telah terealisasi sebesar Rp. 3.000.000 (100%) dan fisik (100%)
- 3) Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan Indikator Capaian Kegiatan persentase Pemenuhan Administrasi Umum Kantor dengan target 100% dan realisasi 100%
- Alokasi anggaran sebesar Rp. 512.590.500, telah terealisasi sebesar Rp. 508.586.322 (99,22%) dan fisik (100%)
- Sub Kegiatan :
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan indikator sub kegiatan : jumlah komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia, dengan target 15 unit, dan realisasi 15 unit.

Alokasi anggaran sebesar Rp. 1.680.000, telah terealisasi sebesar Rp. 1.680.000 (100%) dan fisik (100%)

- Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan indikator sub kegiatan : jumlah Bahan Logistik kantor yang tersedia dengan target 70 jenis, dan realisasi 70 jenis

Alokasi anggaran sebesar Rp. 97.543.500, telah terealisasi sebesar Rp. 97.519.705 (99,98%) dan fisik (100%)

- Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan indikator sub kegiatan : Jumlah tamu yang difasilitasi dengan target 200 orang, dan realisasi 200 orang
Alokasi anggaran sebesar Rp. 35.680.000, telah terealisasi sebesar Rp. 31.989.000 (89,66%) dan fisik (100%)

- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan indikator sub kegiatan : Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang diselenggarakan dan diikuti dengan target 28 kali, dan realisasi 28 kali
Alokasi Anggaran sebesar Rp. 377.687.000, telah terealisasi sebesar Rp. 377.397.617 (99,92%) dan fisik (100%)

- 4) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Indikator Capaian Kegiatan Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah dengan target 100%, dan realisasi 100%

Alokasi anggaran sebesar Rp. 214.452.000 telah terealisasi sebesar Rp. 212.452.000 (99,02%) dan fisik (100%)

Sub Kegiatan :

- Pengadaan Aset Tak Berwujud dengan indikator sub kegiatan Jumlah Aset Tak Berwujud yang diadakan, dengan target 1 unit, realisasi 1 unit
Alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000 telah terealisasi sebesar Rp. 198.000.000 (99%) dan fisik (100%)
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan indikator sub kegiatan : jumlah Sarana dan

Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan dengan target 5 unit, dan realisasi 5 unit

Alokasi anggaran sebesar Rp. 14.452.000 telah terealisasi sebesar Rp. 14.452.000 (100%) dan fisik (100%)

- 5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Indikator Capaian Kegiatan % Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan target 100% dan realisasi 100%

Alokasi anggaran sebesar Rp. 1.917.115.349 telah terealisasi sebesar Rp. 1.803.669.869 (94,08%) dan fisik (100%)

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan indikator sub kegiatan : Jumlah jasa komunikasi, Biaya tagihan air dan listrik yang terbayarkan dengan target 12 bulan, dan realisasi 12 bulan
Alokasi anggaran sebesar Rp. 612.617.693 telah terealisasi sebesar Rp. 523.252.973 (85,41%) dan fisik (100%)
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan indikator sub kegiatan : Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang terbayar dengan target 12 bulan, dan realisasi 12 bulan
Alokasi anggaran sebesar Rp. 1.304.497.656 telah terealisasi sebesar Rp. 1.280.416.896 (98,15%) dan fisik (100%)

- 6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Indikator Capaian Kegiatan % Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik dengan target 100%, dan realisasi 100%

Alokasi anggaran sebesar Rp. 405.490.950 telah terealisasi sebesar Rp. 382.072.575 (94,22%) dan fisik (100%)

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan indikator sub kegiatan : Jumlah kendaraan jabatan/dinas yang di pelihara dengan target 2 unit, dan realisasi 2 unit

Alokasi anggaran sebesar Rp. 199.990.950 telah terealisasi sebesar Rp. 186.612.975 (93,31%) dan fisik (100%)

- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan indikator sub kegiatan : Jumlah sarana dan prasarana gedung Kantor atau bangunan lainnya yang terpelihara dengan target 10 unit, dan realisasi 10 unit

Alokasi anggaran sebesar Rp. 205.500.000 telah terealisasi sebesar Rp. 195.459.600 (95,11%) dan fisik (100%)

2. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan dengan Indikator Capaian Program Persentase Penerbitan SKA dengan target 100%, dan realisasi 100%. Alokasi anggaran sebesar Rp. 188.041.000, telah terealisasi sebesar Rp. 170.600.136 atau 90,72%, dan fisik juga telah mencapai 100%. Yang Terdiri dari 1 Kegiatan :

- 1) Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API) dengan Indikator Capaian Kegiatan Jumlah Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) dengan target 4800 dokumen, dan realisasi 5013 dokumen.

Alokasi anggaran sebesar Rp. 188.041.000 telah terealisasi sebesar Rp. 170.600.136 (90,72%) dan fisik (100%)

Sub Kegiatan :

- Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA dengan Indikator Capaian Sub Kegiatan : Jumlah permohonan Penerbitan SKA yang diproses dengan target 4800 dokumen, dan realisasi 5013 dokumen
Alokasi anggaran sebesar Rp. 188.041.000 telah terealisasi sebesar Rp. 170.600.136 (90,72%) dan fisik (100%)

3. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dengan Indikator Capaian Program Persentase Ketersediaan Sarana Distribusi Perdagangan dengan target 100%, dan realisasi 100%. Alokasi anggaran sebesar Rp. 208.982.500, telah terealisasi sebesar Rp. 200.232.765 atau 95,81%, dan fisik juga telah mencapai 100%.

Yang Terdiri Dari 1 Kegiatan :

- 1) Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas dengan Indikator Capaian Kegiatan Jumlah sarana dan prasarana dalam kondisi baik dengan target 3 sarana, dan realisasi 3 sarana

Alokasi anggaran sebesar Rp. 208.982.500, telah terealisasi sebesar Rp. 200.232.765 atau 95,81%, dan fisik juga telah mencapai 100%.

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi, dengan Indikator Capaian Sub Kegiatan : Jumlah sarana dan prasarana yang termanfaatkan/tersewakan, target 3 sarana, dan realisasi 3 sarana

Alokasi anggaran sebesar Rp. 208.982.500, telah terealisasi sebesar Rp. 200.232.765 atau 95,81%, dan fisik juga telah mencapai 100%.

- 4. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting** dengan Indikator Capaian Program Persentase barang kebutuhan pokok dan barang penting yang dapat dikendalikan harganya dengan target 100%, dan realisasi 100%. Alokasi anggaran sebesar Rp. 1.086.441.500, telah terealisasi sebesar Rp. 1.084.168.500 atau 99,79%, dan fisik telah mencapai 100%.

Yang Terdiri Dari 1 Kegiatan :

- 1) Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan dengan Indikator Capaian Kegiatan Jumlah Komoditi dengan harga yang terkendali dengan target 22 komoditi, dan realisasi 22 komoditi. Alokasi anggaran sebesar Rp. 1.086.441.500, telah terealisasi sebesar Rp. 1.084.168.500 atau 99,79%, dan fisik telah mencapai 100%.

Sub Kegiatan :

- Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah

Provinsi, dengan Indikator Capaian Sub Kegiatan : Jumlah Lokasi Pelaksanaan Pasar Murah dengan target 5 lokasi, dan realisasi juga di 5 lokasi

Alokasi anggaran sebesar Rp. 1.086.441.500, telah terealisasi sebesar Rp. 1.084.168.500 atau 99,79%, dan fisik telah mencapai 100%.

5. Program Pengembangan Ekspor dengan Indikator Capaian Program Nilai Ekspor Perdagangan dengan target 1.584.085.320 US\$, adapun realisasi mencapai 2.358.936.318,58 US\$. Alokasi anggaran sebesar Rp. 640.884.000, telah terealisasi sebesar Rp. 537.540.988 atau 83,87%, dan fisik telah mencapai 100%. Dari Program ini dihasilkan Jumlah Nilai Total Ekspor, Jumlah Pelaku usaha ekspor yang terlatih, Jumlah penyelenggaraan pameran yang terlaksana, Jumlah MOU yang dikerjasamakan, Yang Terdiri Dari 1 Kegiatan :

- 1) Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi dengan Indikator Capaian Kegiatan Jumlah Promosi dagang yang diselenggarakan dengan target 5 kali promosi di 5 lokasi, dan realisasi 2 kali promosi di 2 lokasi. Alokasi anggaran sebesar Rp. 640.884.000, telah terealisasi sebesar Rp. 537.540.988 atau 83,87%, dan fisik telah mencapai 100%.

Sub Kegiatan :

- Pameran Dagang Internasional/Nasional, dengan Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Lokasi Pameran dagang internasional/nasional yang diikuti dengan target 2 lokasi, dan realisasi 2 lokasi
Anggaran sebesar Rp. 217.918.000,- telah terealisasi sebesar Rp. 193.136.025 (88,63%) dan Fisik (100%)
- Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor, dengan Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Pelaku usaha ekspor yang di bina dengan target 130 pelaku usaha, dan realisasi 96 pelaku usaha.

Anggaran sebesar Rp. 422.966.000,- telah terealisasi sebesar Rp 344.404.963 (81,43%) dan Fisik (100%)

6. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen dengan Indikator Capaian Program Persentase Barang Beredar yang diawasi, tertib niaga dan Pengaduan Konsumen, dengan target 100 %, dan realisasi 100%. Alokasi anggaran sebesar Rp. 2.379.799.926, telah terealisasi sebesar Rp. 2.342.776.152 atau 98,44%, dan fisik telah mencapai 100%.

Yang Terdiri Dari 3 Kegiatan :

- 1) Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota dengan Indikator Capaian Kegiatan Jumlah pengaduan konsumen yang ditangani dengan target 30 aduan, dan realisasi 41 aduan yang tertangani Alokasi Anggaran Rp. 19.998.000,- Telah Terealisasi Sebesar Rp. 19.941.616 (99,72%) Dan Fisik (100%)

Sub Kegiatan :

- Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen, dengan Indikator Sub Kegiatan : Jumlah peserta Sosialisasi Pemberdayaan Konsumen dan Jumlah BPSK yang terfasilitasi, dengan target 100 peserta dan 2 BPSK. Adapun realisasi 100 dan 2 BPSK yang terfasilitasi

Alokasi Anggaran Rp. 19.998.000,- Telah Terealisasi Sebesar Rp. 19.941.616 (99,72%) Dan Fisik (100%)

- 2) Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota Dengan Indikator Capaian Kegiatan Rata2 Sertifikat yang diterbitkan dengan target 1843 sertifikat, dan realisasi 2140 sertifikat. Alokasi Anggaran Rp. 2.249.210.926,- Telah Terealisasi Sebesar Rp. 2.212.328.912 (98,36%) Dan Fisik (100%)

Sub Kegiatan :

- Pengembangan Layanan Pengujian, dengan Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Sertifikat hasil uji komoditi yang diterbitkan dengan target 2100 sertifikat, dan realisasi 1744 sertifikat hasil uji.

Anggaran Rp. 1.249.240.150,- realisasi sebesar Rp. 1.221.055.122 (97,74%) dan fisik (100%)

- Pengembangan Layanan Sertifikasi, dengan Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Sertifikat Produk Pengguna Tanda Standar Nasional Indonesia yang diterbitkan dengan target 30 sertifikat, dan realisasi 6 sertifikat
Anggaran Rp. 499.970.776,- realisasi sebesar Rp. 492.029.790 (98,41%) dan fisik (100%)
- Pengembangan Layanan Kalibrasi, dengan Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Sertifikat Kalibrasi alat yang diterbitkan dengan target 3400 sertifikat, dan realisasi 3276 sertifikat
Alokasi Anggaran Rp. 500.000.000, realisasi sebesar 4.992.440.000 (99,85%) dan fisik (100%)

- 3) Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota dengan Indikator Capaian Kegiatan Jumlah pelaku usaha tertib niaga yang sesuai ketentuan dan Jumlah barang beredar yang diawasi yang sesuai ketentuan dengan target 50 Pelaku usaha dan 30.000 unit
Alokasi Anggaran Rp. 110.591.000,- Telah Terealisasi Sebesar Rp. 110.505.624,- (99,92%) Dan Fisik (100%)

Sub Kegiatan :

- Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen, dengan Indikator Sub Kegiatan : Jumlah pelaku usaha tertib niaga yang diawasi dan Jumlah Barang Beredar dan jasa Yang Diawasi dengan target 50 pelaku usaha dan 30.000 unit. Adapun realisasi 60 pelaku usaha dan 30.000 unit
Alokasi Anggaran Rp. 110.591.000,- Telah Terealisasi Sebesar Rp. 110.505.624,- (99,92%) Dan Fisik (100%).

Selain penyelenggaraan kegiatan yang dibiayai oleh dana APBD, dalam Tahun Anggaran 2022 Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan juga melaksanakan **tugas dekonsentrasi (APBN)** di Sektor Perdagangan, dengan jumlah dana Rp

995.476.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 941.043.850,- atau sebesar 98,23%. Adapun rincian nya sebagai berikut :

- **Program Perdagangan Luar Negeri** dengan anggaran sebesar Rp. 284.146.000,- dan realisasi sebesar Rp. 282.500.300 atau 99,42 %
- **Program Perdagangan Dalam Negeri** dengan anggaran sebesar Rp. 711.330.000,- dan realisasi sebesar Rp. 695.452.950 atau 97,77%.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2022 merupakan laporan pertanggung jawaban kepada Gubernur Sulawesi Selatan dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja dalam lingkup Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan.

Penyusunan LKIP Tahun 2022 didasarkan kepada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 - 2023 yang dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022, penyusunan dokumen perencanaan tersebut dilakukan dengan memperhatikan perubahan lingkungan strategis yang begitu cepat dan berdampak kepada semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi serta semakin luasnya peluang yang dapat dimanfaatkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini mengupayakan melaporkan suatu capaian kinerja (performance result) dibandingkan dengan rencana kerja (performance plan) dari core business (ciri khas) yang mengacu pada unsur pokok yaitu dalam bidang teknis perhubungan di seluruh kegiatan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi yang meliputi bentuk administrasi

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini menyampaikan berbagai keberhasilan dan kegagalan capaian strategis yang ditunjukkan Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun anggaran 2022. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan perencanaan sebagaimana telah ditetapkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP). Namun demikian, masih perlu adanya peningkatan capaian kinerja sasaran terkait indikator

Pengawasan Barang beredar dan jasa, serta kerjasama Antara Pemerintah dan Lembaga Usaha.

4.2. Saran

1. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai instrumen control yang obyektif dan transparan dalam mengelola sarana dan prasarana serta ketrampilan sumber daya manusia untuk peningkatan penyelesaian permasalahan di Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan .
2. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bagian akhir dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat dioptimalkan pemanfaatannya sebagai alat evaluasi kinerja bagi OPD dan dapat memberikan dampak yang positif bagi Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Menjadikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai ukuran kinerja organisasi pemerintah secara nyata dan akuntabel dengan menerapkan fungsi reward and punishment.